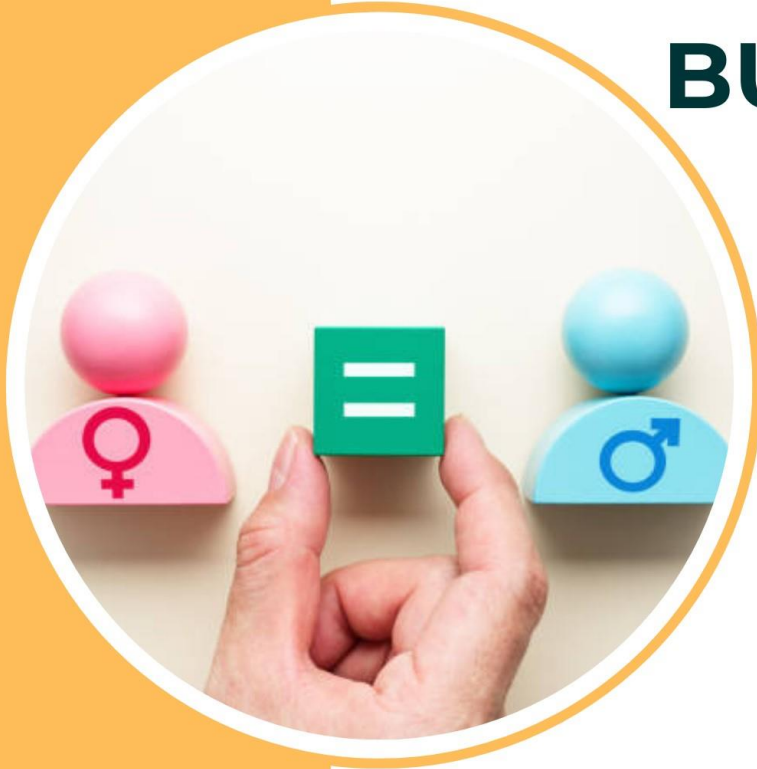


KABUPATEN BUTON



PROFIL

G E N D E R

2021



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BUTON

TIM PENYUSUN
PROFIL GENDER KABUPATEN BUTON 2021

Pengarah

Ilham Habo Nibu, SP

Penanggung Jawab

Suryafa

Penulis

LD. ABD. Rahmat B., S. Sos.

Yuliani, SKM

Reka Sri Wigati, S. Tr. Stat.

Editor

WD. Asmaini, SKM

Wa Ode Yayat Soraya, SKM

Masriati Maeta, SKM

Pengolah Data

Yuliani, SKM

Wa Ode Vivi Indrasuri, AMKL

Desain Kulit, Tata Letak dan Infografis

Riska Soraya. A, S.Psi & Puput Mentari Rizky, S. Psi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, publikasi “Profil Gender Kabupaten Buton 2021” telah terbit. Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran terkait kondisi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang dimulai dari tahapan perencanaan. Untuk melihat gambaran yang lebih akurat seyogianya tersedia data terpilah yang lebih lengkap. Namun dikarenakan data yang berbasis gender belum sepenuhnya tersedia baik data sekunder maupun primer maka penyusunan publikasi ini masih memerlukan banyak penyempurnaan.

Buku “Profil Gender Kabupaten Buton 2021” merupakan hasil Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton dan OPD terkait. Diharapkan pada tahun mendatang data yang ada dapat lebih lengkap, sehingga dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi dan pemantauan kebijakan/program/proyek yang berwawasan gender, sehingga kebijakan yang ada dapat lebih responsive gender.

Tentunya publikasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan, demi perbaikan untuk terbitan berikutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam terwujudnya publikasi ini. Harapannya agar publikasi serupa dapat dikembangkan secara berkala dan dapat digunakan untuk program kegiatan di OPD dalam meningkatkan keakuratan data dan ketepatan analisis. Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat.

Pasarwajo, Oktober 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buton

ILHAM HABO NIBU, SP
PEMBINA Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19680913 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	3
BAB 2. GAMBARAN UMUM	7
BAB 3. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN.....	15
BAB 4. PENDIDIKAN	43
BAB 5. KESEHATAN DAN KB.....	77
BAB 6. EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN	115
BAB 7. PEREMPUAN DAN POLITIK	121
BAB 8. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.....	131
BAB 9. KESIMPULAN.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kabupaten Buton	9
Gambar 2. 2 Petumbuhan IPM Kabupaten Buton 2017-2021	12
Gambar 3. 1. Piramida Penduduk Kabupaten Buton, 2021	16
Gambar 3. 2. Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2025.....	17
Gambar 3. 3 Persentase Penduduk yang Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019-2021	24
Gambar 3. 4. Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Buton, 2021	25
Gambar 3. 5. Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di Kabupaten Buton, 2021.....	27
Gambar 3. 6 Persentase Penduduk yang Berumur 15 – 49 Tahun menurut Status Perkawinan di Kabupaten Buton, 2021	28
Gambar 3. 7. Perkembangan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Buton, 2019 – 2021	31
Gambar 3. 8. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019 – 2021	32
Gambar 3. 9. Persentase Penduduk yang Menganggur Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019-2021	33
Gambar 3. 10. TPAK Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021	34
Gambar 3. 11. TPT Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021.....	35
Gambar 3. 12. Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Buton, 2021.....	36
Gambar 3. 13. Persentase Pengangguran menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Buton, 2021.....	37

Gambar 3. 14. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Sektor di Kabupaten Buton, 2021	38
Gambar 3. 15. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Buton, 2020	39
Gambar 3. 16. Employment to Population Ratio (EPR) Kabupaten Buton menurut Jenis Kelamin, 2021	40
Gambar 4. 1. Persentase Peserta Didik menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021	49
Gambar 4. 2. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Partisipasi Bersekolah di Kabupaten Buton, 2021	50
Gambar 4. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Kabupaten Buton, 2021..	52
Gambar 4. 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Buton, 2021	54
Gambar 4. 5. Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Buton, 2021	56
Gambar 4. 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Buton, 2021	59
Gambar 4. 7. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Buton 2017-2021	61
Gambar 4. 8. Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Buton 2017 – 2021 ...	62
Gambar 4. 9. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca serta Menulis di Kabupaten Buton, 2021	64
Gambar 4. 10. Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas di Kabupaten Buton, 2016-2020.....	66
Gambar 4. 11. Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15-24 Tahun di Kabupaten Buton, 2016-2020.....	67
Gambar 4. 12. Persentase Tenaga Pengajar menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021	70
Gambar 5. 1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Buton, 2017 - 2021	81
Gambar 5. 2. Persentase Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2018 – 2021	85
Gambar 5. 3. Angka Kesakitan Penduduk Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019 – 2021	86

Gambar 5. 4. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Kabupaten Buton, 2019 – 2021.....	86
Gambar 5. 5. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Buton, 2013 -2021.....	89
Gambar 5. 6. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Buton, 2018 – 2021...	90
Gambar 5. 7. Persentasi Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Buton, 2012-2021	93
Gambar 5. 8. Jumlah Kematian Neonatal Kabupaten Buton, 2019-2021.....	95
Gambar 5. 9. Jumlah Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Buton, 2019-2021	96
Gambar 5. 10. Jumlah kematian bayi kabupaten buton, 2019-2021.....	98
Gambar 5. 11. Angka kematian bayi (AKB) kabupaten buton, 2019-2021	98
Gambar 5. 12. Jumlah Kematian Balita Kabupaten Buton, 2018-2020.....	99
Gambar 5. 13. Angka Kematian Balita Kabupaten Buton, 2019-2021	100
Gambar 5. 14. Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi yang di berikan di Kabupaten Buton, 2021	102
Gambar 5. 15. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021.....	106
Gambar 5. 16. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut pernah/tidaknya memakai alat/cara KB di kabupaten buton, 2019-2021	107
Gambar 5. 17. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Buton, 2021.....	108
Gambar 5. 18. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 per Puskesmas di Kabupaten Buton 2021.....	110
Gambar 5. 19. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 menurut Puskesmas di Kabupaten buton, 2021	110
Gambar 5. 20. Perkembangan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 per Puskesmas di Kabupaten Buton 2017-2021	111
Gambar 5. 21. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kabupaten Buton 2021	112

Gambar 5. 22. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton 2019-2021	113
Gambar 6. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton dan Sulawesi Tenggara,.115	
Gambar 6. 2. Pangsa Sektor Dominan Perekonomian Kabupaten Buton, 2021	116
Gambar 6. 3. Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Buton, 2012-2021	117
Gambar 6. 4. Rata-rata Pengeluaran (000 Rp) per Kapita Penduduk Kabupaten Buton, 2019-2021	117
Gambar 7. 1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019-2024 menurut Fraksi dan Jenis kelamin	125
Gambar 7. 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021	127
Gambar 8. 1 Trend Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Buton.....	134
Gambar 8. 2 . Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2021.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Buton menurut Kecamatan, 2021.....	8
Tabel 2. 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Buton, 2017 – 2021.....	13
Tabel 3. 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Buton menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin, 2019-2021	20
Tabel 3. 2. Administrasi Penduduk Kabupaten Buton menurut Kecamatan, 2021 .	22
Tabel 3. 3. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun keatas menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton, 2021	30
Tabel 4. 1. Jumlah Peserta Didik menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021.....	48
Tabel 4. 2. Perkembangan Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Partisipasi Bersekolah di Kabupaten Buton, 2019-2021	51
Tabel 4. 3. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2020 - 2021	53
Tabel 4. 4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019-2021	55
Tabel 4. 5. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019 - 2021	57
Tabel 4. 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019-2021	60
Tabel 4. 7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca serta Menulis di Kabupaten Buton, 2019-2021.....	65
Tabel 4. 8. Jumlah Tenaga Pengajar menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021.....	69

Tabel 4. 9. Jumlah Sekolah menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buton, 2021.....	71
Tabel 4. 10. Rasio Murid terhadap Guru di Kabupaten Buton, 2021.....	75
Tabel 4. 11. Rasio Murid terhadap Sekolah di Kabupaten Buton, 2021.....	76
Tabel 5. 1. Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Buton tahun 2021	92
Tabel 5. 2. Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton, Tahun 2021.....	101
Tabel 6. 1. Jumlah Peserta Pelatihan yang Telah Dilaksanakan Disnakertrans Kabupaten Buton, 2021.....	119
Tabel 7. 1. Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin Periode 2019-2024.....	124
Tabel 7. 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, 2021	128
Tabel 7. 3. Jumlah Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, 2021.....	129
Tabel 8. 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Tahun 2021.....	137
Tabel 8. 2. Menerangkan Data Bentuk-bentuk Kekerasan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2021.....	138

PENDAHULUAN



1.1. Latar belakang

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagian besar proses pembangunan berada di tangan pemerintah daerah. Tujuan inti pembangunan adalah mencakup peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Kesemuanya ini bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa seperti yang terkandung dalam nilai inti pembangunan.

Salah satu permasalahan mendasar pembangunan selama ini adalah belum tersentuhnya hasil-hasil pembangunan ke seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kelompok rentan ini meliputi penduduk miskin, penduduk penyandang cacat, penduduk wilayah terpencil, penduduk usia lanjut, petani, nelayan dan sebagainya. Dalam kelompok-kelompok tersebut perempuan adalah kelompok terbesar yang sering terabaikan dalam pembangunan. Atas dasar tersebut kesetaraan gender telah menjadi perhatian dan menjadi isu strategis pembangunan nasional.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report (HDR)* tahun 1995 telah mengangkat tema mengenai gender. Publikasi tersebut menekankan bahwa pembangunan manusia merupakan upaya untuk memperluas pilihan bagi semua masyarakat, bukan hanya salah satu bagian dari masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang terkecualikan. Dalam publikasi tersebut juga tersirat pesan bahwa pengabaian aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah.

Terkait dengan hal tersebut, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender antar kementerian dan lembaga, antar-tingkat pemerintahan hingga antar-kewilayahan mutlak dilakukan. Koordinasi sangat

diperlukan terutama dalam menyusun Program dan kegiatan yang memberikan manfaat kepada kelompok perempuan dan laki-laki.

Aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai efektifitas program dan kegiatan adalah analisa terhadap serangkaian data dan fakta sehingga perumusan sasaran, tujuan program dan kegiatan yang akan dilakukan tepat sasaran. Analisa yang tepat dapat meningkatkan derajat kesetaraan dan keadilan gender yang merata.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas diperlukan data terpilah yang dapat dirinci menurut jenis kelamin. Data ini diharapkan dapat memotret kesejangan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dan juga dapat menggambarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesejangan tersebut. Dengan demikian data terpilah yang tersedia dapat memberikan kerangka analisa bagi perumusan kebijakan, prioritas, sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan.

Salah satu wujud ketersediaan data terpilah adalah tersedianya Profil Gender yang dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan data, merancang data, menyajikan data dan memanfaatkan data.

Tujuan ketersediaan Profil Gender adalah 1) tersedianya data terpilah yang bisa dijadikan sebagai alat advokasi dalam perencanaan penganggaran responsif gender; 2) tersedianya data statistik yang dapat dimanfaatkan di dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, 3) mewujudkan integrasi kepentingan, aspirasi dan kondisi kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan tentang permasalahan gender sudah lama menjadi perhatian negara-negara di dunia. Diawali dengan pencetusan *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) sebagai landasan hukum tentang hak-hak perempuan. Konvensi tersebut dikenal sampai sekarang dengan istilah Konvensi Wanita atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*). Tidak berhenti sampai disitu, penguatan Hak Asasi Perempuan kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi

Perempuan se dunia tersebut menghasilkan beberapa rencana aksi sebagai keprihatinan Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Rencana aksi yang dimaksud meliputi 12 bidang yaitu;

1. Perempuan dan Kemiskinan;
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan;
3. Perempuan dan Kesehatan;
4. Kekerasan Terhadap Perempuan;
5. Perempuan dan Konflik Bersenjata;
6. Perempuan dan Ekonomi;
7. Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan;
8. Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan;
9. Hak Asasi Perempuan;
10. Perempuan dan Media;
11. Perempuan dan Lingkungan Hidup; serta
12. Anak Perempuan.

Berdasarkan pengalaman tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton dalam kegiatannya melalui APBD tahun anggaran 2022 menyusun "**Profil Gender Kabupaten Buton 2021**", sebagai acuan untuk kebijakan dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tahun-tahun mendatang.

1.2. Tujuan Penulisan

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang responsif gender sesuai PERDA No 8 tahun 2008, telah menggarisbawahi bahwa salah satu strategi pembangunan Kabupaten Buton adalah pendekatan '*gender mainstreaming*' atau pengarusutamaan gender (PUG) yaitu gambaran yang memperlihatkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Untuk itu, Profil Gender ini disusun dalam rangka memberikan gambaran secara statistik dan deskriptif mengenai kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam bidang demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan keluarga berencana, dan kesejahteraan dan perlindungan anak serta permasalahan

lain yang dihadapi perempuan dan laki-laki khususnya di Kabupaten Buton yang diukur melalui IPM, IPG dan IDG.

1.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam profil gender ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, hasil survei dan sensus; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Indeks Pembangunan Gender, dan data sektor terkait lainnya.

1.4. Sistematika Penyajian

Buku Profil Gender Kabupaten Buton 2021 ini terdiri dari 9 Bab yaitu: (i) Pendahuluan, (ii) Gambaran Umum, (iii) Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (iv) Pendidikan, (v) Kesehatan dan Keluarga Berencana, (vi) Ekonomi dan Pemberdayaan, (vii) Perempuan dan Politik, (viii) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, (ix) Kesimpulan, Daftar Pustaka.

Penyajian data dalam tabel-tabel pada publikasi ini menggunakan tanda-tanda sebagai berikut:

- a. Tidak ada atau nol : -
- b. Data tidak dapat ditampilkan : NA

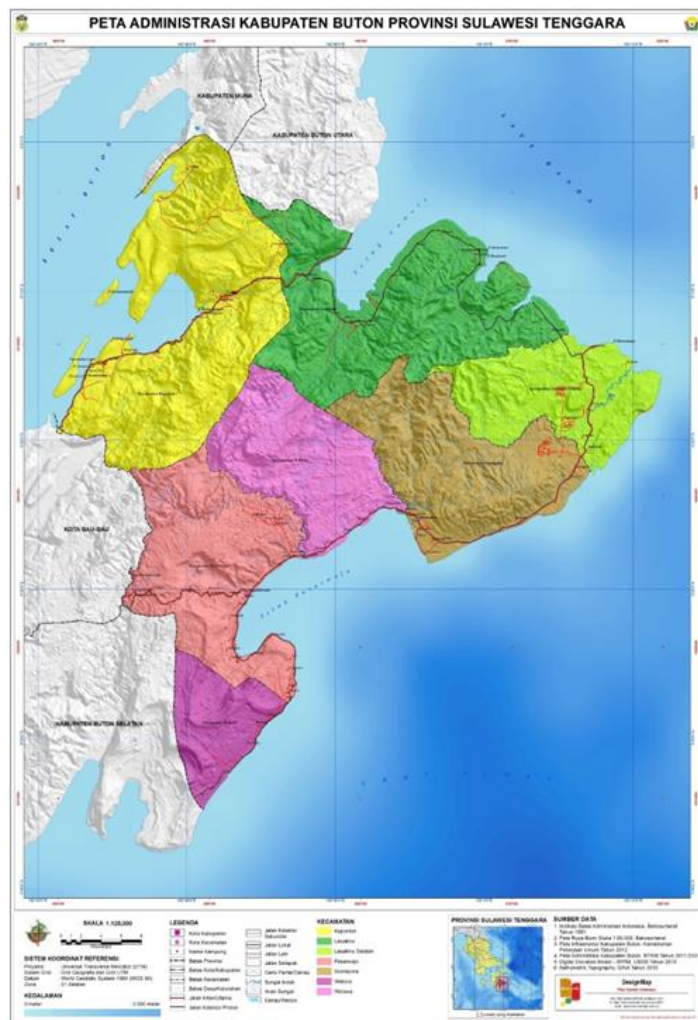
GAMBARAN UMUM



2.1. Kondisi Umum Wilayah

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara $4,96^{\circ}$ – $6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara $120,00^{\circ}$ – $123,34^{\circ}$ Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Muna dan Buton.

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kabupaten Buton



Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana. Dengan wilayah daratan seluas $\pm 1.648,04 \text{ km}^2$, Kabupaten Buton memiliki Pasarwajo sebagai ibukota kabupaten.

Pada tahun 2014 Kabupaten Buton mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Setelah mengalami pemekaran, wilayah administrasi Kabupaten Buton yang sebelumnya terdiri dari 21 kecamatan kini menjadi 7 kecamatan, yakni Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula, dan Kecamatan Kapontori. Kecamatan Kapontori merupakan wilayah terluas di Kabupaten Buton, sedangkan Kecamatan Wabula memiliki luasan terkecil.

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Buton menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan		Luas	
		Km ²	Persen
(1)		(2)	(3)
050	Lasalimu	319,65	19,40
051	Lasalimu Selatan	147,01	8,92
052	Siotapina	248,81	15,10
060	Pasarwajo	300,97	18,26
061	Wolowa	94,55	5,74
062	Wabula	65,27	3,96
110	Kapontori	471,77	28,63
Buton		1.648,04	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 40°.

Kabupaten Buton pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana hanya mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia, serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan angin Timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei arah angin di daerah Kabupaten Buton tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim Pancaroba.

2.2. Situasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender

Gambaran kualitas SDM suatu daerah dapat di lihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu 1) umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki korelasi dengan banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuannya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Ketiga dimensi tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

- Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
- Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

Setiap tahunnya angka IPM di Kabupaten Buton selalu mengalami peningkatan. Tahun 2021 angka IPM Kabupaten Buton mencapai 66.32. Naik dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 65.98. Angka ini menempatkan Kabupaten Buton pada peringkat 12 dari 17 kabupaten/ kota se-Sulawesi Tenggara, setelah tahun sebelumnya di peringkat 13. Namun hal ini perlu menjadi perhatian karena IPM Kabupaten Buton masih berada pada kelompok ‘sedang’. Dan masih jauh di bawah angka IPM Sulawesi Tenggara yang sudah mencapai kelompok ‘tinggi’ di tahun 2021, yakni mencapai 71.66.

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Gambar 2. 2 Petumbuhan IPM Kabupaten Buton 2017-2021



Sumber : BPS (diolah)

Bila dilihat dari besaran pertumbuhannya, angka IPM tumbuh melambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari tahun 2017 hingga 2020, pertumbuhan IPM semakin menurun, yakni mencapai 1.22 persen pada tahun 2017, 0.95 persen pada tahun 2018, 0.91 persen pada tahun 2019 dan 0.47 persen pada tahun 2020 kemudian di tahun 2021 meningkat mencapai 0,52 persen.. Hal ini juga perlu

menjadi perhatian, sebab peningkatan angka IPM juga seharusnya diiringi dengan percepatan pertumbuhannya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) pengetahuan (*knowledge*); dan
- 3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Perubahan indikator yang digunakan yaitu pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Perubahan indikator yang digunakan yaitu pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan angka rata-rata lama sekolah (*Mean Years School*). Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Hal ini disebabkan karena angka PNB per kapita tidak tersedia hingga kabupaten/kota.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur *output* dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Secara teknis, angka IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Mengacu pada rumus baru perhitungan IPG, setiap tahunnya angka IPG Kabupaten Buton cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka IPG Buton mencapai 80.69. Ini berarti ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan cenderung berkurang. Namun IPG yang tergolong tinggi tidak serta merta dapat diartikan bahwa pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di daerah tersebut sudah tinggi. IPG diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang “sama-sama tinggi” dan “sama-sama rendah”. Untuk kasus di Kabupaten Buton, berarti nilai IPG yang tinggi didapat dari IPM laki-laki dan IPM perempuan yang masih sama-sama rendah.

Indikator pembangunan berbasis gender selanjutnya adalah Indeks pemberdayaan gender (IDG). IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Data IDG terakhir tahun 2021 menunjukkan pemberdayaan gender di Kabupaten Buton berada di angka 68.21. Angka ini lebih rendah dari pada angka IPG di tahun yang sama. Hal ini berarti masih ada *gap* yang cukup signifikan antara capaian IPG dan IDG.

Tabel 2. 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Buton, 2017 – 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPM	64.47	65.08	65.67	65.98	66.32
IPG	78.39	79.01	79.82	80.18	80.69
IDG	73.46	74.56	64.49	71.41	68.21

Sumber : BPS

Tabel 2.2. menunjukkan perkembangan data IDG, IPG dan IPM Kabupaten Buton. Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan manusia Kabupaten Buton mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun hal ini belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender. Angka IDG yang lebih rendah daripada IPG mengindikasikan bahwa pembangunan gendernya sudah cukup tinggi, namun jika dilihat dari posisi perempuan sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten Buton masih belum signifikan.

Salah satu indikator IDG adalah kedudukan perempuan sebagai pengambil kebijakan baik di eksekutif, legislatif maupun level yudikatif. Angka IDG Kabupaten Buton cukup signifikan jika melihat data perempuan yang duduk di parlemen yaitu hanya mencapai 16.00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton telah berupaya untuk mengakomodir perempuan sebagai pengambil kebijakan, namun kemungkinan masih membutuhkan proses untuk mencapai aksi afirmasi yang diharapkan sampai 30 persen.

Data tersebut dapat pula dibuktikan dengan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Buton yang menunjukkan posisi perempuan dan laki-laki sebagai pengambil kebijakan dapat dilihat dari jabatan struktural Kabupaten Buton. Pada tahun 2021, tidak terdapat perempuan yang menjabat sebagai eselon II. Untuk

eselon III mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 18.71 persen dan yang menduduki eselon IV mengalami peningkatan menjadi 44.10 persen.

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Buton masih perlu menjadi perhatian pemerintah guna meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuan, serta untuk meningkatkan peran serta perempuan sebagai pengambil kebijakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Buton.

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN



Penduduk adalah kekayaan bangsa sekaligus modal dasar pembangunan. Sebagai komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa, penduduk merupakan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan sekaligus sebagai objek atau sasaran pembangunan. Hal ini dapat terwujud jika jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian, dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan itu sendiri.

Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam penanganan masalah kependudukan pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Aspek kependudukan yang perlu mendapat perhatian mencakup jumlah dan distribusi penduduk. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial harus mendapat prioritas utama karena bermuara kepada peningkatan kesejahteraan penduduk. Distribusi atau penyebaran penduduk antar wilayah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemerataan hasil pembangunan. Tingkat pemerataan hasil pembangunan akan mempengaruhi penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk. Penduduk biasanya akan melakukan migrasi ke wilayah dimana terdapat fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibanding wilayah yang ditempatinya sebelumnya.

Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta norma- norma yang hidup dalam masyarakat sebagai dampak maupun akses dari setiap pembangunan menyebabkan terjadinya perubahan dalam aspek demografi. Pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah,

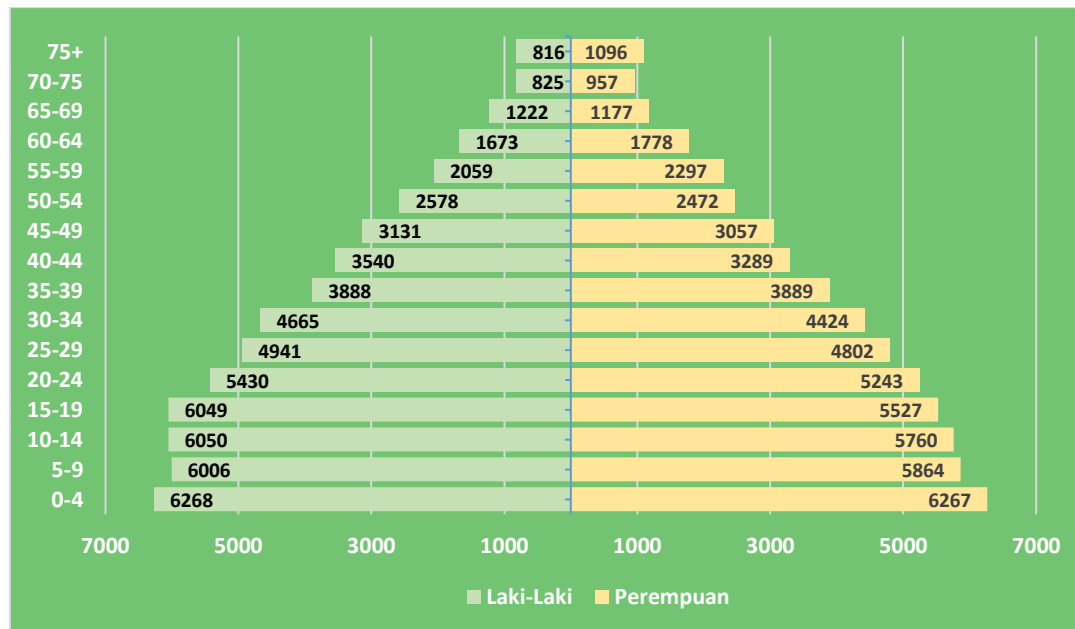
komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2021, penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2021 berjumlah 117,040 jiwa terdiri dari 59,141 jiwa laki-laki dan 57,899 jiwa perempuan. Dengan jumlah tersebut, menempatkan Buton di posisi kesepuluh penduduk terbanyak se-Sulawesi Tenggara.

Upaya pemerintah bersama masyarakat melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) menyebabkan percepatan pertumbuhan penduduk pada kelompok anak-anak dapat ditekan. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya pelayanan kesehatan menyebabkan makin tingginya peluang penduduk berumur lebih panjang. Sedangkan model modernisasi banyak memberikan pengaruh pada mobilitas penduduk baik yang sifatnya permanen maupun sementara.

3.1.1. Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk suatu daerah dapat dilihat dari komposisi penduduk yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk.

Gambar 3. 1. Piramida Penduduk Kabupaten Buton, 2021



Sumber : Sensus Penduduk 2021

Berdasarkan Piramida penduduk Buton tahun 2021, struktur penduduk Buton didominasi oleh penduduk muda yaitu antara umur 0-4 tahun dan antara 5-9 tahun. Semakin bertambah usia penduduk, jumlah penduduk cenderung

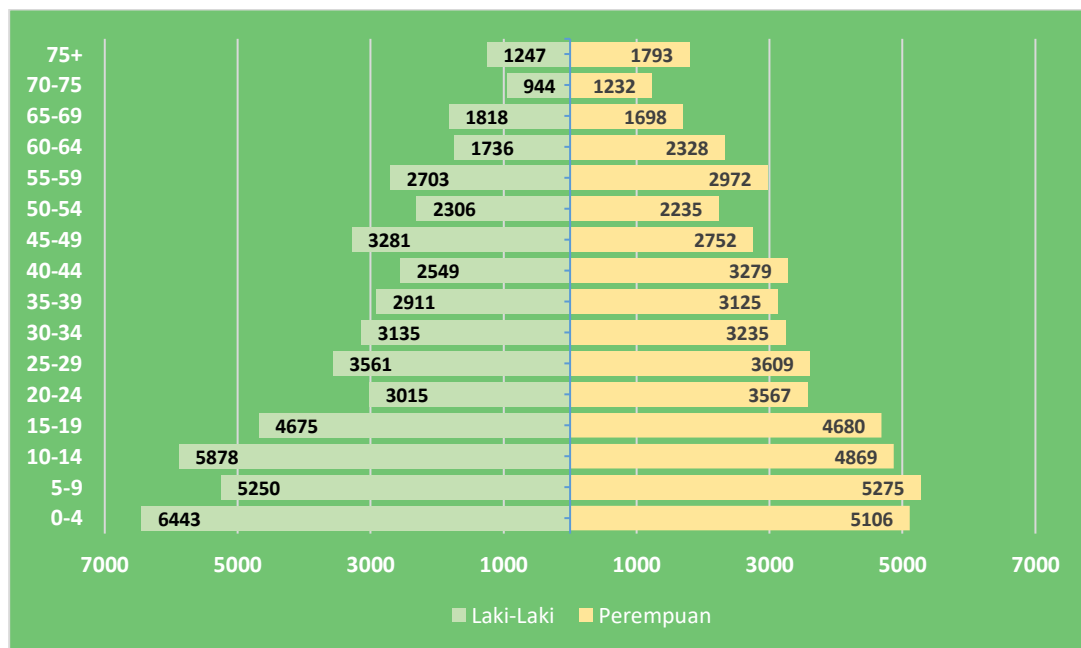
semakin berkurang. Hal ini diindikasikan dari bentuk piramida penduduk yang memiliki bentuk yang relatif besar pada bagian dasarnya seperti pada Gambar 3.1.

Bentuk piramida di atas merupakan piramida tipe ekspansif (progresif). Piramida dengan bentuk ini merupakan ciri bahwa Sulawesi Tenggara masih memiliki angka kelahiran tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Ciri-ciri komposisi penduduk ekspansif antara lain sebagai berikut.

- Jumlah penduduk usia muda (0–19 tahun) sangat besar, sedangkan usia tua sedikit.
- Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.
- Pertumbuhan penduduk relatif tinggi.
- Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang.

Seperti diketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut.

Gambar 3. 2. Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2025



Sumber : Proyeksi Penduduk SUPAS 2015-2025

Menurut data hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015-2025, pada tahun 2025 penduduk usia muda Kabupaten Buton akan memasuki usia produktif, khususnya pada kelompok umur 10-14 tahun. Proyeksi Penduduk 2015 ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya membawa beberapa keuntungan, di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu daerah atau bahkan negara. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah :

- **Sosial ekonomi**

Jumlah penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang cukup hanya akan menimbulkan masalah kriminalitas. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan bisa saja beralih menjadi kriminal. Sebagai contoh, di kota-kota besar, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Mereka pun mencari nafkah dengan menjadi seorang kriminal seperti pencopet, perampok, dsb. Bukan hanya itu, dari segi sosial ekonomi, jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan pendistribusian fasilitas yang merata akan mendorong terjadinya urbanisasi yang pada akhirnya akan memunculkan kelas sosial baru di masyarakat. Adanya perumahan kumuh adalah contoh konkrit dari masalah ini.

- **Pendidikan dan Kesehatan**

Pemerintah menginginkan penduduknya memenuhi standar kehidupan internasional. Keinginan mereka itu diterjemahkan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan masyarakatnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, jika jumlah penduduk melebihi batas normal, maka kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan. Sebagian besar penduduk tidak akan mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Rendahnya kualitas pendidikan adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendah akan sumber daya manusianya.

- **Lingkungan Hidup**

Jumlah penduduk harus berbanding lurus dengan luas pemukiman. Masalah terjadi ketika lahan untuk pemukiman tidak cukup lagi untuk menampung banyaknya penduduk. Untuk mengatasi masalah ini, penduduk pun mengubah lahan pertanian atau hutan menjadi areal pemukiman baru. Masalah tidak sampai di situ saja. Membuka lahan pertanian atau hutan menjadi lahan pertanian justru menimbulkan masalah lingkungan. Lahan pertanian atau hutan yang di sulap menjadi areal pemukiman mengakibatkan hilangnya daerah resapan air. Sebab, lahan yang semula jadi resapan air kini di poles dengan semen dan beton. Sehingga air tidak dapat meresap. Banjir pun tidak terhindarkan. Selain itu, ketika membuka hutan menjadi areal pemukiman, penduduk biasanya membakar hutan tersebut. Sebagai akibatnya timbullah polusi udara yang disebabkan oleh hutan yang terbakar. Hal ini tidak hanya menjadi masalah domestik bagi satu Negara, tetapi juga menjadi masalah bagi Negara lain. Sebab, akibat dari tindakan ini juga dirasakan oleh Negara lain.

Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Lainnya:

- Lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang
- Semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari rumah tangga, pabrik, perusahaan, industri, peternakan, dll
- Angka pengangguran meningkat
- Angka kesehatan masyarakat menurun
- Angka kemiskinan meningkat
- Pembangunan daerah semakin dituntut banyak
- Ketersediaan pangan suliPemerintah harus membuat kebijakan yang rumit
- Angka kecukupan gizi memburuk
- Muncul wabah penyakit baru

Perubahan dalam aspek demografi di Kabupaten Buton juga terlihat dari perkembangan struktur penduduknya. Pada tahun 2010, sekitar 40.17 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buton atau sebanyak 36,882 jiwa adalah penduduk di bawah usia 15 tahun. Tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 36,215 jiwa atau sekitar 30.94 persen dari total penduduk. Sementara penduduk usia 15 tahun ke

atas pada tahun 2010 berjumlah 54,942 jiwa atau 59.83 persen dari total penduduk. Tahun 2021 meningkat menjadi 80,825 jiwa atau 69.06 persen dari total penduduk. Antara tahun 2010-2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Buton adalah sebesar 2.29 persen.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk pada kelompok umur muda, jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, akan mendorong tingkat pengangguran yang meningkat pula dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, transisi struktur umur penduduk yang demikian juga akan berdampak serius pada peningkatan permintaan pelayanan dasar, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Tingginya kelompok usia muda juga akan berdampak pada meningkatnya rasio ketergantungan usia nonproduktif terhadap usia produktif.

3.1.2. Komposisi Penduduk

Kesetaraan gender dapat tercapai jika pembangunan sosial ekonomi direncanakan dengan melihat komposisi penduduknya. Proporsi yang benar antara laki-laki dan perempuan dan usia produktif antara laki-laki dan perempuan serta usia anak-anak harus menjadi perhatian. Strategi seperti ini dapat menjamin terjadi pemerataan pembangunan dimana para pelaku melibatkan laki-laki dan perempuan dan dapat bersama-sama menikmati hasil pembangunan yang ada.

Tabel di bawah menggambarkan komposisi penduduk Buton menurut kelompok umur yaitu 0-14 tahun dikategorikan usia anak-anak, 15-64 tahun yang dikategorikan usia produktif dan 65+ adalah kelompok manusia lanjut usia (manula).

Tabel 3. 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Buton menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin, 2019-2021

Kelompok Umur	2019		2020		2021		Rasio Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0-14	18.487	16.024	18.265	17.783	18.324	17.891	115,37	102,71	102,42
15-64	29.283	30.981	37.289	36.092	37.954	36.778	94,52	103,32	103,20
65+	3.205	3.831	2.718	3.060	2.863	3.230	83,66	88,82	88,64
Total	50.975	50.836	58.272	56.935	59.141	57.899	100,27	102,35	102,15

Sumber : Proyeksi Penduduk SUPAS 2015-2025 dan Sensus Penduduk 2021

Berdasarkan komposisi di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton lebih banyak berada pada jenjang usia produktif yaitu antara 15-64 tahun kemudian disusul pada jenjang usia antara 0-14 tahun. Pada jenjang usia 65 ke atas, jumlah penduduknya semakin meningkat. Menurut komposisinya penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan terutama pada rentang usia antara 0-14 dan 15-64 tahun. Namun demikian perbedaannya relatif kecil sehingga dapat dikatakan jumlah penduduk laki-laki hampir berimbang dengan penduduk perempuan.

Pada tahun 2021 pada kelompok usia 0-14 dan 15-64 tahun, rasio seks berada di atas angka 100. Pada usia 0-14 tahun, rasio seks sebesar 102.42. Rasio seks penduduk usia 15-64 tahun adalah 103.20 yang artinya dalam 100 orang perempuan terdapat 102 sampai dengan 103 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif lebih banyak pada kedua kelompok umur tersebut. Berbeda dengan dua kelompok usia produktif dan anak-anak, rasio seks kelompok usia lanjut (65 tahun keatas) berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak penduduk laki-laki meninggal pada rentang umur tersebut atau sedang merantau keluar daerah.

Data rasio seks ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lain sebagainya.

3.1.3. Administrasi Penduduk Menurut Kecamatan

Dilihat dari pencatatan administrasi kependudukannya, pada tahun 2021 jumlah penduduk yang telah melakukan pencatatan administrasi di Kabupaten Buton adalah sebesar 119,291 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki relatif lebih banyak dari pada penduduk perempuan di Kabupaten Buton yaitu sebesar 60,366 jiwa (laki-laki) dan 58,925 jiwa (perempuan). Dari tujuh kecamatan di Kabupaten Buton,

Kecamatan Wabula dan Kapontori adalah kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun, tidak berbeda secara signifikan.

Pada ibukota Kabupaten Buton yaitu Kecamatan Pasarwajo, merupakan kecamatan terbanyak penduduknya, sedangkan Kecamatan Wolowa merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya.

Tabel 3. 2. Administrasi Penduduk Kabupaten Buton menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
50	Lasalimu	6.615	6.358	12.973
51	Lasalimu Selatan	8.195	7.714	15.909
52	Siotapina	8.346	8.134	16.480
60	Pasarwajo	22.870	22.674	45.544
61	Wolowa	3.384	3.193	6.577
62	Wabula	3.255	3.284	6.539
110	Kapontori	7.669	7.736	15.405
Buton		60.334	59.093	119.427

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton

Dilihat per kecamatan, sebesar 38,14 persen penduduk di Kabupaten Buton tercatat di Kecamatan Pasarwajo yakni mencapai 45,544 jiwa yang terdiri dari 22,870 jiwa penduduk laki-laki dan 22,674 jiwa perempuan. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Pasarwajo merupakan ibukota Kabupaten Buton sehingga pusat kegiatan perekonomian dan pendidikan berada di kecamatan ini. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Wabula yaitu hanya 6,539 jiwa yang terdiri dari 3,255 jiwa penduduk laki-laki dan 3,284 jiwa perempuan.

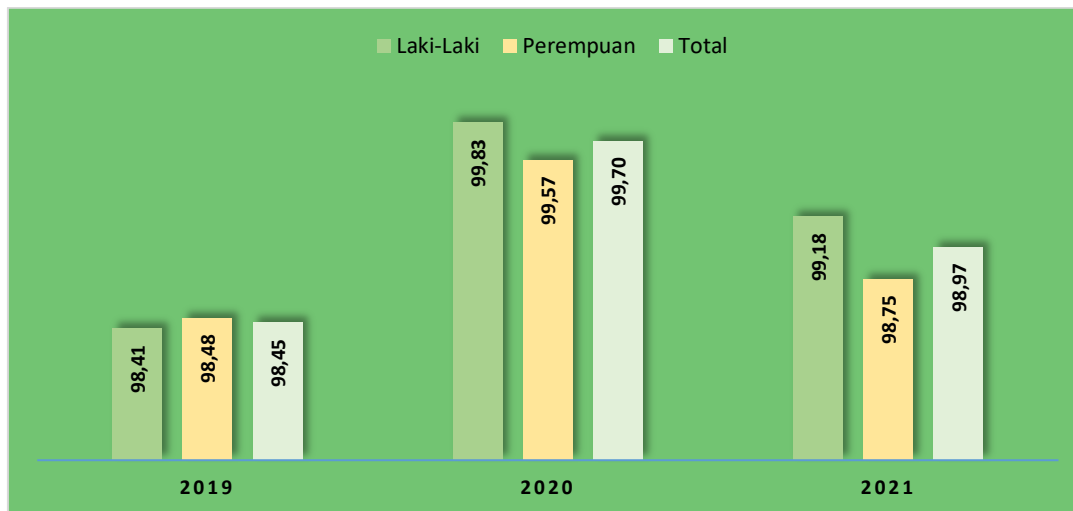
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah salah satu dari 23 dokumen kependudukan yang merupakan *output* dari pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota sebagai Instansi Pelaksana pelayanan Adminduk yang merupakan tanda secara administrasi seorang penduduk tercatat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el adalah Kartu

Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Salah satu elemen data yang terdapat dalam KTP-el dan menjadi bagian dari data kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir bahkan dibawa setelah meninggal dunia. NIK penduduk yang meninggal dunia tidak bisa dialihkan atau dipakai lagi oleh orang lain. Oleh karenanya, NIK menjadi Nomor Identitas Tunggal (*Single Identity Number/SIN*) sebagai kunci akses setiap penduduk (anak, dewasa, orang tua) untuk mendapatkan berbagai layanan publik. Dengan demikian, keberadaan NIK menjadi penting dalam penyelenggaraan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia.

Berdasarkan kepemilikan NIK, 98.97 persen penduduk kabupaten Buton pada tahun 2021 telah mempunyai NIK. Artinya, hampir seluruh penduduk Kabupaten Buton memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan pencatatan identitas dirinya. Dengan demikian, penduduk Kabupaten Buton telah lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan publik. Persentase ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020, yaitu 99.70 persen. Pada tahun 2021, persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang memiliki NIK dibandingkan dengan penduduk perempuan. Namun persentase ini tidak berbeda cukup signifikan yaitu 99.18 persen untuk penduduk laki-laki dan 98.75 persen untuk penduduk perempuan di Kabupaten Buton. Persentase penduduk 5 tahun keatas yang mempunyai NIK menurut jenis kelamin di Kabupaten Buton selama 2019-2021 dapat dilihat pada Gambar 3.3 sebagai berikut.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk yang Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019-2021



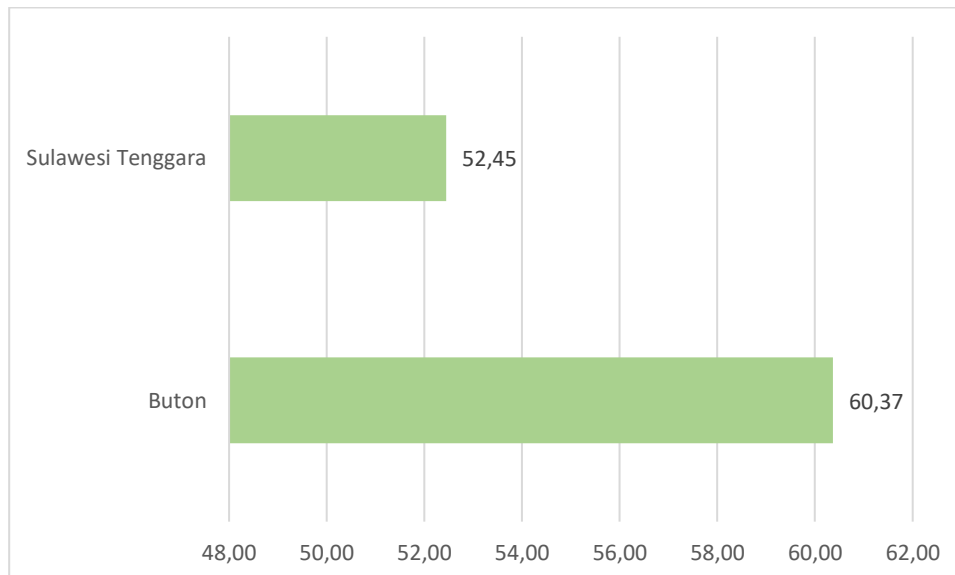
Sumber: Susenas, BPS

3.1.4. Angka Beban Ketergantungan

Angka beban ketergantungan atau biasa juga disebut rasio ketergantungan (*depedency ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila besarnya 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Angka beban ketergantungan ini dapat diperoleh dari rasio antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun atau lebih dibagi jumlah penduduk antara umur 15-64 tahun dikali 100. Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut disajikan angka beban ketergantungan penduduk Buton tahun 2021 pada Gambar 3.4 berikut.

Gambar 3. 4. Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Buton, 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021

Pada tahun 2021 angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Buton sebesar 60.37 persen. Artinya, pada tahun 2021 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 60 penduduk usia nonproduktif. Angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten tahun 2021 masih tergolong pada angka ketergantungan tinggi. Hal ini mengakibatkan angkatan kerja produktif di Kabupaten Buton harus memelihara lebih banyak tanggungan, yaitu penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak. Tingginya beban ketergantungan bisa berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Bahkan dapat menjadi pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin.

3.1.5. Status Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sebagai ‘kontrak’ antara dua orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara. Perkawinan juga merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran, terutama penduduk perempuan, karena semakin banyak perempuan yang menikah maka kemungkinan untuk melahirkan semakin tinggi.

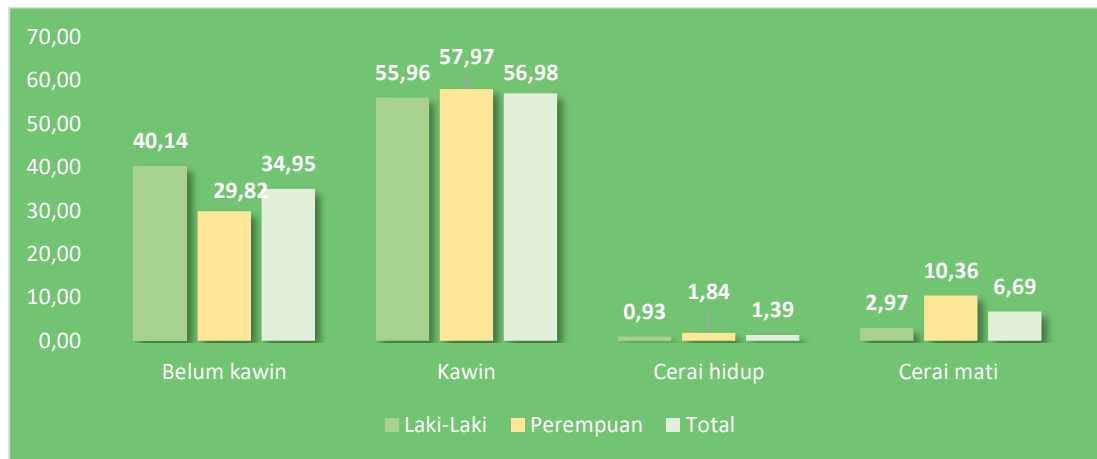
Status perkawinan kawin adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan), baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara

dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri. Status cerai hidup adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Status cerai mati apabila seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Sesuai yang ditampilkan pada Gambar 3.5, pada tahun 2021, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Buton menurut status perkawinannya terbanyak adalah berstatus kawin yaitu sebesar 56.98 persen. Selanjutnya adalah penduduk 10 tahun ke atas yang belum kawin sebesar 34.95 persen. Sementara status perkawinan cerai sebesar 8.08 persen.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, penduduk 10 tahun ke atas yang berstatus kawin lebih didominasi oleh penduduk perempuan yaitu sebesar 57.97 persen sedangkan penduduk laki-laki sebesar 55.96 persen. Hal tersebut sejalan dengan penduduk 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin, lebih besar persentasenya pada penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa usia perkawinan penduduk laki-laki cenderung lebih tua dibandingkan usia perkawinan penduduk perempuan.

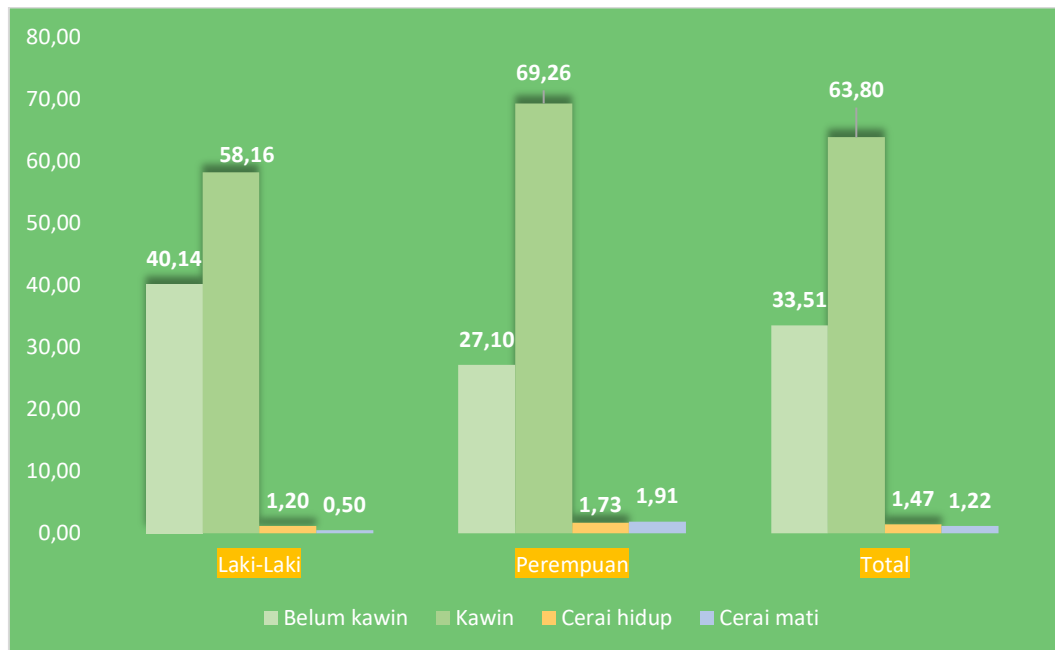
Gambar 3. 5. Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di Kabupaten Buton, 2021



Sumber: Susenas, BPS

Pada kelompok umur yang lebih dewasa, yaitu 15-49 tahun, penduduk Kabupaten Buton tahun 2021 menurut status perkawinan kawin memiliki persentase paling tinggi diantara status perkawinan yang lainnya yaitu sebesar 63.80 persen. Kemudian status perkawinan belum kawin sebesar 33.51 persen, dan cerai sebesar 2.69 persen. Hal ini ditampilkan pada Gambar 3.6. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, penduduk laki-laki lebih memilih menikah pada usia yang lebih tua dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini terlihat melalui persentase penduduk laki-laki berumur 15-49 tahun dengan status kawin yaitu sebesar 58.16 persen, sedangkan pada umur 10 tahun ke atas cenderung lebih rendah.

Gambar 3. 6 Persentase Penduduk yang Berumur 15 – 49 Tahun menurut Status Perkawinan di Kabupaten Buton, 2021



Sumber: Susenas, BPS

3.2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, upaya pembangunan banyak diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Konsep bekerja menurut Sakernas yang dilaksanakan oleh BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus selama seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk juga kegiatan pekerja tak dibayar yang terlibat dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Peranan perempuan dalam kegiatan ekonomi baik tingkat nasional maupun regional menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari perubahan sosial-ekonomi serta perubahan-perubahan normatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Beberapa indikator di bidang ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, persentase angkatan kerja yang bekerja

menurut lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja menunjukkan eksistensi perempuan sebagai kelompok pekerja yang tidak boleh diabaikan.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi masih diwarnai adanya diskriminasi dalam berbagai hal. Contoh yang sering muncul dipermukaan adalah perbedaan upah perempuan dan laki-laki walaupun keduanya mempunyai posisi yang sama, jenis pekerjaan yang sama, latar belakang pendidikan yang sama, dan bekerja dengan jumlah jam yang sama. Untuk itu, perlunya advokasi tentang kebijakan ketenagakerjaan yang responsif gender.

3.2.1. Perkembangan Angkatan Kerja

Program pembangunan terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buton perlu didukung oleh tersedianya data dan informasi yang lengkap tentang keadaan ketenagakerjaan. Perlu diketahui bahwa data ketenagakerjaan dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan oleh BPS setiap tahunnya. Namun dikarenakan tahun 2014 Kabupaten Buton mengalami pemekaran, data tahun 2015 masih merupakan data gabungan dari ketiga kabupaten sebelum pemekaran, yakni Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Sementara itu data ketenagakerjaan level kabupaten/kota tahun 2016 tidak tersedia dikarenakan kurangnya sampel untuk estimasi sampai level kabupaten/kota. Baru mulai tahun 2017 data yang disajikan sudah terpilah masing-masing untuk Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

Penduduk usia kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini kemudian terbagi menjadi angkatan kerja, yakni penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja, yakni penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Angkatan kerja merupakan indikator yang bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Tabel 3. 3. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun keatas menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton, 2021

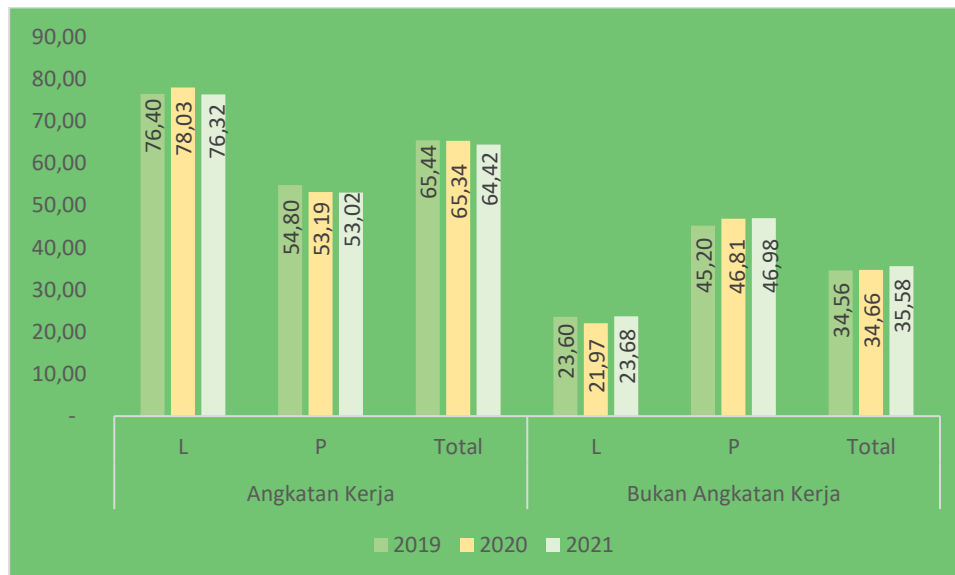
Kegiatan Utama	Laki-Laki		Perempuan		Lakilaki+ Perempuan	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	26.357	76,32	19.110	53,02	45.467	64,42
- Bekerja	25.394	73,54	17.919	49,71	43.313	61,37
- Pengangguran	963	2,79	1.191	3,30	2.154	3,05
Bukan Angkatan Kerja	8.176	23,68	16.934	46,98	25.110	35,58
- Sekolah	2.362	6,84	2.398	6,65	4.760	6,74
-Mengurus Rumah Tangga	3.833	11,10	13.167	36,53	17.000	24,09
- Lainnya	1.981	5,74	1.369	3,80	3.350	4,75
Jumlah	34.533	100,00	36.044	100,00	70.577	100,00
T P A K	76,32		53,02		64,42	
T P T	3,65		6,23		4,74	

Sumber : Sakernas, BPS

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Buton adalah 70,577 orang yang terdiri dari 45,467 angkatan kerja atau sekitar 64.42 persen dan sisanya sebanyak 25,110 orang bukan angkatan kerja atau sekitar 35.58 persen.

Pada Gambar 3.7. diketahui bahwa persentase angkatan kerja di Kabupaten Buton cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2019-2021. Menurut jenis kelamin, angkatan kerja di Kabupaten Buton masih sangat didominasi oleh laki-laki yakni 76.40 persen di tahun 2019, 78.03 persen di tahun 2020 dan 76.32 persen di tahun 2021. Jika dilihat menurut trennya persentase angkatan kerja laki-laki cenderung mengalami fluktuasi sedangkan angkatan kerja perempuan cenderung menurun setiap tahunnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bukan angkatan kerja merupakan perempuan. Hal ini tentu disebabkan sebagian besar wanita usia 15 tahun ke atas berperan besar dalam mengurus rumah tangga.

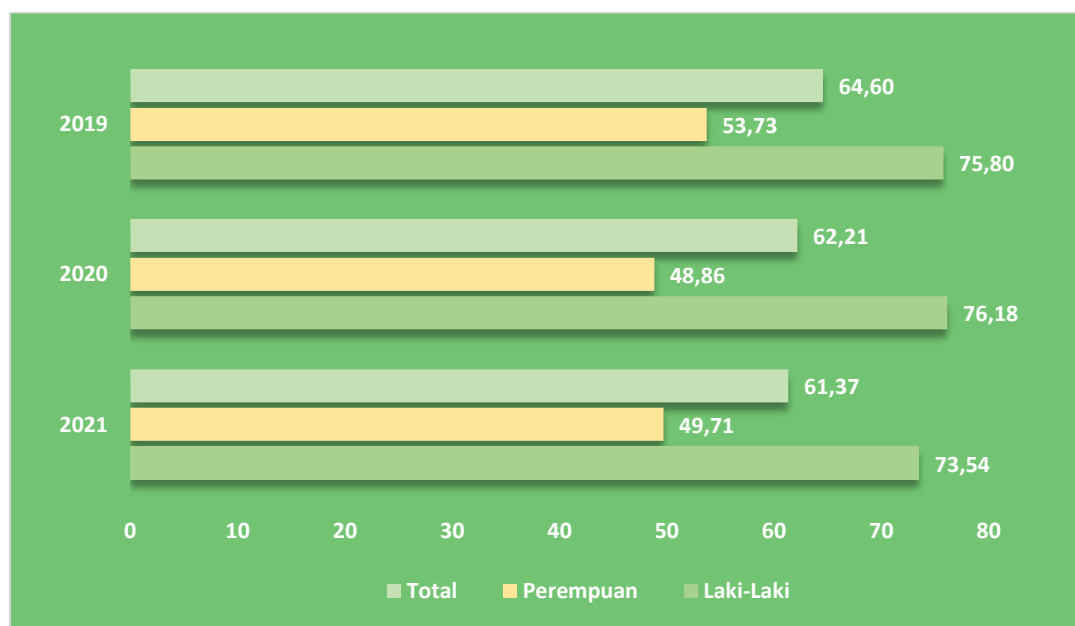
Gambar 3. 7. Perkembangan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Buton, 2019 – 2021



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019–2021, BPS

Sejalan dengan perkembangan angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja pun terus mengalami penurunan selama tahun 2019-2021. Tahun 2019 sebesar 64.60 persen, turun menjadi 62.21 persen di tahun 2020, dan Kembali turun di tahun 2021 menjadi 61.37 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Di tinjau dari jenis kelaminnya, pada tahun 2019 penduduk usia 15 tahun ke atas yang berjenis kelamin laki-laki dan melakukan aktivitas bekerja sebesar 75.80 persen dan perempuan 53.73 persen, tahun 2020 laki-laki bekerja sebesar 76.18 persen dan perempuan 48.86 persen dan selanjutnya pada tahun 2021 laki-laki bekerja sebesar 73.54 persen dan perempuan 49.71 persen. Deskripsi mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 8. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019 – 2021

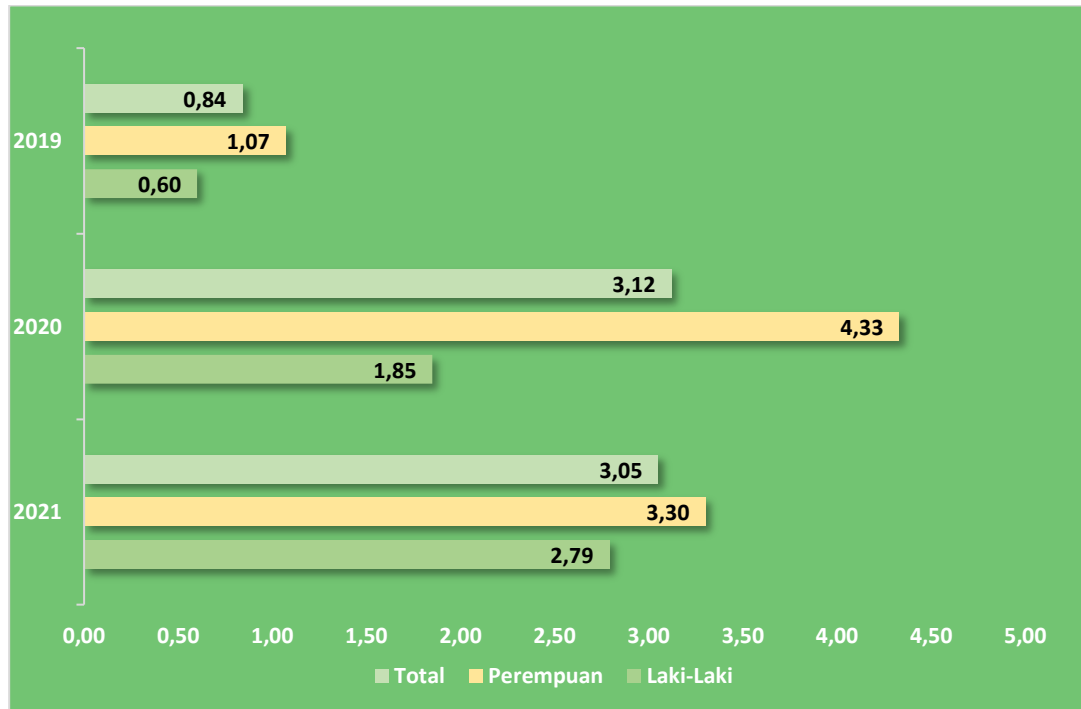


Sumber : BPS (Diolah dari Hasil Sakernas)

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini sejalan dengan jumlah pengangguran yang lebih didominasi oleh perempuan pada tahun 2019-2021. Melihat trennya, pengangguran perempuan cenderung mengalami peningkatan selama periode 2019-2021, sedangkan pengangguran laki-laki cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2021 jumlah pengangguran laki-laki sebanyak sebesar 2.79 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 3.30 persen perempuan merupakan pengangguran dari total penduduk usia kerja yang berjenis kelamin perempuan. Tahun 2020 laki-laki yang menganggur sebesar 1.85 persen sedangkan perempuan sebesar 4.33 persen. Sementara tahun 2019 laki-laki yang menganggur sebesar 0.60 persen sedangkan perempuan sebesar 1.07 persen.

Gambaran ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 9. Persentase Penduduk yang Menganggur Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019-2021



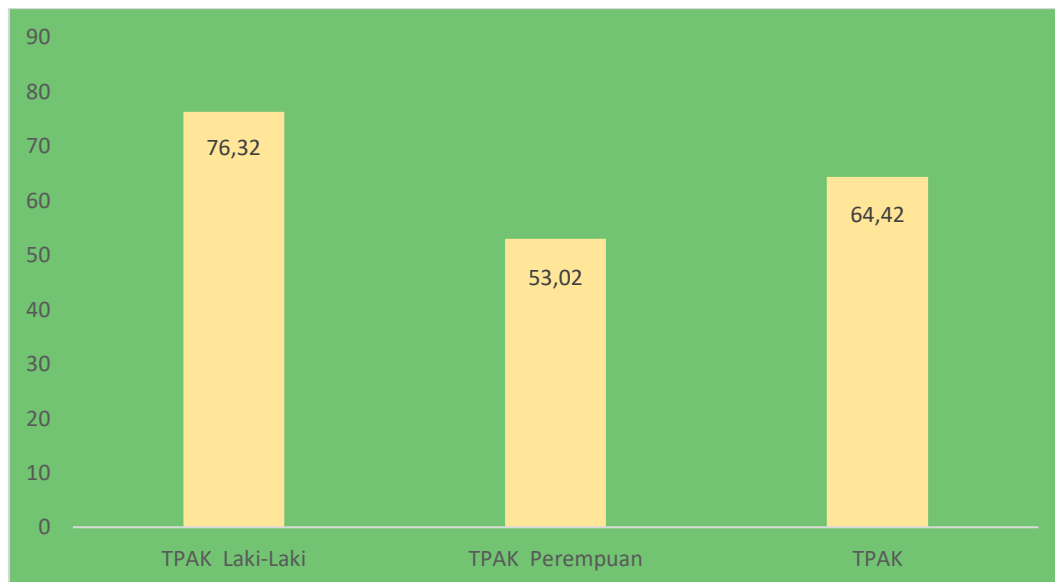
Sumber : BPS (Diolah dari Hasil Sakernas)

3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui proporsi penduduk yang aktif bekerja dan atau mencari pekerjaan di suatu daerah. TPAK merupakan proporsi atau rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

Besarnya TPAK secara langsung dipengaruhi oleh besarnya penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja, serta keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tahun 2021, TPAK Kabupaten Buton secara keseluruhan sebesar 64.42 persen. Ini artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 64 orang tersedia untuk bekerja pada periode tertentu.

Gambar 3. 10. TPAK Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021



Sumber : BPS (Diolah dari Hasil Sakernas)

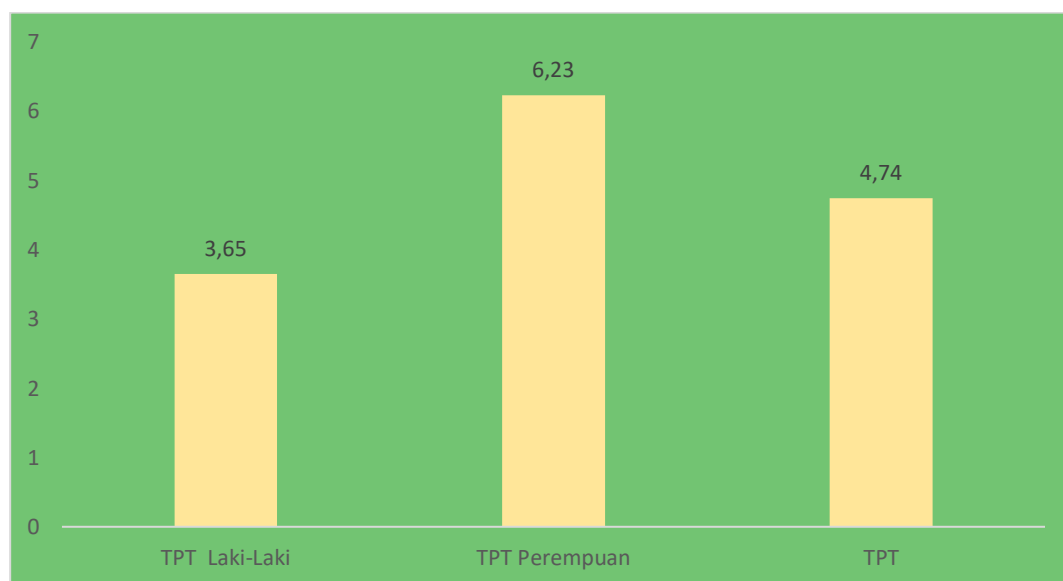
Gambar 3.10. memperlihatkan bahwa antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Buton cenderung lebih memprioritaskan laki-laki untuk memasuki dunia angkatan kerja dari pada perempuan. Hal ini dapat menunjukkan di Kabupaten Buton masih berlaku budaya patriarki yang mempercayai bahwa laki-laki merupakan tulang punggung rumah tangga, dan disamping itu juga dilihat dari segi fisik laki-laki dianggap lebih cocok untuk bekerja diluar rumah dan terutama pada jenis pekerjaan tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

TPT Kabupaten Buton tahun 2021 adalah sebesar 4.74 persen. Artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa

sebanyak 4 sampai 5 diantaranya merupakan pengangguran. Meskipun angka TPT Kabupaten Buton cenderung moderat, tetapi kondisi tersebut tetap diperlukan perhatian dalam menyikapi kondisi pengangguran tersebut. Khususnya semenjak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Buton meningkat dengan sebab terhentinya berbagai aktivitas ekonomi pada tahun 2021. Bila dilihat lebih rinci per jenis kelamin, dari Gambar 3.11. terlihat bahwa TPT laki-laki cenderung lebih rendah dari pada TPT perempuan. Hal dikarenakan umumnya meskipun perempuan sudah menikah dan baru mempunyai anak masih memiliki keinginan untuk mencari pekerjaan.

Gambar 3. 11. TPT Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021

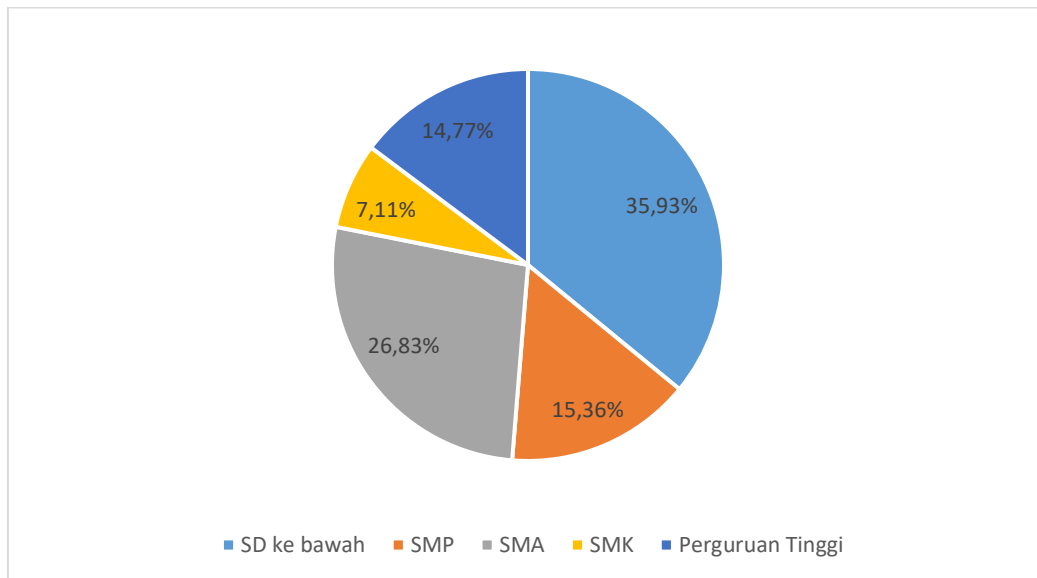


Sumber : BPS (Diolah dari Hasil Sakernas)

3.2.3. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Tingkat pendidikan angkatan kerja merupakan salah satu informasi yang sangat penting sebagai dasar acuan untuk mengetahui kualitas dan perkembangan sumber daya manusia terutama angkatan kerja itu sendiri. Latar belakang pendidikan angkatan kerja yang relatif rendah adalah merupakan masalah utama yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang nantinya dapat berakibat rendahnya kualitas tenaga kerja. Pada akhirnya, kualitas perekonomian dan sosial budaya menjadi rendah pula. Karakteristik ketenagakerjaan ditinjau dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Gambar 3. 12. Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Buton, 2021



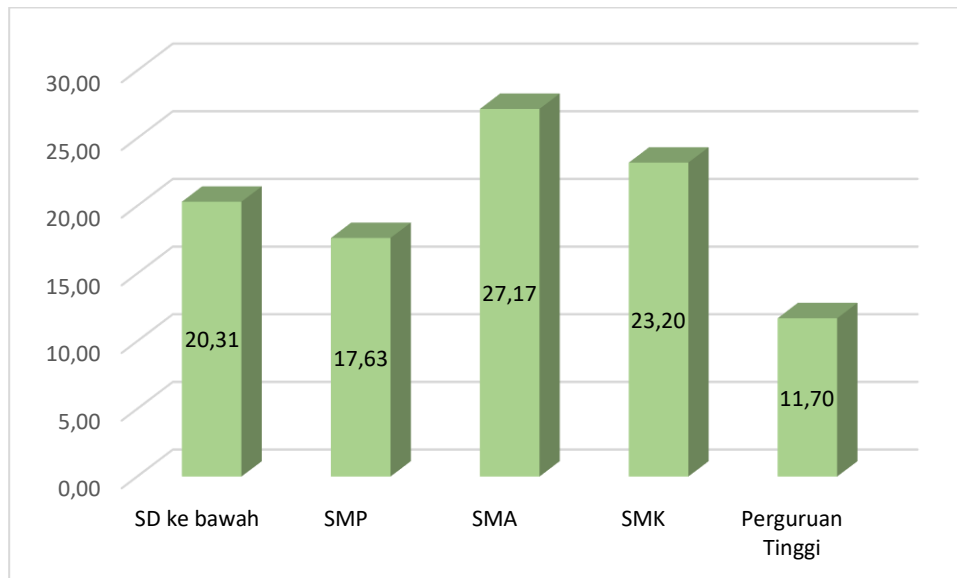
Sumber : BPS (Diolah dari Hasil Sakernas)

Gambar 3.12. tersebut memperlihatkan bahwa kualitas angkatan kerja di Kabupaten Buton masih relatif rendah. Hal ini dicerminkan oleh tingginya angkatan kerja yang berpendidikan rendah, yakni tamat SD ke bawah sebesar 35.93 persen, kemudian disusul yang berpendidikan SMA sebesar 26.83 persen, berpendidikan SMP sebesar 15.36 persen, Perguruan Tinggi sebesar 14.77 persen kemudian yang terendah adalah yang berpendidikan SMK yaitu 7.11 persen.

Berbeda dengan angkatan kerja, tingkat pengangguran di Kabupaten Buton justru didominasi oleh penduduk yang berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran yang berpendidikan menengah dan tinggi di atas karena setiap tahun jumlah lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi terus bertambah sementara lapangan kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung jumlah lulusan tersebut. Disamping itu kurangnya keterampilan para lulusan tersebut menyebabkan mereka hanya berharap untuk mencari pekerjaan di sektor formal. Sedangkan pekerjaan di sektor formal kurang diminati oleh para lulusan baru tersebut baik dari lulusan sekolah menengah maupun lulusan perguruan tinggi.

Gambar 3. 13. Persentase Pengangguran menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Buton, 2021



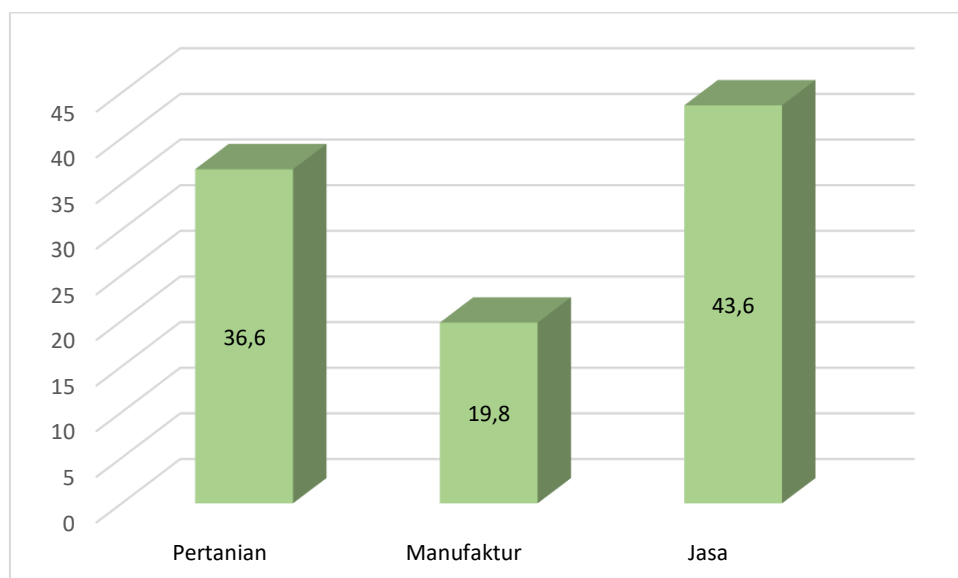
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, BPS

3.2.4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Sektor

Secara garis besarnya lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Buton dapat dikelompokkan atas tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor manufaktur dan sektor jasa. Presentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut sektor dapat dilihat pada gambar 3.14.

Penduduk Kabupaten Buton tahun 2021 sektor lapangan usaha paling besar masih didominasi oleh sektor jasa yaitu sebanyak 43.6 persen. Selain sektor jasa terdapat sektor pertanian sebesar 36.6 persen dan sisanya adalah sektor manufaktur yaitu 19.8 persen.

Gambar 3. 14. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Sektor di Kabupaten Buton, 2021



Sumber : BPS (Diolah dari Hasil Sakernas)

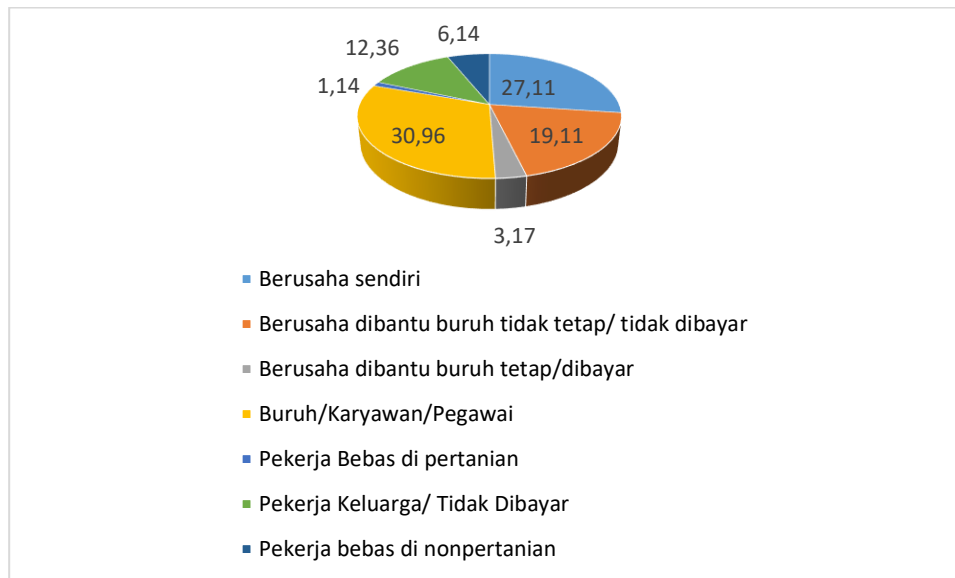
3.2.5. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Selain penduduk yang bekerja dikelompokkan menurut lapangan kerja dan jenis pekerjaan, dapat juga dikelompokkan menurut status pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dibagi atas tujuh kategori yang selanjutnya dapat digunakan untuk menggolongkan penduduk ke dalam dua jenis kelompok pekerja, yakni pekerja formal dan informal. Pekerja formal didefinisikan sebagai mereka dengan kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar, dan kategori buruh/karyawan, sedangkan mereka yang memiliki status pekerjaan diluar kategori tersebut digolongkan sebagai pekerja informal.

Di Kabupaten Buton tahun 2021 persentase pekerja formal sebesar 80.35 persen dan informal sebesar 19.65 persen. Secara umum menurut status pekerjaan utamanya tiga terbesar, 30.96 persen penduduk di Kabupaten Buton bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, kemudian 27.11 persen berusaha sendiri, dan 19.11 persen berstatus berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar. Selanjutnya pekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 12.36 persen, pekerja bebas di nonpertanian sebesar 6.14 persen, berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar 3.17 persen dan 1.14 persen berstatus pekerja bebas pertanian.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Buton dapat dilihat di gambar di bawah.

Gambar 3. 15. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Buton, 2020



Sumber: BPS (Diolah dari Hasil Sakernas)

Berdasarkan gambar di atas jenis pekerjaan yang banyak dilakukan di Kabupaten Buton adalah buruh atau karyawan/pegawai, kemudian berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar.

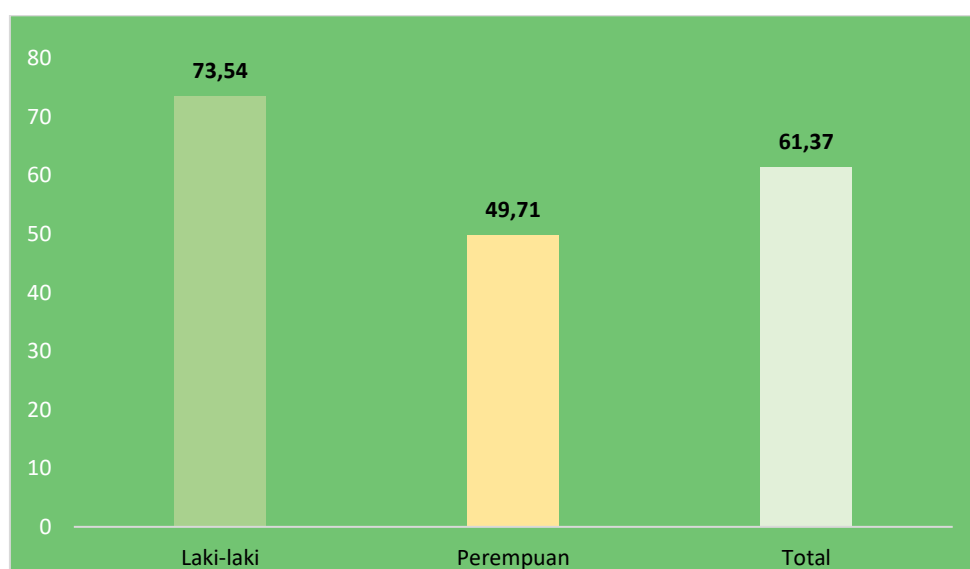
3.2.6. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to population ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu daerah yang berstatus kerja terhadap penduduk umur kerja (15 tahun ke atas). Rasio yang tinggi menunjukkan sebagian besar penduduk suatu daerah bekerja, sebaliknya rasio rendah berarti sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar tenaga kerja, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan

analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif, misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Angka EPR untuk Kabupaten Buton, tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 3. 16. *Employment to Population Ratio (EPR) Kabupaten Buton menurut Jenis Kelamin, 2021*



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, BPS

Berdasarkan gambar tersebut, Rasio Kesempatan Kerja Kelompok Usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Buton sejak tahun 2021 adalah sebesar 61.37. Angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 Tahun ke atas, terdapat sekitar 61 orang yang bekerja.

Jika dirinci menurut jenis kelamin, EPR laki-laki lebih tinggi dibanding EPR perempuan. Selain itu, penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas sebagai kelompok usia angkatan kerja lebih di dominasi oleh perempuan yang putus sekolah. Hal tersebut tentunya masih berkaitan dengan ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja, yang tidak lepas dari kendala norma, keyakinan, peraturan, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja sebenarnya merupakan hasil dari persepsi masyarakat umum tentang pemisahan peran, tugas, dan pekerjaan yang dipandang cocok dan wajar dikerjakan oleh

perempuan. Perempuan identik dengan sektor domestik atau yang berhubungan dengan kegiatan di dalam rumah tangga, misal mencuci, memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan sebagainya sedangkan laki-laki lebih banyak aktif dalam kegiatan ekonomi.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Buton masih perlu mendapatkan perhatian khusus, termasuk penataan kesempatan kerja yang dapat mempekerjakan para pencari kerja yang angkanya cukup tinggi. Selain itu menciptakan lapangan kerja juga harus memperhatikan potensi masing-masing wilayah serta memanfaatkan nilai-nilai kebudayaan lokal yang ada.

PENDIDIKAN



Pendidikan merupakan salah satu indikator inti dalam menentukan kualitas hidup manusia suatu daerah, sehingga pendidikan menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan yang dapat diukur melalui dukungan SDM yang berkualitas. Untuk itu program peningkatan kualitas SDM penting menjadi prioritas di dalam penyusunan program pembangunan. Kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai oleh suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengukur mutu pembangunan menggunakan parameter dengan 3 (tiga) komponen dan salah satunya adalah kemampuan untuk merefleksikan keberhasilan pengembangan pendidikan dengan melihat angka melek huruf dan lama sekolah.

Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dikategorikan ke dalam dua bahagian besar yaitu: **indikator perkembangan pembangunan pendidikan** melalui tiga komponen yaitu 1) akses penduduk usia sekolah terhadap pendidikan; 2) kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya; dan 3) tingkat pengeluaran pemerintah untuk anggaran pendidikan serta rasio sarana belajar pendidikan (rasio siswa-kelas, rasio siswa-guru dan rasio guru-kelas). Sementara **Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan** dapat dilihat dari antara lain: 1) Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan kelompok usianya; 2) Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang sesuai dengan kelompok usianya; 3) Proporsi penduduk Usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan; dan 4) Tingkat Kelulusan Siswa dan Angka Buta Huruf.

Keberhasilan program pendidikan di Kabupaten Buton dapat dievaluasi berdasarkan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu terwujudnya masyarakat Buton yang cerdas, mandiri, kompetitif, berbudaya dan berkarakter. Dari visi tersebut ditetapkanlah beberapa misi yang terdapat dalam Rencana Strategi (Renstra) Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka

Pembangunan Pendidikan 2015-2019. Misi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:

- 1) Misi 1 adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PUDNI yang bermutu dan berkesetaraan;
- 2) Misi 2 adalah meningkatkan penjaminan kapasitas memperoleh layanan Pendidikan Dasar yang bermutu dan berkesetaraan;
- 3) Misi 3 adalah meningkatkan penjaminan kapasitas memperoleh layanan Pendidikan Dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan;
- 4) Misi 4 adalah melestarikan dan mengembangkan budaya local di era global;
- 5) Misi 5 adalah mengembangkan kelembagaan pendidikan dan SDM yang unggul.

Data pendidikan dirinci menjadi tiga yaitu: 1) data pendidikan. 2) indikator pendidikan, dan 3) analisis berdasarkan pada indikator pendidikan yang dimaksud. Data pendidikan membahas tentang data Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari tiga jenjang yaitu: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas(SMA) serta dilengkapi dengan rangkuman Pendidikan Dasar dan Menengah. Variabel pendidikan yang dibahas menggarisbawahi variabel inti dan dirinci menjadi; prasaran sebanyak 7 variabel dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 6 variabel. Prasarana pendidikan yang dimaksud adalah: sekolah, rombongan belajar (kelas), ruangan kelas, perpustakaan, ruangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), tempat olah raga dan laboratorium. Sedangkan SDM adalah siswa baru, siswa, lulusan, guru, mengulang dan putus sekolah. Indikator non pendidikan terdiri dari kepadatan penduduk, penduduk usia sekolah, proporsi tingkat pendidikan penduduk, keadaan ekonomi, persentase biaya pendidikan dan persentase penduduk menurut agama. Namun demikian, data yang ada dalam profil ini belum sepenuhnya memenuhi semua persyaratan yang dimaksudkan di atas.

Kualitas SDM dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal. Pendidikan formal menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi

pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Pendidikan non-formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sedangkan pendidikan informal bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri yang seyogyanya dimulai dari lingkungan keluarga termasuk otodidak atau belajar sendiri. Dapat pula dikatakan bahwa, pendidikan informal adalah proses belajar secara alami mulai dari lingkungan keluarga sampai kepada lingkungan masyarakat luas.

Pemerintah telah membuktikan komitmennya dengan mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat antara lain:

1. Program pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu;
2. Program perbaikan fasilitas pendidikan; penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Program perbaikan kurikulum dan silabus pendidikan;
4. Program peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik sebagai salah satu kelompok yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan.
5. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan usaha pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional.

Beberapa intervensi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk membantu program nasional. Misalnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, program Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk tingkat SMA dan kejuruan yang belum didukung oleh pemerintah pusat, telah dilaksanakan sejak tahun 2008.

Selain itu, program pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi untuk kuliah di universitas baik di daerah maupun di luar Provinsi Sulawesi Tenggara juga menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah. Misalnya kerjasama dengan Universitas Halu Oleo Kendari untuk menampung siswa-siswi

berprestasi dari kabupaten/kota dengan biaya dari pemerintah daerah baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota masing-masing.

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan dan salah satu diantaranya adalah implemetasi kebijakan Pengarusutaman Gender (PUG) dalam pendidikan sebagai salah satu pengejawantahan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Upaya peningkatan kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang sama pada pendidikan dan sumber informasi lain. Agar sumber daya dapat terkontrol oleh mereka sendiri yang pada akhirnya mereka akan menikmati hasilnya. Jika masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka mereka akan memiliki wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik pula.

Dengan tingkat pendidikan yang baik, orang memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga lebih mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Melalui pendidikan, perempuan dan laki-laki akan memiliki jalan untuk ikut serta dalam hidup bermasyarakat dengan baik. Melalui pendidikan, perempuan dan laki-laki akan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain tujuan Kesetaraan dan Keadilan Gender di bidang pendidikan akan dapat dicapai jika kebijakan PUG benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan Pengarusutaman Gender dalam pendidikan juga menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Buton. Dapat dipastikan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuan yang secara tidak langsung akan memajukan pembangunan Kabupaten Buton. Dengan demikian dapat diyakini akan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Komitmen pentingnya pendidikan sebagai kata kunci keberhasilan SDM sudah menjadi skala prioritas pemerintah daerah Buton dan salah satu upaya untuk melihat perkembangan pendidikan dan sekaligus peningkatan kualitas SDM provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dengan mengevaluasi program pendidikan melalui pengembangan profil gender Buton ini dan Pendidikan menjadi salah satu analisis inti di dalam profil ini.

Untuk melihat kualitas SDM Kabupaten Buton melalui kacamata pendidikan, dibawah ini pemaparan tentang data-data indikator inti pendidikan Sulawesi Tenggara dapat digambarkan secara berturut-turut sebagai berikut.

4.1. Partisipasi Bersekolah

Profil pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota dapat dipandang sebagai bahan masukan untuk menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis dan menunjukkan kondisi partisipasi pendidikan di suatu kabupaten/kota. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah termasuk di Kabupaten Buton.

Pada tahun 2021 terdapat 27,163 peserta didik di Kabupaten Buton berpartisipasi pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 14,264 peserta didik. Pada jenjang pendidikan SMP terdapat 6,361 peserta didik. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA, terdapat 5500 peserta didik. Pada jenjang pendidikan SMK terdapat 1013 peserta didik, sedangkan pada jenjang pendidikan yang termasuk dalam kategori SLB, terdapat 25 peserta didik yang berpartisipasi.

Ditinjau menurut kecamatan, sebesar 10.777 peserta didik atau sekitar 39,68 persen peserta didik di Kabupaten Buton berada di Kecamatan Pasarwajo yang merupakan ibukota kabupaten. Kedua terbesar, sebesar 3.734 persen atau 13,75 peserta didik berada di Kecamatan Siotapina. Selanjutnya, sebanyak 3.500 peserta didik atau sebesar 12.89 persen berada di Kecamatan Kapontori, sedangkan Kecamatan Wabula menjadi kecamatan dengan jumlah peserta didik paling sedikit di Kabupaten Buton yaitu sebesar 1.260 peserta didik atau sekitar 4.64 persen dari total peserta didik di Kabupaten Buton tahun 2021. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Jumlah Peserta Didik menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021

Kecamatan		Pasar Wajo	Siontapina	Kapontori	Lasalimu Selatan	Lasalimu	Wolowa	Wabula	Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total	Jumlah	10,777	3,734	3,500	3,141	2,980	1,771	1,260	27,163
	L	5,560	1,939	1,753	1,666	1,490	943	627	13,978
	P	5,217	1,795	1,747	1,475	1,490	828	633	13,185
SD	Jumlah	5,601	2,081	1,851	1,614	1,638	776	703	14,264
	L	2,947	1,080	916	876	841	415	360	7,435
	P	2,654	1,001	935	738	797	361	343	6,829
SMP	Jumlah	2,430	924	760	732	732	452	331	6,361
	L	1,251	465	375	383	348	251	153	3,226
	P	1,179	459	385	349	384	201	178	3,135
SMA	Jumlah	2,160	624	720	702	610	458	226	5,500
	L	1,010	338	367	354	301	236	114	2,720
	P	1,150	286	353	348	309	222	112	2,780
SMK	Jumlah	561	105	169	93	-	85	-	1,013
	L	337	56	95	53	-	41	-	582
	P	224	49	74	40	-	44	-	431
SLB	Jumlah	25	-	-	-	-	-	-	25
	L	15	-	-	-	-	-	-	15
	P	10	-	-	-	-	-	-	10

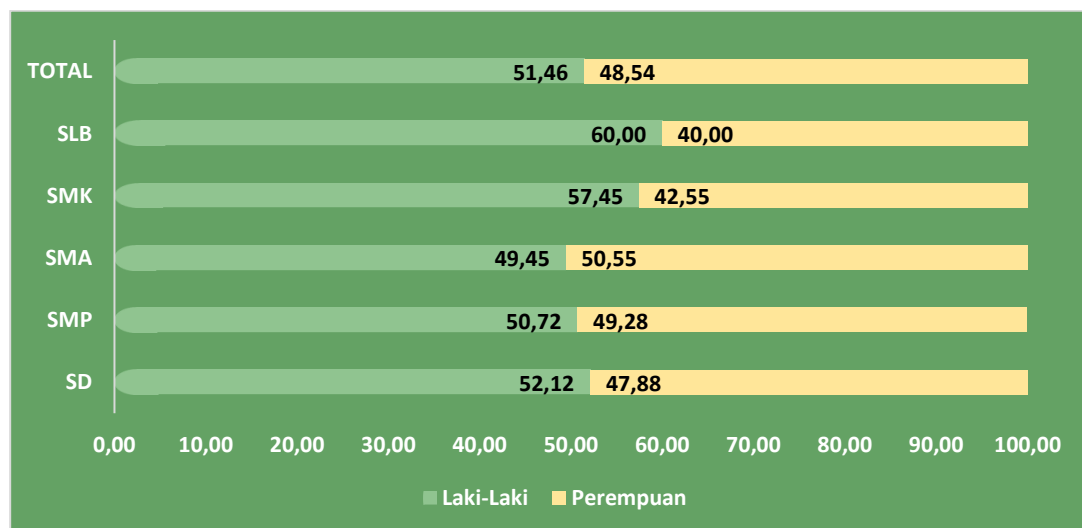
Sumber : Dapodikdasmen TA 2021/2022 Semester Ganjil

Jika diperhatikan lebih jauh, semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah partisipasi peserta didik cenderung mengalami penurunan. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin semakin rendah partisipasi sekolah di Buton. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah serta melakukan upaya yang dapat meningkatkan secara signifikan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dilihat menurut komposisi jenis kelamin peserta didik, pada tahun 2021 51,46 persen peserta didik berjenis kelamin laki-laki. Sisanya, 48,54 persen peserta didik berjenis kelamin perempuan. Pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMK dan SLB, lebih dari 50 persen peserta didik merupakan laki-laki, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA lebih dari 50 persen didominasi oleh perempuan. Jenjang pendidikan SMK merupakan jenjang pendidikan dengan persentase peserta didik

perempuan paling sedikit dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 42,55 persen. Hal ini menjadi wajar karena jenjang pendidikan SMK lebih mengedepankan *hardskill* dari pada *softskill* yang cenderung lebih disukai oleh laki-laki. Sesuai dengan hal tersebut, jenjang pendidikan SMA lebih didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 50,55 persen, sisanya 49,45 merupakan laki-laki. Kemudian pada jenjang pendidikan SLB, SMP dan SD lebih didominasi oleh peserta didik laki-laki dari pada perempuan masing-masing sebesar 60,00, 50,72 dan 52,12 persen. Gambaran yang lebih mudah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 1. Persentase Peserta Didik menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021

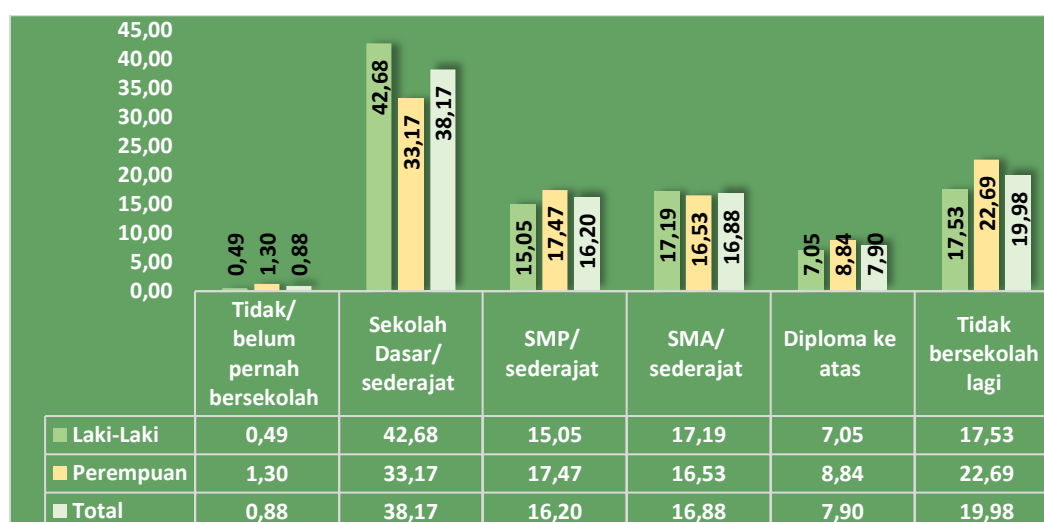


Sumber : Dapodikdasmen TA 2021/2022 Semester Ganjil

Kelompok usia 7-24 tahun merupakan kelompok usia normatif seseorang untuk ikut serta pada jenjang pendidikan SD hingga Diploma ke atas. Pada kelompok usia ini, partisipasi bersekolah di Kabupaten Buton pada tahun 2021 didominasi oleh partisipasi sekolah dasar/ sederajat yaitu sebesar 38.17 persen. Kemudian SMA/ sederajat berada pada urutan kedua yaitu sebesar 16.88 persen. Selanjutnya sebesar 19.98 persen tidak bersekolah lagi. Dan dipolama ke atas dan tidak/ belum pernah bersekolah masing-masing sebesar 7.90 dan 0.88 persen. Tingginya persentase penduduk usia 7-24 tahun di Kabupaten Buton pada partisipasi sekolah SD/ sederajat menunjukkan masih tingginya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah.

Partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat lebih didominasi perempuan dari pada laki-laki. Sebesar 17.47 persen perempuan usia 7-24 tahun berpartisipasi hingga jenjang pendidikan SMP/ sederajat, sedangkan laki-laki sebesar 15.05 persen. Kemudian pada jenjang SMA/ sederajat didominasi laki-laki sebesar 17.19 persen perempuan usia 7-24 tahun berpartisipasi hingga jenjang pendidikan SMA/ sederajat, sedangkan perempuan sebesar 16.53 persen. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan usia 7-24 tahun lebih banyak yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat di tahun 2021.

Gambar 4. 2. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Partisipasi Bersekolah di Kabupaten Buton, 2021



Sumber: Susenas, BPS

Selama kurun waktu 2019-2021, perkembangan penduduk berumur 7-24 tahun ke atas menurut partisipasi bersekolah di Kabupaten Buton mengalami penurunan. Terdapat hal yang menarik pada perkembangan partisipasi sekolah hingga diploma ke atas, selama tiga tahun terakhir, partisipasi perempuan hingga diploma ke atas cenderung mengalami penurunan sedangkan partisipasi sekolah dasar/ sederajat cenderung mengalami peningkatan. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan pada penjelesan mengenai indikator inti pendidikan di bawah.

Tabel 4. 2. Perkembangan Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Partisipasi Bersekolah di Kabupaten Buton, 2019-2021

Tahun	Sekolah Dasar/ sederajat		SMP/ sederajat		SMA/ sederajat		Diploma ke atas	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2019	42,75	40,54	19,27	21,01	19,75	21,23	17,52	16,82
2020	41,13	39,02	16,48	21,92	21,92	19,52	19,07	18,36
2021	42,68	33,17	15,05	17,47	17,19	16,53	7,05	8,84

Sumber: Susenas, BPS

4.1.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK bertujuan menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan dan APK sebagai indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

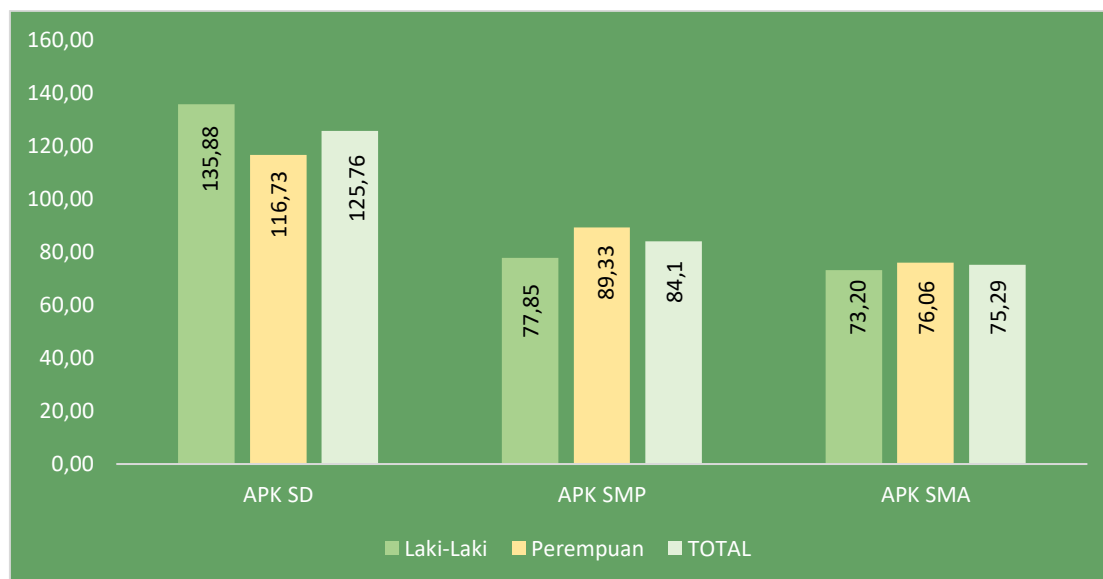
APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa suatu wilayah mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Keikutsertaan para peserta didik pada proses pendidikan tidak terbatas pada kelompok usia normatif untuk setiap jenjang pendidikan. Misalnya partisipasi untuk SD, tidak terbatas bagi penduduk berusia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Akan tetapi, mereka yang tidak termasuk pada kelompok umur tersebut juga berhak ikut serta atau berpartisipasi. Seperti penduduk dewasa namun mengikuti jenjang pendidikan yang setara dengan SD (Kelompok belajar Paket A).

Gambar 4.3. adalah gambaran data APK tahun 2021 pada semua jenjang pendidikan; SD, SMP, SMA dan PT. Data tersebut menunjukkan bahwa APK rata-rata jenjang SD pada tahun 2021 tercatat sebesar 111.43 untuk laki-laki dan 117.71

untuk perempuan. Data ini menunjukkan APK perempuan lebih tinggi dengan selisih 6.28 persen.

Gambar 4. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Kabupaten Buton, 2021



Sumber : Susenas, BPS

Data APK SD pada tahun 2021 menunjukkan angka lebih dari 100 persen, baik APK laki-laki maupun perempuan. Tabel 4.3. menunjukkan masih ada kurang lebih 10 persen penduduk Kabupaten Buton yang bersekolah dijenjang pendidikan SD yang tidak sesuai dengan kelompok umurnya. Jika dirinci menurut jenis kelamin, APK SD perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan APK SD laki-laki. Kesenjangan yang terjadi di tingkat SD menunjukkan bahwa lebih banyak anak perempuan yang agak telat atau terlalu cepat masuk SD dari pada anak laki-laki.

Untuk APK SMP pada dua tahun terakhir secara umum juga berfluktuatif seperti halnya di tingkat SD sampai SMA. APK SD dari tahun 2020 ke 2021 baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan. Kemudian untuk APK SMP dari tahun 2020 dan 2021 untuk laki-laki mengalami penurunan sementara perempuan mengalami kenaikan. Lalu APK SMA untuk laki-laki mengalami kenaikan sementara untuk perempuan mengalami penurunan.

Tabel 4. 3. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2020 - 2021

Tahun	APK SD		APK SMP		APK SMA	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2020	114,20	110,70	89,09	84,78	85,24	118,77
2021	114,43	117,71	85,73	91,08	99,62	93,68

Sumber : Susenas, BPS

Gambaran data di atas menyimpulkan bahwa pada tahun 2021 akses dan tingkat partisipasi anak perempuan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki, namun perbedaan nilainya tidak cukup besar. Namun pada jenjang pendidikan SMA partisipasi anak laki-laki lebih tinggi.

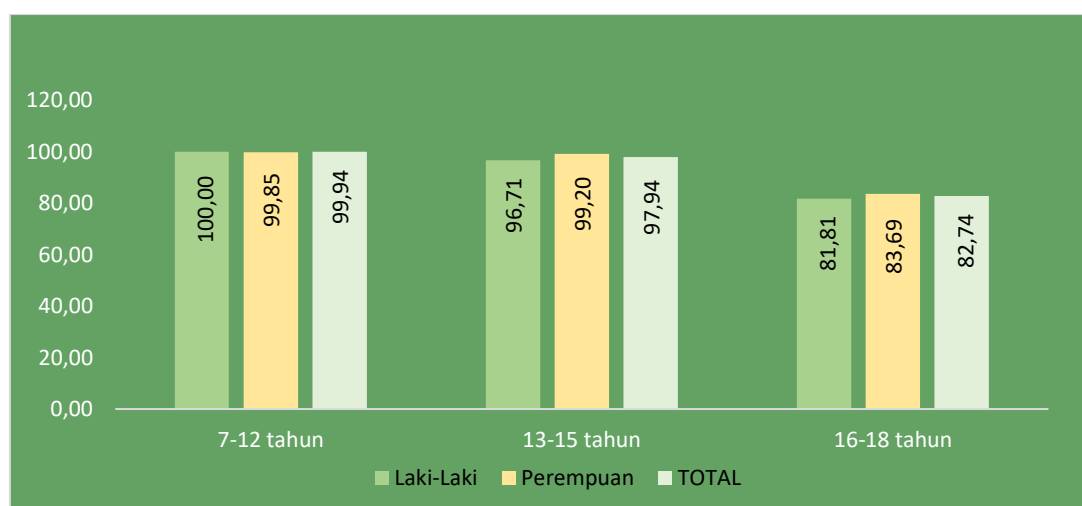
Hal ini disebabkan budaya patriarki dan kebiasaan masyarakat mengakar bahwa laki-laki harus belajar mencari uang sejak masih muda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sementara itu perempuan hanyalah pencari nafkah tambahan. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa strategi ini kurang tepat karena laki-laki yang kurang mampu terpaksa meninggalkan sekolah. Isu seperti ini menjadi penting untuk dicermati sebab akan berdampak jangka panjang. Jika melihat kondisi tingkat pendidikan formal saat ini, dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan, perempuan lebih banyak yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kesempatan untuk akses dan berpartisipasi dalam pendidikan adalah hak asasi yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Setiap warga negara Indonesia berhak meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan keahlian tanpa merugikan satu pihak. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang sama untuk memacu pembangunan dan sekaligus dapat menerima manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukkan akses dan partisipasi anak laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu secara formal.

APS merupakan jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang berstatus masih sekolah dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia tersebut. APS terbagi menjadi APS penduduk usia 7-12 tahun, APS penduduk usia 13-15 tahun, dan APS penduduk usia 16-18 tahun. Kegunaan dari APS adalah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dan merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Gambar 4. 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Buton, 2021



Sumber : Susenas, BPS

Akses dan pemerataan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi penduduk usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang terinci menurut jenis kelamin. Pada tahun 2021 sebanyak 99.94 persen penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Buton sudah mengenyam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa target APS SD sudah hampir tuntas dan sangat signifikan dengan era sekarang ini dimana orang tua sudah memahami dan menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya tanpa membedakan anak laki-laki maupun anak perempuan.

Kemudian ada 97. 94 persen penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun sudah mengenyam pendidikan. Sedangkan pada kelompok usia 16-18 tahun, APS laki-laki lebih rendah dari pada APS perempuan, yakni 81.81 persen dibandingkan 83.69 persen.

Tampilan data APS tiga tahun terakhir (2019-2021) untuk hampir semua jenjang usia menggambarkan bahwa laki-laki yang mendominasi duduk dibangku sekolah. Meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Data tersebut juga menandakan bahwa perempuan akan menyandang pendidikan lebih tinggi dari pada laki-laki. Di lain pihak, laki-laki yang notabene akan menjadi kepala rumah tangga sudah belajar mencari uang sedini mungkin. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya APS laki-laki pada usia 16-18 tahun.

Tabel 4. 4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019-2021

Tahun	APS 7-12 thn		APS 13-15 thn		APS 16-18 thn	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	98,52	99,60	97,04	99,30	79,94	84,96
2020	97,99	99,35	96,62	98,66	84,72	79,62
2021	100,00	99,85	96,71	99,20	81,81	83,69

Sumber : Susenas, BPS

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak anak laki-laki di Kabupaten Buton meninggalkan bangku sekolah pada tingkat SMA. Salah satu alasan adalah karena ikut berlayar atau merantau untuk mencari nafkah. Alasan ini juga dibuktikan dengan besaran APS anak perempuan yang lebih tinggi di usia SMP dan SMA dalam kurun waktu 2019-2021.

Gambaran di atas juga menunjukkan ada pengaruh budaya patriarki dimana anak laki-laki di suatu suku lebih cepat membantu orang tuanya untuk bersama-sama mencari nafkah. Namun sebaliknya, budaya lama yang melarang anak perempuan sekolah tinggi-tinggi sudah tidak terbukti. Sebab data di atas menunjukkan perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan partisipasi yang hampir sama di dalam dunia pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan pendidikan yang ditandai dengan akses dan tingkat partisipasi sekolah baik anak laki-laki maupun anak perempuan sudah tidak lagi menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Kecuali untuk APS 16-18 tahun yang perlu lebih ditingkatkan lagi terutama bagi penduduk laki-laki.

4.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 persen. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan program *Mellenium Develpoment Goals* (MDGs) dan sekarang juga masih digunakan pada *Sustainbale Develpoment Goals* (SGDs), dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk usia 16-18 tahun.

Gambar 4. 5. Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Buton, 2021



Sumber : Susenas, BPS

Data APM pada Gambar 4.5. menunjukkan bahwa tahun 2021 akses dan partisipasi laki-laki maupun perempuan di dalam dunia pendidikan pada jenjang SD hampir 100 persen. Sementara pada APM jenjang SMP terdapat *gap*, perempuan lebih besar persentasinya dibandingkan laki-laki yaitu 84.85 persen dibandingkan 75.70 persen pada jenjang SMP. Sama halnya juga dengan jenjang pendidikan SMA, terdapat *gap* pada APM yang mana laki-laki lebih besar persentasinya dibandingkan dengan perempuan yaitu 72.03 persen dibandingkan dengan perempuan 67.44 persen. Perbedaan *gap* yang terjadi tidak terlalu tinggi yaitu selisih 9.15 persen pada jenjang pendidikan SMP dan 4.59 persen pada jenjang Pendidikan SMA.

Menariknya adalah APM perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki untuk jenjang SD selama kurun waktu 2019-2021. Artinya pada tahun 2019-2021 akses dan partisipasi perempuan pada tingkat SD lebih tinggi. Sementara pada jenjang SMP, tahun 2019 APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan sedangkan tahun 2020 -2021 APM perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Selanjutnya APM SMA berubah yang mana pada tahun 2019 perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, sedangkan pada 2020-2021 justru sebaliknya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini terjadi karena banyaknya anak laki-laki yang putus sekolah pada jenjang SMA karena tuntutan untuk mencari nafkah atau bekerja.

Tabel 4. 5. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019 - 2021

Tahun	APM SD		APM SMP		APM SMA	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	98,52	99,60	77,28	77,19	66,53	70,45
2020	97,99	99,35	78,47	81,42	69,77	68,14
2021	99,07	99,85	75,70	84,85	72,03	67,44

Sumber : Susenas, BPS

Data APM secara keseluruhan menunjukkan bahwa, rata-rata anak perempuan lebih berpeluang untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan prestasi anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Bukan berarti bahwa anak laki-laki tidak berprestasi, akan tetapi jika dilihat dari

keseharian di sekolah dan dibuktikan dengan nilai rapor, anak perempuan lebih unggul dibandingkan dengan anak laki-laki.

Gambaran yang lain menjadi perhatian adalah tingginya kesempatan dan prestasi perempuan di dunia pendidikan, akan berdampak ketimpangan untuk laki-laki pada masa yang akan datang. Sehingga bias gender akan menimbulkan persoalan baru dimana perempuan lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa yang akan datang. Sementara tujuan kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan harus sejalan dan menjadi mitra kerja, baik itu di dalam rumah tangga maupun di rana publik. Hal ini menjadi ancaman akan terjadinya tindak kekerasan dan KDRT, karena budaya patriarki cenderung kurang menerima perempuan sebagai pengambil kebijakan dengan beberapa alasan. Fenomena ini sudah mulai muncul dipermukaan dan data KDRT dan kekerasan seksual sudah meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjadi satu pertimbangan jika dihubungkan dengan program-program sekolah kedepan. Perlu ada penekanan tersendiri untuk anak laki-laki agar mereka tetap sejalan dengan prestasi perempuan. Pendidikan yang merata adalah memberikan akses dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk bersekolah setinggi mungkin. Dengan demikian kesetaraan gender di dunia pendidikan dapat memberikan dampak positif didalam kehidupan bermasyarakat karena pendidikan menjadi kata kunci keberhasilan. Rekomendasinya adalah pendidikan wajib belajar bukan lagi pada level 9 tahun tetapi seharusnya ditingkatkan menjadi 12 tahun. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah sebab APM untuk SMP belum tuntas.

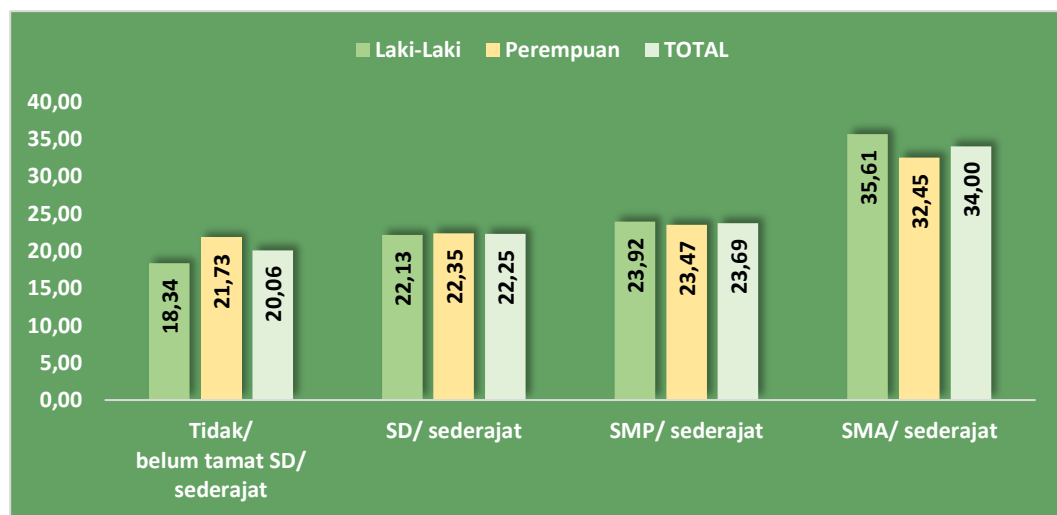
4.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga menjadi indikator penilaian tentang pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Kualitas SDM yang tinggi dapat dicapai jika masyarakat memiliki jenjang pendidikan yang tinggi pula.

Berdasarkan pencapaian pendidikan menurut jenjang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2021 persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mempunyai ijazah SMA/ sederajat ke atas di Kabupaten Buton laki-laki lebih

tinggi dibandingkan dengan perempuan yaitu 35.61 persen laki-laki dan 32.45 persen perempuan, total persentasenya yaitu sebesar 34.00 persen. Sementara yang berijazah SMP / sederajat lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 23.92 persen dan perempuan hanya 23.47 persen, total persentasenya yaitu 23.69 persen.

Gambar 4. 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Buton, 2021



Sumber : Susenas, BPS

Penduduk berumur 15 tahun keatas yang berpendidikan tertinggi tidak/belum tamat SD/sederajat perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 22.35 dengan 22.13 persen. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk perempuan di Kabupaten Buton masih rendah, bahkan masih ada 21.73 persen penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang sama sekali tidak memiliki ijazah. Meskipun begitu angka ini sedikit membaik dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 4. 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019-2021

Tahun	Tidak/		SD/ sederajat		SMP/ sederajat		SMA/ ke atas	
	belum	tamat						
	SD/sederajat		L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2019	20	26,63	21,57	19,13	20,49	19,72	37,95	34,51
2020	20,21	23,36	19,34	22,94	18,65	21,12	41,8	32,59
2021	18,34	21,73	22,13	22,35	23,92	23,47	35,61	32,45

Sumber : Susenas, BPS

Data pada Tabel 4.6. juga memperlihatkan masih rendahnya persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan dasar. Persentase penduduk baik laki-laki yang pada seluruh jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih berfluktuasi, begitu pula dengan penduduk perempuan. Sementara itu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Sementara persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA/ke atas, baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan ada penurunan tingkat pendidikan di Kabupaten Buton dari tahun ke tahun. Dengan demikian, pemerintah harus terus konsisten meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Buton.

4.3. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

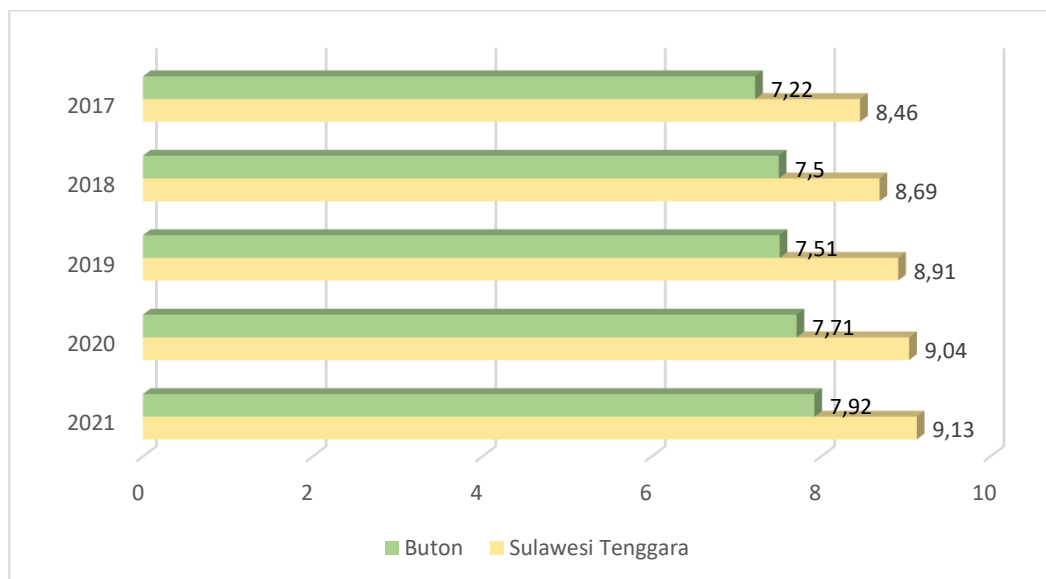
Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang dicapai. Mengingat rata-rata lama sekolah merupakan dampak dari berbagai proses ekonomi, sosial, dan budaya yang sekaligus juga mencerminkan kondisi masyarakat secara umum, maka perubahan besaran rata-rata lama sekolah sangat kecil dalam waktu relatif singkat, seperti dalam perubahan tahunan.

Rata-rata lama sekolah juga sangat menentukan pola pikir individu untuk berinteraksi di masyarakat, sehingga dapat melakukan kerja-kerja yang efektif,

efisien dan berdaya saing. Program pendidikan perlu terobosan baru mengingat era globalisasi sekarang, terutama dengan kesepakatan program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka kualitas individu sangat menentukan nasib suatu bangsa. Pada saat yang bersamaan, pendidikan selalu menjadi rujukan untuk menentukan kualitas SDM dan dalam hal ini sangat berkorelasi dengan rata-rata lama sekolah.

Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah, misalnya melalui program wajib belajar 9 tahun, atau pelaksanaan pendidikan dasar hingga tingkat SLTP dan bahkan ada wacana akan mengubahnya menjadi program wajib belajar 12 tahun. Hal ini sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam menilai pentingnya meningkatkan kualitas SDM sebab pendidikan menjadi salah satu indikator inti pembangunan manusia.

Gambar 4. 7. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Buton 2017-2021



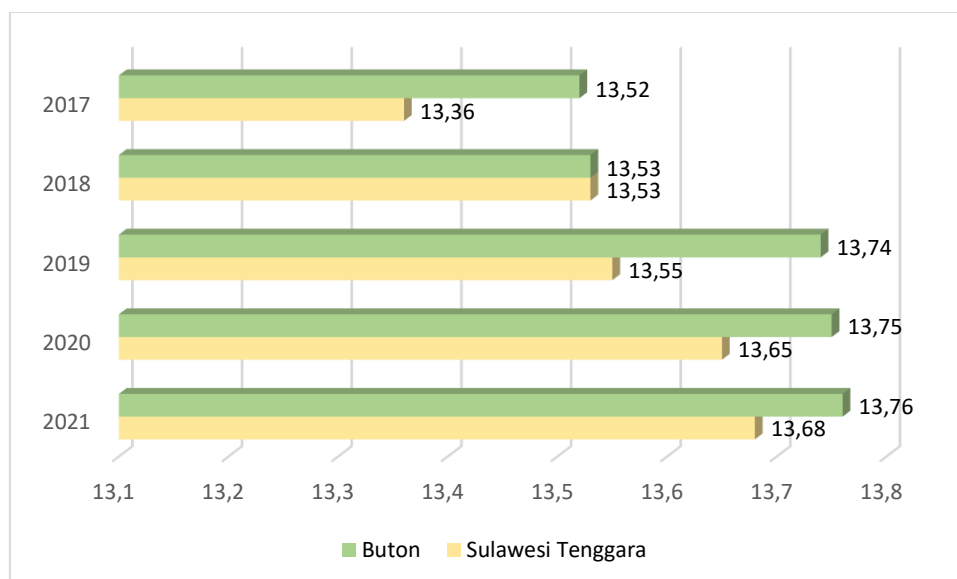
Sumber : BPS (diolah)

Gambar 4.7. di atas menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Buton tahun 2021 tercatat 7,92 tahun. Ini berarti hingga tahun 2021, secara rata-rata penduduk kabupaten Buton usia 25 tahun ke atas mengenyam Pendidikan hingga kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. RLS ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 7,71 tahun. Meski naik, RLS Kabupaten Buton berada di bawah RLS Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Hal ini berarti kondisi Pendidikan di Kabupaten Buton masih tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Buton belum berhasil melewati program wajib belajar 9 tahun. Data ini konsisten dengan data kepemilikan ijazah dimana penduduk mencatat angka yang cukup tinggi untuk yang tidak memiliki ijazah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk program peningkatan kualitas hidup manusia di Buton. Data ini pula sangat berkorelasi dengan peringkat IPM, IPG dan IDG yang telah dipresentasikan pada bab terdahulu.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarannya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Gambar 4. 8. Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Buton 2017 – 2021



Sumber : BPS (diolah)

Catatan : Data Terpilah tidak tersedia

Dari tahun ke tahun, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buton terus merangkak naik. Pada tahun 2017, angka harapan lama sekolah sebesar 13,52 kemudian meningkat menjadi 13,53 pada tahun 2018, 13,74 pada tahun 2019, 13,75 pada tahun 2020, dan naik menjadi 13,76 pada tahun 2021. Angka 13,76 pada tahun 2021 ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan Pendidikan mereka hingga lulus D1. Kenaikan HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi Pendidikan di wilayah sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

4.4. Kemampuan Membaca dan Menulis

Membaca dan menulis merupakan bagian dari empat aspek literasi yang disajikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah yang meliputi aspek menyimak, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis. Kemampuan membaca adalah suatu proses pemahaman yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Kemampuan menulis adalah suatu proses merangkai, menyusun, dan mencatat hasil pikiran individu dalam bahasa tulis. Pondasi ini merupakan jalan dalam mencapai menuju kesuksesan pada keterampilan lainnya.

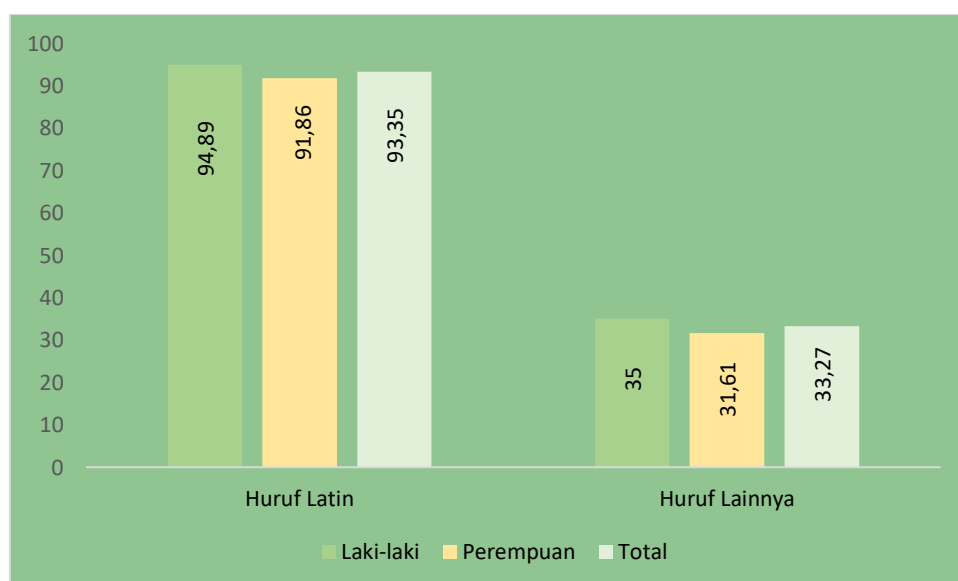
Tingkat literasi masyarakat memiliki hubungan vertikal terhadap kualitas bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah telah mencanangkan berbagai macam program yang dapat meningkatkan kemampuan literasi sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, salah satunya melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang telah digiatkan oleh Kemendikbud sejak 2016.

Berbagai ukuran dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan literasi. Diantaranya melalui berbagai indikator misalnya angka melek huruf yang menunjukkan kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf atin, huruf arab, dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang akan dijelaskan pada bahasan berikutnya.

Gambar 4.9 menunjukkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca serta menulis di Kabupaten Buton pada tahun 2021. Dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk 15 tahun ke

atas di Buton baik yaitu sebesar 93.35 persen untuk huruf latin, 31.02 persen huruf arab, dan sisanya 2.25 persen huruf lainnya. Penduduk perempuan memiliki persentase kemampuan membaca dan menulis yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam hal kemampuan membaca dan menulis huruf latin, yaitu sebesar 91.86 persen dibandingkan 94.89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM perempuan di Buton masih cukup timpang dibandingkan laki-laki. Padahal perempuan merupakan pondasi penting dalam memberikan pendidikan dasar pada generasi berikutnya.

Gambar 4. 9. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca serta Menulis di Kabupaten Buton, 2021



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, BPS

Jika melihat perkembangan penduduk 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Buton selama tiga tahun terakhir, besaran persentase penduduk laki-laki cenderung mengalami penurunan (95.41 persen pada 2019, 94.11 persen pada 2020, dan menjadi 94.89 persen pada 2021), sedangkan penduduk perempuan mengalami fluktuasi (88.48 persen pada 2019, 89.62 persen pada 2020, dan menjadi 91.86 persen pada 2021) khususnya kemampuan membaca dan menulis huruf latin. Hal tersebut dibarengi dengan peningkatan persentase penduduk laki-laki maupun perempuan pada kemampuan membaca dan menulis huruf arab dan huruf lainnya. Jika diperhatikan kembali, besaran persentase penduduk laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan pada

kemampuan membaca dan menulis huruf latin, sedangkan besaran persentase membaca dan menulis huruf lainnya lebih tinggi penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Hal tersebut ditampilkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca serta Menulis di Kabupaten Buton, 2019-2021

Tahun	Huruf Latin		Huruf Lainnya	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	95.41	88.48	26,21	28.23
2020	94.11	89.62	37.08	34.13
2021	94.89	91.86	35,00	31.61

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

4.4.1 Angka Melek Huruf

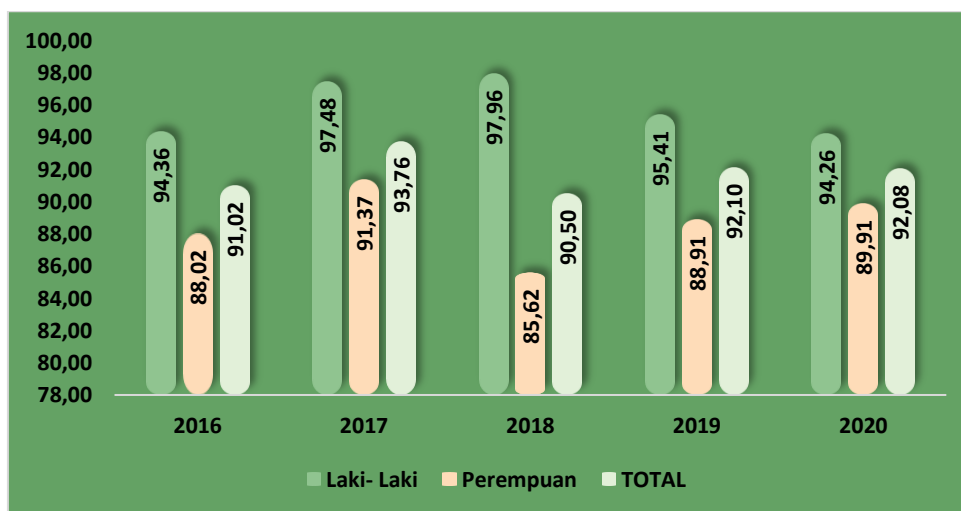
Angka Melek Huruf (AMH) adalah salah satu indikator inti pendidikan yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan, khususnya gambaran kualitas manusia Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah telah mencanangkan program pemberantasan buta aksara dan yang menjadi indikator output penting yaitu angka melek huruf dewasa dan rata-rata lama sekolah. *Monitoring* dan evaluasi pencapaian pendidikan antara lain dapat dilihat dari angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dalam perencanaan pembangunan, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Indikator AMH dapat digunakan untuk:

- mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten/kota dan mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Gambar 4. 10. Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas di Kabupaten Buton, 2016-2020



Sumber : Susenas, BPS

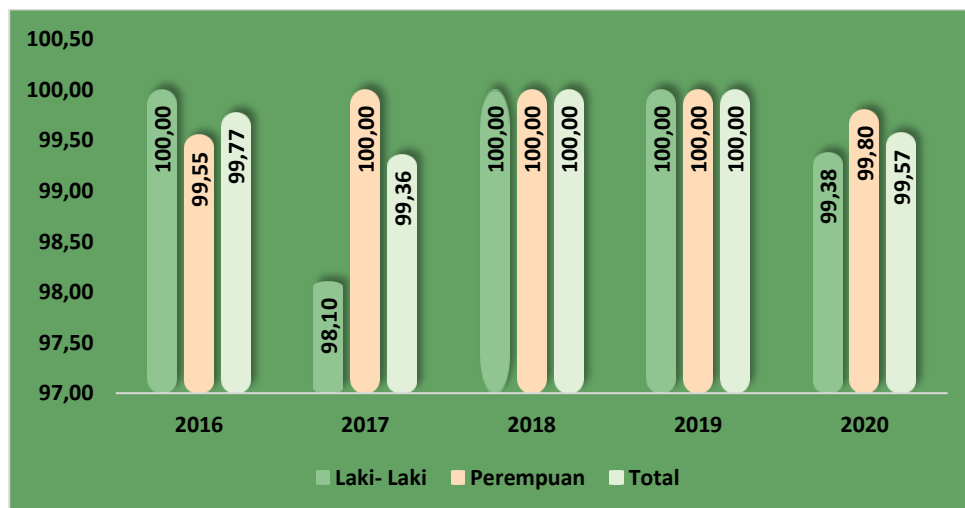
Catatan: Angka Melek Huruf 2021 Tidak Tersedia

Gambar diatas menunjukkan data AMH penduduk yang berusia 15 keatas menurut jenis kelamin. Pada tahun 2016 AMH laki-laki tercatat 94.36. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan menjadi 97.48. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 97.96. persen, namun AMH perempuan mengalami penurunan menjadi 85.62. Namun, pada 2019, AMH laki-laki mengalami penurunan menjadi 95.4, sedangkan AMH perempuan mengalami peningkatan menjadi 92.10. Demikian juga di tahun 2020 AMH laki-laki mengalami penurunan menjadi 94.26 persen, sedangkan AMH perempuan mengalami peningkatan menjadi 89.91 persen.

Meski demikian, masih terdapat perbedaan yang amat jelas antara AMH laki-laki dan perempuan usia 15 tahun ke atas. Rendahnya AMH perempuan menggambarkan kualitas SDM perempuan masih sedikit lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Maka dari itu, pemerintah perlu membuat program untuk meningkatkan AMH perempuan agar tidak terjadi ketimpangan antara keduanya. Capaian AMH laki-laki maupun perempuan Buton sudah termasuk di dalam kategori cukup baik karena semua berada pada rata-rata pada angka 80 persen ke atas dan ini menggambarkan hampir tuntas.

Salah satu penyebab ketimpangan gender pada data AMH merupakan pengaruh budaya patriarki yang dipraktekkan sejak dahulu dan dampaknya baru dirasakan sekarang. Umumnya masyarakat berpendapat bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena tugas mereka hanya diseputar rumah, dapur dan sumur. Praktek budaya seperti itu baru dirasakan manfaatnya setelah berlangsung bertahun-tahun. Untuk itu, pencerahan budaya sangat perlu dilakukan termasuk di dunia pendidikan.

Gambar 4. 11. Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15-24 Tahun di Kabupaten Buton, 2016-2020



Sumber : Susenas, BPS

Catatan: Angka Melek Huruf Penduduk 15-24 Tahun 2021 tidak tersedia

Jika melihat perkembangan AMH penduduk usia 15-24 tahun, besarnya masih berfluktuatif, baik AMH laki-laki maupun perempuan. Data terakhir tahun 2020 menunjukkan bahwa AMH baik laki-laki maupun perempuan turun yang

awalnya semua berada di posisi 100 persen menjadi 99.38 untuk laki-laki dan 99.80 untuk perempuan. AMH laki-laki dan AMH perempuan di tahun 2018 dan 2019 juga telah mencapai angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa program buta aksara hampir tuntas.

Data capaian AMH laki-laki dan perempuan sebenarnya memperlihatkan perbedaan yang tidak signifikan dan kemungkinan dapat dikatakan bahwa ada dampak positif dengan konsep gender telah diterapkan di bidang pendidikan dalam kurun waktu yang cukup lama. Jauh sebelumnya, yaitu sejak Inpres no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan telah dicanangkan secara nasional. Kebijakan PUG di dukung oleh Permendagri No 67 tahun 2011 merupakan Perubahan Atas Permendagri no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kebijakan ini juga di support dengan Permendiknas No 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan.

Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, hasil dari kebijakan PUG telah berhasil memberikan akses dan partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan, khususnya akses dan berpartisipasi di bidang pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi yaitu ke PT.

Jika dilihat dari beberapa tahun yang lalu, maka AMH yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan menunjukkan ketidakadilan gender dimana perempuan hampir tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Banyak perempuan tidak bisa akses dan berpartisipasi di dalam program pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya, disebabkan karena budaya yang mengekangnya. Tradisi seperti itu telah berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan untuk mengontrol dan menerima manfaat dari pembangunan yang ada, khususnya program pendidikan pada tahun-tahun yang silam.

Akan tetapi tahun-tahun terakhir ini sudah memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan tentang perubahan budaya patriarki yang dipandang sebagai salah satu pemicu terjadinya bias gender di masyarakat, sudah mulai bergeser kearah yang lebih baik dan terbukti dengan kesempatan dan partisipasi anak perempuan di dunia pendidikan sekarang ini sudah hampir tidak mengalami kendala. Untuk itu, harus optimis bahwa program peningkatan kualitas SDM akan

lebih terarah jika kesetaraan gender sudah menjadi perpektif pada setiap program pembangunan, terutama di bidang pendidikan.

4.5. Sarana dan Prasaranan Pendidikan

Pendidikan sebagai suatu sistem yang paling mempengaruhi, bergantung, berkoordinasi, dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan, antara lain di pengaruhi oleh kemampuan manajemen, sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas untuk menjalankan suatu proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah ketersediaan tenaga pengajar serta sarana prasarana yang tersedia. Tenaga pengajar merupakan hal yang vital dan penting dalam menunjang proses pembelajaran. Semakin besar jumlah tenaga pengajar dinilai membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah tenaga pengajar artinya akan semakin kecil beban siswa. Artinya fokus pembelajaran akan semakin bagus. Hal tersebut tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana agar kegiatan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pendidikan, tersedianya sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreatifitas dalam penggunaannya baik oleh guru maupun oleh siswa dapat mencapai tujuan pendidikan.

Tabel 4. 8. Jumlah Tenaga Pengajar menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021

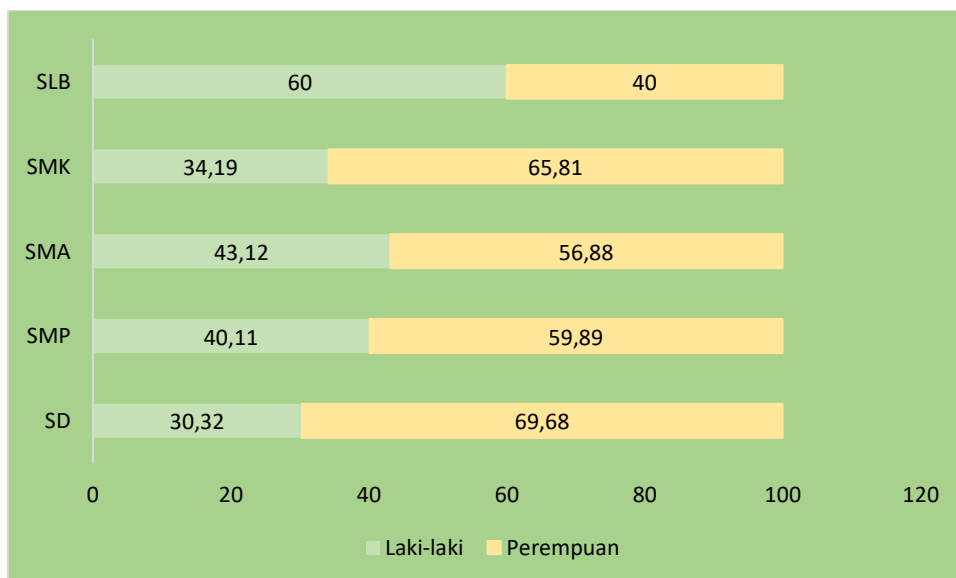
No	Kecamatan	Total			SD			SMP		
		Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pasar Wajo	966	306	660	425	103	322	286	100	186
2	Kapontori	420	143	277	178	61	117	144	42	72
3	Siontapia	314	115	199	141	46	95	98	37	61
4	Lasalimu	257	99	158	115	42	73	89	34	55
5	Lasalimu Selatan	271	114	157	146	54	92	64	36	28
6	Wolowa	183	76	107	75	21	54	55	33	22
7	Wabula	170	64	106	71	22	49	47	20	27
Total		2581	917	1664	1151	349	802	753	302	451
No	Kecamatan	SMA			SMK			SLB		

		Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pasar Wajo	178	78	100	72	22	50	5	3	2
2	Kapontori	70	28	42	28	12	16	0	0	0
3	Siontapia	62	25	37	13	7	6	0	0	0
4	Lasalimu	53	23	30	0	0	0	0	0	0
5	Lasalimu Selatan	39	18	21	22	6	16	0	0	0
6	Wolowa	33	16	17	20	6	14	0	0	0
7	Wabula	52	22	30	0	0	0	0	0	0
Total		487	210	277	155	53	102	5	3	2

Sumber : Dapodikdasmen TA 2021/2022 Semester Ganjil

Jumlah tenaga pengajar di Kabupaten Buton tahun 2021 adalah sebesar 2,581. Semakin tinggi jenjang pendidikan di Kabupaten Buton, semakin sedikit jumlah tenaga pengajar. Jumlah tenaga pengajar pada jenjang pendidikan SD merupakan yang terbesar yaitu sebesar 1,151. Kemudian pada jenjang pendidikan SMP sebesar 753 dan pada jenjang pendidikan SMA sebesar 487. Jumlah tenaga pengajar SMK dan SLB merupakan yang paling sedikit di Kabupaten Buton yaitu masing-masing sebesar 155 dan 5 tenaga pengajar.

Gambar 4. 12. Persentase Tenaga Pengajar menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021



Sumber : Dapodikdasmen TA 2021/2022 Semester Ganjil

Gambar di atas memperlihatkan persentase tenaga pengajar menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Buton tahun 2021. Secara umum, tenaga pengajar di Kabupaten Buton tahun 2021 lebih didominasi oleh perempuan pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, jumlah tenaga pengajar perempuan sebesar 69.68 persen, sisanya 30.32 persen laki-laki. Kemudian pada jenjang pendidikan SMP sebesar 59.89 persen tenaga pengajar adalah perempuan, dan laki-laki 40.11 persennya. Pada jenjang pendidikan SMA, sebesar 56.88 persen tenaga pengajar adalah perempuan dan 43.12 adalah laki-laki. Pada jenjang pendidikan SMK sebesar 65.81 persen tenaga pengajarnya adalah perempuan, dan 34.19 persennya laki-laki, sedangkan tenaga pengajar SLB 40 persen tenaga pengajarnya adalah perempuan dan 60 persennya laki-laki.

Tabel 4. 9. Jumlah Sekolah menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buton, 2021

No	Kecamatan	Total			SD			SMP		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pasar Wajo	55	51	4	34	32	2	11	11	0
2	Kapontori	37	36	1	22	22	0	9	9	0
3	Lasalimu	30	29	1	16	16	0	10	9	1
4	Lasalimu Selatan	29	29	0	19	19	0	6	6	0
5	Siontapina	28	25	3	15	15	0	7	7	0
6	Wabula	12	12	0	7	7	0	3	3	0
7	Wolowa	14	13	1	8	8	0	3	3	0
Total		205	195	10	121	119	2	49	48	1
No	Kecamatan	SMA			SMK			SLB		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pasar Wajo	6	6	0	3	2	1	1	0	1
2	Kapontori	3	3	0	3	2	1	0	0	0
3	Lasalimu	4	4	0	0	0	0	0	0	0
4	Lasalimu Selatan	2	2	0	2	2	0	0	0	0
5	Siontapina	5	2	3	1	1	0	0	0	0
6	Wabula	2	2	0	0	0	0	0	0	0
7	Wolowa	1	1	0	2	1	1	0	0	0
Total		23	20	3	11	8	3	1	0	1

Sumber : Dapodikdasmen TA 2021/2022 Semester Ganjil

Mayoritas sekolah yang terdapat di Kabupaten Buton tahun 2021 adalah sekolah negeri sebesar 195 sekolah dan 10 adalah sekolah swasta, sehingga total terdapat 205 sekolah di Kabupaten Buton yang tersebar di tujuh Kecamatan. Jumlah sekolah paling banyak berada di Kecamatan Pasarwajo yang merupakan ibukota Kabupaten Buton, yaitu sebesar 55 sekolah yang terdiri dari 51 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta, sedangkan jumlah sekolah yang paling sedikit berada di Kecamatan Wabula.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Buton. Terbanyak, jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 121 sekolah yang terdiri dari 119 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Kemudian pada jenjang pendidikan SMP sebesar 49 sekolah yang terdiri dari 48 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA sebesar 23 yang terdiri dari 20 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta. Dan kedua terakhir adalah pada jenjang pendidikan SMK dan SLB yang masing-masing sebesar 11 dan 1 sekolah.

4.6. Mutu Pendidikan

Sekolah merupakan sebuah masyarakat kecil (*mini society*) yang menjadi wahana pengembangan siswa. Aktivitas di dalamnya adalah proses pelayanan jasa. Siswa adalah pelanggan (*customer*) yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pelayanan, bukan bahan mentah (*raw input*) yang akan dicetak menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan lain adalah tenaga profesional yang terus-menerus berinovasi untuk kemajuan sekolah.

Kata mutu seringkali menjadi perdebatan mengenai apa sesungguhnya ”mutu” tersebut. Salah satu definisi bermutu secara etimologis adalah (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb); kualitas (kamus bahasa Indonesia.org/mutu). Mutu pendidikan atau mutu sekolah seringkali tertuju pada mutu lulusan, tetapi mustahil dapat dikatakan bahwa sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, kalau tidak melalui proses pendidikan yang bermutu pula.

Untuk menentukan suatu pendidikan bermutu atau tidak, maka dapat terlihat dari indikator – indikator mutu pendidikan. Indikator mutu pendidikan menurut Sallis dapat terlihat dari dua sudut pandang yaitu sekolah sebagai penyedia jasa

pendidikan (*service provider*) dan siswa sebagai pengguna jasa (*costumer*) yang di dalamnya ada orang tua, masyarakat dan stakeholder pendidikan lainnya.

Indikator mutu dari perspektif *service provider* adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk yang bermutu dilihat dari *output* lembaga pendidikan tersebut. Indikator itu adalah :

- 1) Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *conformance to specification*;
- 2) Sesuai dengan penggunaan atau tujuan atau *fitness for purpose or use*;
- 3) Produk tanpa cacat atau *zero defect*;
- 4) Sekali benar dan seterusnya atau *right first, every time*.

Dalam konteks pendidikan nasional, maka keempat indikator mutu tersebut diatur dalam Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, yaitu: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Penilaian Pendidikan.

Sementara indikator mutu dari perspektif *costumer* adalah:

- 1) Kepuasan pelanggan atau *costumer statisfaction*. Bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau *exceeding costumer expectation*;
- 2) Setia kepada pelanggan atau *delighting the costumer*

Sesuai dengan konsep pendidikan mengatakan bahwa pendidikan adalah layanan jasa maka indikator kepuasan pengguna dapat terlihat dari: *Tangibles* (Penampilan), *Reliability* (respons), *Responsiveness* (handal), *Assurances* (keyakinan), *Empathy* (empati).

Sementara pendapat lain tentang mutu pendidikan adalah suatu gambaran tingkat keberhasilan dari pendidikan yang meliputi *input*, *proses*, dan *output* dan ketiga unsur tersebut sekaligus menjadi Indikator mutu pendidikan yang terkait dengan sistim pendidikan. Indikator *input* meliputi tingkat ketersediaan buku teks, kelayakan guru, kelayakan ruang kelas, dan tingkat ketersediaan perpustakaan sekolah. Indikator *proses* adalah siswa belajar dengan tekun, guru memiliki kompetensi, angka mengulang, angka putus sekolah, peningkatan jam belajar efektif dan waktu efektif dari guru/tutor dalam mengajar, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan meningkatkan peran pengawas sebagai auditor mutu sekolah.

Sedangkan indikator *output* yaitu tingkat prestasi akademik siswa, prestasi sekolah dan presentase kelulusan serta NEM.

Jika pendidikan yang ada sekarang telah memenuhi indikator mutu tersebut di atas, maka dipastikan bahwa pendidikan dapat disebut bermutu. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak dilaksanakan berdasarkan kriteria mutu yang dimaksud, dapat dipastikan bahwa hasil pendidikan yang ada belum dapat dikategorikan sebagai pendidikan yang bermutu. Untuk itu, maka diperlukan upaya-upaya kongkrit untuk mencapai mutu pendidikan sesuai perencanaan yang benar dengan standar nasional yang telah disepakati.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang **rasio perbandingan** untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar, **perbandingan guru terhadap siswa** adalah 1:20. Perhitungan ini kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Dalam pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini akan efektif berlaku 10 tahun sejak UU No 14 Tahun 2005 ditetapkan, yang artinya tahun 2016 sudah mutlak diberlakukan. Aturan ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2016 tentang **Petunjuk Teknis** Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan akan mulai diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2018 (Permendikbud No. 17 tahun 2016 Point A Item No. 5).

Perhitungan rasio murid terhadap guru dan rasio murid terhadap sekolah atau kelas dapat dikategorikan sebagai hasil dari pembangunan program pendidikan, dengan merujuk pada rumus yang telah ditetapkan.

Salah satu cara perhitungan mutu pendidikan yang telah di adopsi adalah dengan melihat rasio murid terhadap guru dan rasio murid terhadap sekolah. Tabel 4.11 dan 4.12. di bawah ini mempresentasikan data yang merupakan salah satu acuan untuk mengetahui mutu pendidikan di Kabupaten Buton.

Tabel 4. 10. Rasio Murid terhadap Guru di Kabupaten Buton, 2021

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pasarwajo	13,18	8,50	12,13	7,79	5,00	11,17
2	Siontapina	14,76	9,43	10,06	8,08	-	11,89
3	Kapontori	10,40	6,67	10,28	6,04	-	8,97
4	Lasalimu selatan	11,05	11,44	18,00	4,23	-	11,59
5	Lasalimu	14,24	8,22	11,51	-	-	11,60
6	Wolowa	10,35	8,22	13,88	4,25	-	9,68
7	Wabula	9,90	7,04	4,35	-	-	7,41
Total		12,39	8,45	11,29	6,54	5,00	10,65

Sumber : Dapodikdasmen TA 2021/2022 Semester Ganjil

Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Buton pada tahun 2021 adalah sebesar 10.65. Menurut jenjang pendidikan, 12.39 pada jenjang pendidikan SD, sebesar 8.45 pada jenjang pendidikan SMP, 11.29 pada jenjang pendidikan SMA, 6.54 pada jenjang Pendidikan SMK, 5.00 pada jenjang Pendidikan SLB. Secara umum, rasio ini berada di bawah angka 20, pada masing-masing jenjang pendidikan maupun kecamatan di wilayah Kabupaten Buton pada 2021. Artinya, jumlah murid yang diajar oleh setiap guru adalah di bawah 20 murid. Sehingga dapat dikatakan rasio murid terhadap guru di Kabupaten Buton baik.

Tabel 4. 11. Rasio Murid terhadap Sekolah di Kabupaten Buton, 2021

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pasarwajo	164,74	220,91	360,00	187,00	25,00	195,95
2	Siontapina	138,73	132,00	124,80	105,00	-	133,36
3	Kapontori	84,14	84,44	240,00	56,33	-	94,59
4	Lasalimu selatan	84,95	122,00	351,00	46,50	-	108,31
5	Lasalimu	102,38	73,20	152,50	-	-	99,33
6	Wolowa	97,00	150,67	458,00	42,50	-	126,50
7	Wabula	100,43	110,33	113,00	-	-	105,00
Total		117,88	129,82	239,13	92,09	25,00	132,50

Sumber : Dapodikdasmen TA 2021/2022 Semester Ganjil

Rasio murid terhadap sekolah di Kabupaten Buton tahun 2021 adalah sebesar 132.50. Pada jenjang pendidikan SD, rasio murid terhadap sekolah adalah sebesar 117.88, kemudian sebesar 129.82 pada jenjang pendidikan SMP, 239.13 pada jenjang pendidikan SMA dan merupakan rasio terbesar diantara jenjang pendidikan lainnya. Hal ini dikarenakan secara umum, jumlah sekolah SMA lebih sedikit dari pada sekolah pada jenjang pendidikan lainnya serta biasanya sekolah SMA lebih banyak berada di wilayah kota. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMK sebesar 92.09, SLB sebesar 25.00.

Jika dilihat menurut kecamatannya, terlihat bahwa rasio murid terhadap sekolah di Kabupaten Buton tertinggi berada di Kecamatan Pasarwajo, yaitu sebesar 195.95.

KESEHATAN DAN KB



Pengertian ‘Kesehatan’ menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah ‘**suatu keadaan fisik, mental dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan**’, dan pada tahun 1986, WHO, dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, mengatakan bahwa pengertian kesehatan adalah ‘**sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup, kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik**’. Sedangkan pengertian ‘kesehatan’ menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dapat dimaknai sebagai ‘**keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis**’.

Kesehatan merupakan salah satu indikator inti kesejahteraan penduduk dan juga menjadi bagian dari komitmen global dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs yang merupakan kelanjutan dari Millinium Development Goals/MDGs. Beberapa target SDGs yang berhubungan dengan kesehatan terdapat pada point ke dua, tiga, ke lima dan ke enam yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia; menjamin kesejahteraan gender serta pemberdayaan seluruh wanita dan perempuan, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.

Pembangunan Kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program prioritas Pembangunan Kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni meningkatkan Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (

Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, di dukung inovasi dan pemanfaatan taknologi.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pendekatan, kebijakan, dan strategi program yang tepat serta sasaran yang jelas. Agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya pembangunan kesehatan diselenggarakan secara terintegrasi sejak dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sasarannya pun difokuskan kepada keluarga, dengan dihidupkan kembali “Pendekatan Keluarga”. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan menuju arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat.

Di lain pihak, indikator kesehatan dapat sekaligus menjadi ukuran dalam menilai suatu keberhasilan program pembangunan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Artinya program di bidang kesehatan diperuntukan kepada semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan dewasa, manusia normal dan yang berkebutuhan khusus tanpa ada perbedaan. Kualitas kesehatan dapat juga diukur berdasarkan indikator status kesehatan, seperti angka kesakitan (*Morbidity Rate*) yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilihat melalui perilaku ; berobat, keluhan sakit, dan kalau berobat dimana tempat berobatnya dan lain-lain.

Beberapa indikator kesehatan yang disebutkan oleh WHO adalah indikator kesehatan yang berhubungan dengan stutus kesehatan masyarakat dan indikator kesehatan yang berhubungan dengan pelayan kesehatan. Indikator kesehatan yang berhubungan dengan status kesehatan masyarakat adalah indikator komprehensif dan indikator spesifik, dimana indikator komprehensif terdiri dari angka kematian kasar menurun, rasio angka mortalitas proporsional rendah, umur harapan hidup meningkat, sedangkan indikator spesifik terdiri dari angka kematian ibu dan anak menurun, angka kematian karena penyakit menular menurun, angka kelahiran menurun. Terdapat juga indikator kesehatan yang berhubungan dengan

pelayanan kesehatan, yaitu rasio antara pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk seimbang, distribusi tenaga kesehatan merata, informasi lengkap tentang fasilitas kesehatan, informasi tentang sarana pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain.

Selain itu, hal pokok yang diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada masyarakat miskin termasuk perempuan. Perluasan pelayanan kesehatan dengan menggunakan pelayan kesehatan masyarakat sebagai salah satu pelayanan publik. Pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan isu gender dalam hal ‘siapa yang dapat akses dan siapa saja yang berhak mendapatkan kesempatan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan masyarakat Sulawesi Tenggara, tidak terkecuali Buton. Pembangunan kesehatan di Buton sebagai bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Tenggara telah dicanangkan melalui rencana strategis dengan visi dan misi sebagai berikut : visi pembangunan kesehatan adalah untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang mandiri untuk hidup sehat. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut ;

1. Misi 1; meningkatkan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan
2. Misi 2; meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas
3. Misi 3; meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
4. Misi 4; meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka program kesehatan telah dikembangkan dengan tujuan menitik beratkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Beberapa indikator kesehatan yang menjadi dasar keberhasilan pembangunan kesehatan dan derajat kesehatan perempuan menjadi salah satu indikator inti kesehatan secara umum dapat diukur melalui ketersediaan fasilitas pelayan kesehatan, tenaga kesehatan, terutama bidan. Selain itu, indikator inti lainnya yaitu rata-rata angka harapan hidup, jumlah akseptor KB, serta angka kematian bayi dan balita yang secara langsung terkait dengan tingkat kesehatan ibu.

5.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan AHH dihitung dari hasil sensus dan survey kependudukan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu dari indikator derajat kesehatan selain angka kesakitan, dan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

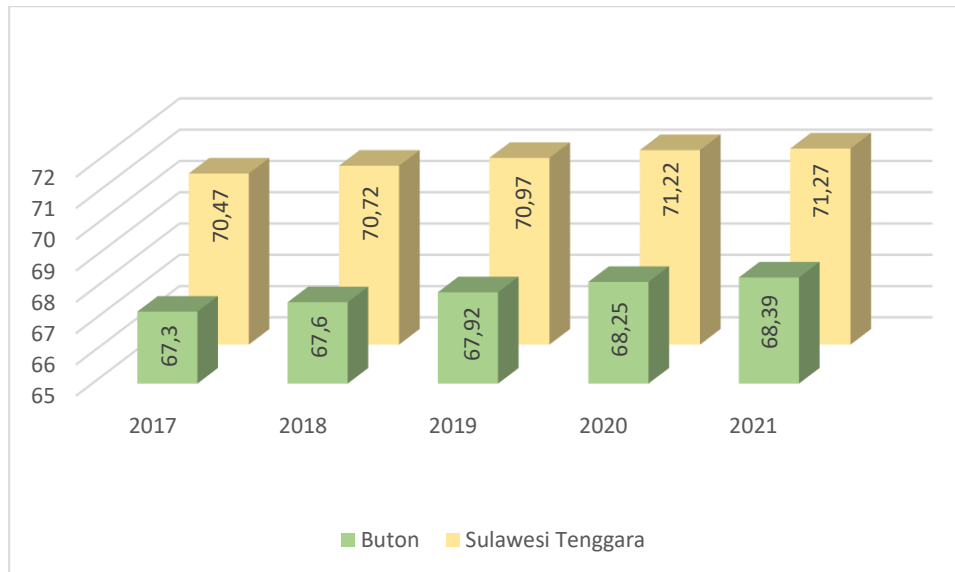
Komplikasi kesehatan Modern yang terus dihadapi mayoritas penduduk Indonesia ternyata tak berpengaruh terhadap usia penduduk. Hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan justru menunjukkan angka harapan hidup dari tahun ke tahun semakin meningkat. Secara umum adanya peningkatan harapan hidup beberapa tahun terakhir disebabkan karena peningkatan kondisi kesehatan, berkurangnya kesuburan, serta perubahan pola dalam usia hidup di dunia. Hal ini telah menyumbangkan terjadinya pertambahan usia harapan hidup baik perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan estimasi AHH penduduk Indonesia (laki-lai dan perempuan) naik dari 67,8 tahun pada 2000-2005 menjadi 73,6 tahun pada periode 2020-2025. Pada perempuan, angka harapan hidup lebih lama dan bisa lima tahun lebih tinggi.

Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menyebabkan bertambahnya populasi penduduk lansia, yaitu penduduk di atas 60 tahun. Pada tahun 2000, jumlah penduduk lansia di Indonesia hanya 5,3 juta dan angka ini meningkat tajam menjadi 24 juta pada 2010. Jika dibandingkan AHH Kabupaten Buton dan Provinsi Sulawesi Tenggara maka level Kabupaten Buton dibawah level Sulawesi Tenggara yaitu 68.39 Kabupaten Buton dan 71,27 tahun untuk AHH Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara AHH masyarakat Kabupaten Buton juga lebih rendah

dibandingkan dengan angka nasional yaitu 71,6 tahun. Untuk jelasnya angka tersebut terlihat dalam Gambar 5.1. berikut ;

Gambar 5. 1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Buton, 2017 - 2021



Sumber: BPS

Berdasarkan data pada Gambar 5.1. di atas terlihat bahwa secara umum trend AHH baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dari periode 2010 hingga 2018. Meskipun peningkatan tidak terlalu tinggi, akan tetapi tetap menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Buton telah berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Besaran AHH menunjukkan adanya perbedaan level capaian antara AHH perempuan dan laki-laki. Level AHH penduduk laki-laki lebih rendah sekitar empat tahun dibanding level AHH penduduk perempuan.

Data statistik di atas menunjukkan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Perbedaan level atau gap yang terjadi pada AHH perempuan dan laki-laki merupakan fenomena yang umum dan fenomena ini disebabkan karena beberapa faktor, terutama faktor biologis dan gaya hidup. Beberapa hasil penelitian menemukan paling tidak ada lima alasan mengapa perempuan mempunyai umur harapan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

1. Perempuan lebih kuat di dalam kandungan

Secara teori, faktor biologis laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan saat dilahirkan. Selain itu perkembangan secara fisik laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan sebelum lahir. Hal itulah yang menyebabkan laki-laki lebih beresiko meninggal dunia jika lahir premature karena perkembangan belum sempurna, misal pada paru-paru dan otak. Disamping itu, sejak lahir perempuan dibekali sepasang **kromosom X mengandung sekitar 1100 gen** yang berperan penting dalam pengaturan hormone. Kromosom X juga dalam fungsi vital tubuh lainnya, mulai dari pembekuan darah, metabolisme dan perkembangan janin. Sedangkan **kromosom Y pada laki-laki hanya mengandung kurang dari 100 gen**, dimana fungsi utamanya untuk pembentukan dan perkembangan testes dan hormonalnya. Oleh karena itu, secara biologis wanita lebih mampu bertahan hidup dibandingkan dengan laki-laki, terutama pada tahun pertama kehidupan. Faktor biologis lainnya adalah *hormone estrogen* yang dimiliki perempuan menjadi salah satu pelindung alami dari perkembangan penyakit jantung, dan perubahan kondisi tubuh perempuan sepanjang hidupnya. Perubahan kondisi tubuh dari menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menopause membuat tubuh perempuan secara internal lebih ‘tahan banting’. Sebaliknya, *hormon testosteron* yang dimiliki laki-laki cenderung mendorong aktifitas yang lebih beresiko seperti kebiasaan merokok sehingga berpengaruh pada keselamatan hidupnya.

2. Perempuan penuh perhitungan

Pada alasan ini disebutkan, perempuan memiliki lobus frontal otak yang berkembang lebih cepat dari pada laki-laki. Keadaan fisik ini berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko perhitungan, sehingga perempuan tidak mudah terkena cedera yang tak disengaja. Sebaliknya, cedera ini malah menjadi penyebab utama ketiga kematian pada laki-laki, dan hanya menjadi penyebab kematian keenam pada wanita.

3. Perempuan lebih kuat hadapi penyakit jantung

Penyakit jantung menjadi pembunuh nomor wahid dan data menunjukkan kecenderungan perkembangan penyakit ini dan risiko meninggal paling cepat

pada usia 30-an dan 40-an, dimiliki laki-laki. Sebaliknya, perkembangan penyakit jantung pada wanita terjadi 10 tahun lebih lama, hingga masa menopause. Hal ini disebabkan karena wanita memiliki hormon estrogen yang membuat arteri lebih kuat dan fleksibel.

4. Sifat sosial perempuan lebih kuat

Kebiasaan seorang perempuan untuk mengungkapkan kekhawatiran melalui curhat atau berbicara kepada orang lain, ternyata berdampak baik pada tingkat harapan hidup. Karena kebiasaan untuk memiliki hubungan sosial yang kuat itu, perempuan dapat mengurangi resiko meninggal hingga 50%. Selain itu, budaya menunjukkan bahwa kalau perempuan stress bisa tersalurkan dengan cara menangis, berkeluh kesa dan sebagainya. Sedangkan laki-laki pantang menangis, pantang berkeluh kesah, ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat sehingga pada saat stress, sistem hormon menghantam organ-organ di dalam tubuhnya. Namun, hal ini tentu berbeda di banding seseorang dengan ikatan sosial yang rendah. Alasan ini juga menjadi alasan bahwa tingkat harapan hidup perempuan lebih tinggi, karena laki-laki cenderung menahan rasa kekhawatiran. Kabar baiknya, laki-laki yang sudah menikah cenderung memiliki hidup lebih sehat dan hidup lebih lama.

5. Perempuan lebih sering menjaga kesehatan

Beberapa perempuan menunjukkan, perempuan lebih memperhatikan kesehatan di bandingkan dengan laki-laki. Presentasinya, laki-laki lebih sedikit mengunjungi dokter dalam waktu tertentu di bandingkan perempuan. Dari segi aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas di luar di bandingkan dengan perempuan. Padatnya aktivitas kerja yang di lakukan tentu berpotensi “mendatangkan” berbagai macam resiko, seperti stress, depresi, lingkungan yang tidak sehat, obesitas hingga ke penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Pekerjaan yang beresiko seperti sopir, pekerja bangunan, dan lain-lain lebih banyak di lakukan oleh laki-laki. Akibatnya resiko kecelakaan kerja juga lebih banyak di alami laki-laki di bandingkan perempuan. Hal ini membuat laki-laki tidak berkesempatan menjaga kesehatanya di bandingkan dengan perempuan.

Argument di atas sebenarnya ini merupakan suatu ketimpangan yang terjadi di masyarakat, dan seharusnya bisa di kurangi pada masa-masa mendatang terutama yang menyangkut gaya hidup dan kebiasaan yang mendatangkan resiko kesehatan jangka panjang. Beberapa pembuktian bahwa perempuan rentan meninggal dunia pada masa-masa kehamilan dan melahirkan, meskipun angka harapan hidupnya lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki.

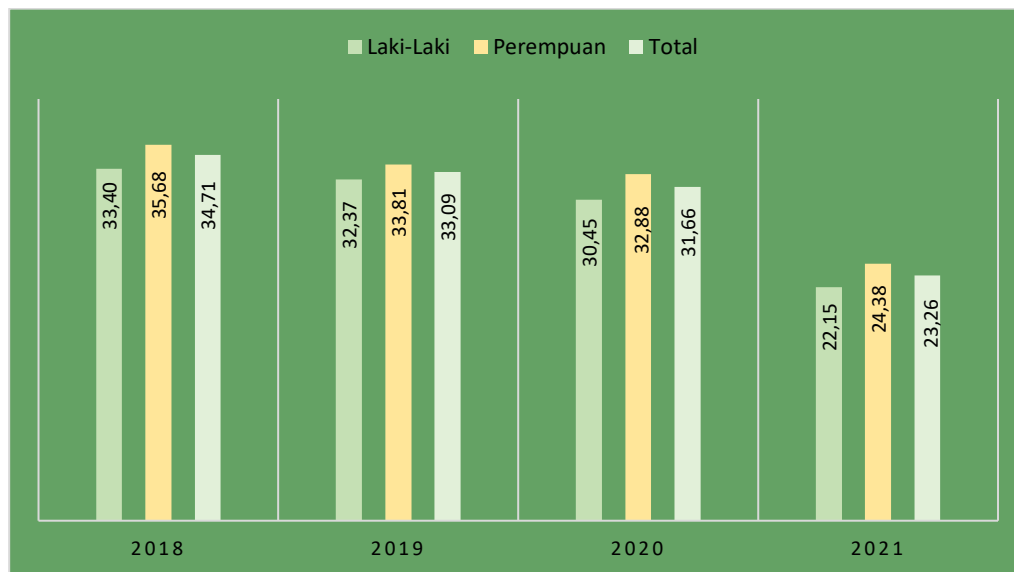
5.2. Kondisi Kesehatan

Gambaran umum mengenai kondisi kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar keluhan Kesehatan di daerah tersebut. Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam susenas, Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/sesak napas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll.

Kemudian merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, apabila gangguan/keluhan Kesehatan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya maka termaksud dalam morbiditas tersebut, terdapat penduduk yang melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan. Pengobatan yang dimaksud dapat berupa berobat jalan maupun rawat inap.

Berdasarkan gambar dibawah, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada 2019 adalah 33.04 angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 34.71 persen. Kemudian pada tahun 2020, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 31,66 persen. Angka ini turun pada tahun 2021 menjadi 23.26 persen. Persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki 24.38 persen dan 22.15.

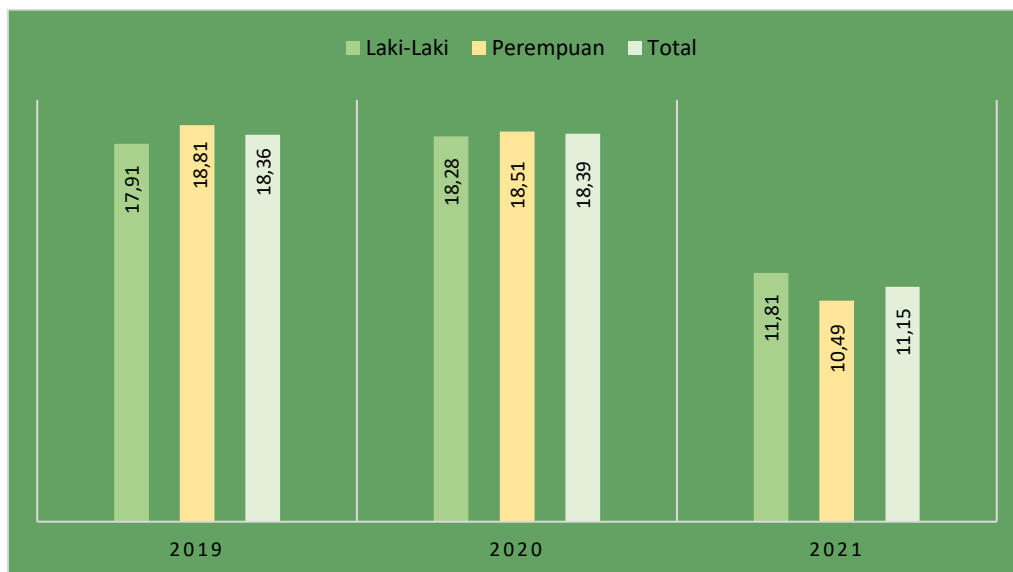
Gambar 5. 2. Persentase Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2018 – 2021



Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2018 lebih besar pada penduduk perempuan. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2021, terjadi perubahan yaitu persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih besar jika dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan.

Angka morbiditas di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 11,15 persen angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 18,39 persen. Sama halnya dengan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, angka morbiditas Kabupaten Buton tahun 2021 untuk penduduk laki-laki lebih besar yaitu 11,81 persen jika dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu 10,49 persen. Pada tahun 2021 angka morbiditas penduduk laki-laki mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini sama dengan angka morbiditas penduduk perempuan yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.3.

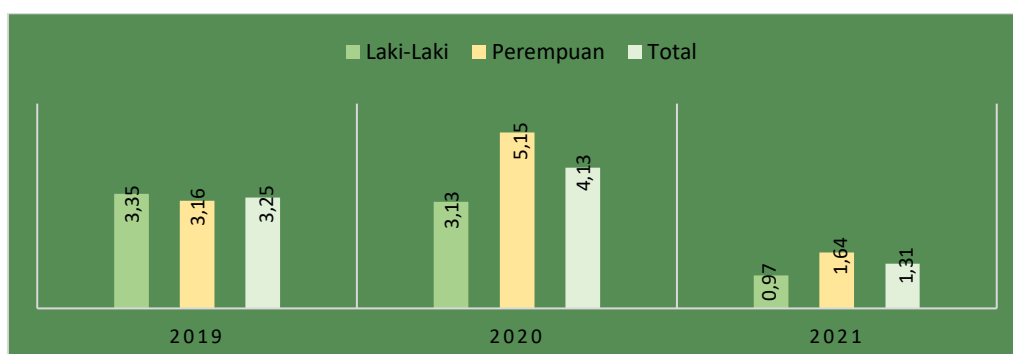
Gambar 5. 3. Angka Kesakitan Penduduk Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2019 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

Besaran angka kesakitan laki-laki yang lebih dari pada penduduk perempuan menunjukkan bahwa laki-laki lebih rentan terkena penyakit dibandingkan perempuan. Kondisi ini bisa saja terjadi dikarenakan pola hidup dan aktifitas yang lebih sehat dibandingkan laki-laki. Selain itu, laki-laki biasanya melakukan kegiatan yang lebih berat dan lebih sering berada di lingkungan yang kurang sehat dibandingkan dengan perempuan. Sehingga perempuan mampu menjaga kesehatannya dengan lebih baik.

Gambar 5. 4. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Kabupaten Buton, 2019 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2019-2021, BPS

Sedangkan untuk persentase penduduk yang pernah rawat inap setahun terakhir pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,31 persen jika dibanding tahun 2020 yang hanya 4,13 persen. Persentase penduduk yang pernah rawat inap sejak tahun 2019 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Sementara jika dilihat dari jenis kelaminnya, persentase penduduk laki-laki yang pernah rawat inap tahun 2021 sedikit berkurang yaitu 0,97 persen jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 3,13 persen.

Sementara itu persentase penduduk perempuan yang pernah rawat inap setahun terakhir menurun jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 5,15 dan 1,64 pada tahun 2021. Menurunnya persentase penduduk yang pernah rawat inap ini mengindikasikan bahwa penduduk mulai paham akan pentingnya mengobati penyakit di saran kesehatan dan tidak melakukan pengobatan sendiri.

5.3. Angka Kematian Ibu

Angka kematian Ibu (KIA) merupakan salah satu indikator inti untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu *good health and well-being* meningkatkan kesehatan ibu, dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2035 adalah mengurangi sampai $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Data yang dilansir UNDP Indonesia (UNDP 2017) menunjukkan adanya penurunan AKI hingga 45 persen di seluruh dunia. Namun demikian, di negara yang sedang berkembang masih terdapat ratusan perempuan meninggal saat hamil atau akibat komplikasi saat melahirkan, hanya 56 persen kelahiran dipedesaan dibantu oleh tenaga kesehatan profesional.

Data kementerian kesehatan (kemenkes), pada 2015 tercatat ada 305 ibu meninggal per 100 ribu orang. Penyebab tingginya angka kematian pada ibu di dipengaruhi status kesehatan dan gizi yang rendah. Kemudian di jelaskan pula bahwa terdapat sekitar 28,8 persen ibu hamil menderita anemia yang biasa di sebabkan karena faktor gizi dan asupan makanan yang kurang.

AKI berkorelasi dengan angka kematian bayi (AKB) dan sebagai upaya meminimalkan faktor risiko keduanya, para ibu hamil di himbau melakukan pemeriksaan berkala secara rutin setiap bulan dan minimal empat kali selama masa kehamilannya. Tujuan lainnya pentingnya kunjungan persalinan atau nate natal care

adalah cara dapat mengetahui faktor risiko kelainan atau penyakit yang dapat meningkatkan risiko kematian saat persalinan.

Intervensi pemerintah untuk masalah ini di mulai dari ibu hamil saat di periksa secara rutin sebagai rangkaian pelayanan antenatal secara terpadu. Setiap ibu hamil di berikan stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan (P4K) untuk di tempel di rumah dan buku kesehatan ibu dan anak sebagai panduan atau sebagai buku kontrol. Setiap ibu hamil akan tercatat, terdata, dan terpantau. Stiker itu berisi data ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi yang di gunakan, dan calon donor darah. Untuk mendapatkan pelayanan paripurna, ibu hamil di dorong menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN). Namun sayangnya, survey indikator kesehatan nasional (sirkesnas) 2016, cakupan ibu hamil yang memeriksa kehamilannya dan bersalin di fasilitas kesehatan baru sekitar 74,7 persen. masih ada 25,3 persen ibu yang janinya tumbuh dan berkembang tidak terpantau oleh tenaga kesehatan. Kemungkinan besar 25,3 persen inilah yang berkontribusi sangat tinggi untuk kematian ibu.

Di samping faktor kesehatan, kemenkes mencatat persalinan pada usia muda turut menyumbang tingginya AKI. Kurang lebih 46,7% perempuan menikah di usia 10-19 tahun dan data inilah mengakibatkan kehamilan pada usia muda. Pada ibu yang melahirkan di bawah usia 19 tahun, risiko kematiannya bisa meningkatkan karena rahimnya belum siap. Sementara, usia ideal melahirkan pada perempuan ialah 23 tahun.

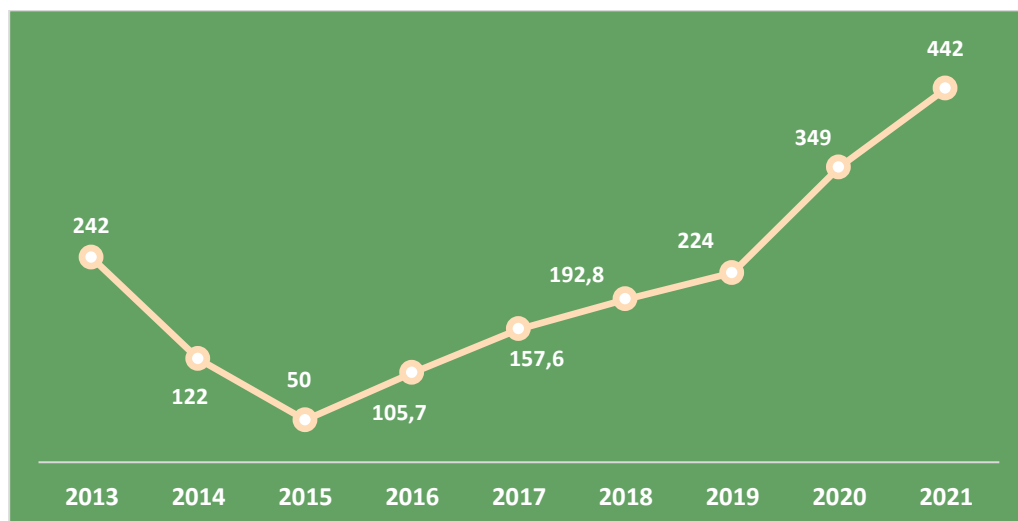
Hal yang terpenting menjadi program program promosi kesehatan ibu dan anak kedepan adalah ketika memasuki usia pra-nikah, perlu persiapan konseling dan pendidikan kesehatan produktif dan kesehatan seksual di sekolah-sekolah agar mereka paham. Sehingga memasuki usia hamil, mereka sudah siap dan bisa melahirkan generasi yang sehat.

Di kabupaten buton, kasus kematian ibu yang di laporkan oleh bidan desa berfluktuatif, namun trennya menurun jika di lihat dari tahun 2013 ke tahun 2015. Pada tahun 2013 jumlah kasus kematian ibu yang di laporkan sebanyak 242 per 100.000 kelahiran hidup kemudian menurun menjadi 50 pada tahun 2015 akan tetapi data AKI pada enam tahun terakhir meningkat menjadi 106, 158, 192,8, dan

224,349,442 pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019,2020 dan 2021. Dengan demikian, angka kematian ibu yang di hitung per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Buton data tahun 2013 hingga 2021 dapat di katakan menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi pada enam tahun terakhir AKI mengalami peningkatan.

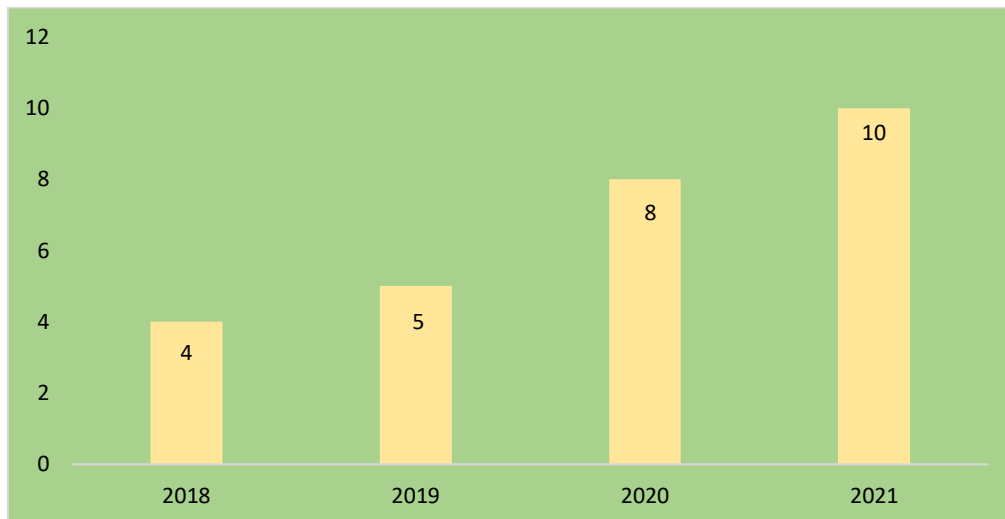
Jika di bandingkan dengan target AKI provinsi yang termuat dalam renstra pembangunan kesehatan provinsi Sulawesi tenggara tahun 2008 sampai 2013, serta kesepakatan global (MCD's/Millennium Development Goals) yang menargetkan AKI pada angka 105 per 100.000 kelahiran hidup, maka kabupaten Buton sempat mencapai target tersebut pada tahun 2015 namun pada enam tahun terakhir AKI di Kabupaten Buton tidak dapat mencapai target. untuk lebih jelasnya data tersebut di sajikan pada gambar 5.5. berikut:

Gambar 5. 5. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Buton, 2013 -2021



Angka kematian ibu dari tahun 2013 mengalami penurunan hingga di tahun 2015, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021. Kenaikan angka kematian ibu pada enam tahun terakhir cukup mengkhawatirkan. Angka kematian ibu di tahun 2015 yaitu 50 dan mengalami peningkatan menjadi delapan kali lipat angka kematian ibu pada tahun 2021 yaitu 442. Namun dapat juga di sebabkan meningkatnya pelaporan kasus kematian khususnya terkait kematian ibu hamil, sehingga jumlah kasus yang di laporkan meningkat. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait masa kehamilan, melahirkan dan nifas.

Gambar 5. 6. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Buton, 2018 – 2021



Sumber: Profil Kesehatan kabupaten Buton Tahun 2021

Berdasarkan gambar 5.6 jumlah angka kematian ibu di Kabupaten Buton tahun 2021 menunjukkan bahwa lima tahun terakhir jumlah angka kematian ibu semakin meningkat, di mana pada tahun 2017 sebanyak 3 orang, tahun 2018 sebanyak 4 orang, tahun 2019 sebanyak 5 orang, tahun 2020 sebanyak 8 orang, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 10 orang. Terdapat beberapa hal yang mungkin mengakibatkan meningkatnya jumlah kematian ibu melahirkan ini, antara lain yaitu kondisi wilayah yang terpencil, sarana transportasi dan fasilitas kesehatan yang masih terbatas menyebabkan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang ada relatif sulit dan jauh. Semua kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kontak masyarakat terutama ibu hamil dengan tenaga kesehatan (bidan, dokter) dan cenderung melahirkan dengan bantuan tenaga non kesehatan, sehingga bila ada kelainan pada kehamilan menjadi tidak terdeteksi sejak dini, hal ini menjadi masalah serius bila terjadi komplikasi kehamilan atau kondisi persalinan membutuhkan rujukan. Alasan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPPEDA Prov. Sultra dan LPPM UHO tahun 2018 tentang Dampak Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) memaparkan bahwa sebagian masyarakat masih memilih dukun sebagai penolong persalinan walaupun fasilitas sudah disediakan pemerintah seperti rumah tunggu dan uang transportasi.

5.4. penyebab Kematian Ibu

Kematian ibu (*maternal death*) menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua penyebab yang terkait atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Departemen Kesehatan (2011) mengemukakan faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu yang terkait dengan kehamilan dan persalinan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua alasan yaitu penyebab langsung atau tidak langsung ;

- **Penyebab langsung** : berhubungan dengan komplikasi obstetric selama masa kehamilan. Persalinan dan masa nifas (post-partum). Mayoritas penyebab kematian ibu adalah penyebab langsung.
- **Penyebab tidak langsung** : diakibatkan oleh penyakit yang telah diderita ibu, atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan tidak ada kaitannya dengan penyebab langsung obstetrik, tapi penyakit tersebut diperberat oleh efek fisiologik kehamilan.

Secara umum, jumlah kematian ibu dalam masa nifas lebih tinggi jika dibandingkan dengan kematian pada masa kehamilan dan bersalin. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor utama, seperti deteksi resiko kehamilan tidak maksimal, keterlambatan penanganan kegawatdaruratan ibu bersalin, penanganan masalah pada masa nifas, keterbatasan sarana prasarana di fasilitas kesehatan serta faktor social budaya masyarakat.

Di Kabupaten Buton tahun 2021 jumlah angka kematian ibu menurut penyebab kematian yaitu 2 orang mengalami pendarahan, infeksi 1 orang dan 7 orang lainnya disebabkan lain-lain.

Tabel 5. 1. Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Buton tahun 2021

Jumlah Kematian Ibu Hamil			Jumlah Kematian Ibu Bersalin			Jumlah Kematian Ibu Nifas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
< 20 tahun	20-35 tahun	>35 tahun	< 20 tahun	20-35 tahun	>35 tahun	< 20 tahun	20-35 tahun	>35 tahun
0	2	0	0	3	0	0	5	0

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Untuk Kabupaten Buton terdapat 10 kasus kematian ibu yang terjadi pada ibu melahirkan, bersalin dan nifas. Kasus kematian ibu ini terjadi pada kelompok umur 20 sampai 35 tahun sedangkan kelompok umur kurang dari 20 tahun dan kelompok umur lebih dari 35 tahun tidak ada (0 orang).

Hasil penelitian pusat studi Gender (2013) menemukan bahwa banyak ibu hamil datang memeriksakan kehamilannya pada usia kehamilan yang sudah tua. Terutama pada kehamilan pertama karena mereka tidak berpengalaman dan kemungkinan tidak memahami pentingnya memeriksakan kandungan sedini mungkin. Temuan yang lain karena mereka tidak mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan, hal ini menjadi bukti betapa buruknya pelayanan ANC yang di lakukan selama ini.

Kasus kematian ibu melahirkan sebenarnya dapat diminimalisir dan harus di mulai dari ibu hamil sendiri bersama suaminya dengan memeriksakan kehamilannya sedini mungkin. Di sisi lain, tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan harus melakukannya secara professional serta keterlibatan dukun dalam menolong persalinan dapat di minimalisir, terutama dalam melakukan prakteknya untuk memberikan pertolongan persalinan. Langkah-langkah tersebut dapat menurunkan kasus-kasus kematian ibu melahirkan yang di sebabkan karena adanya pendarahan, eklampsia, infeksi, dan lain sebagainya.

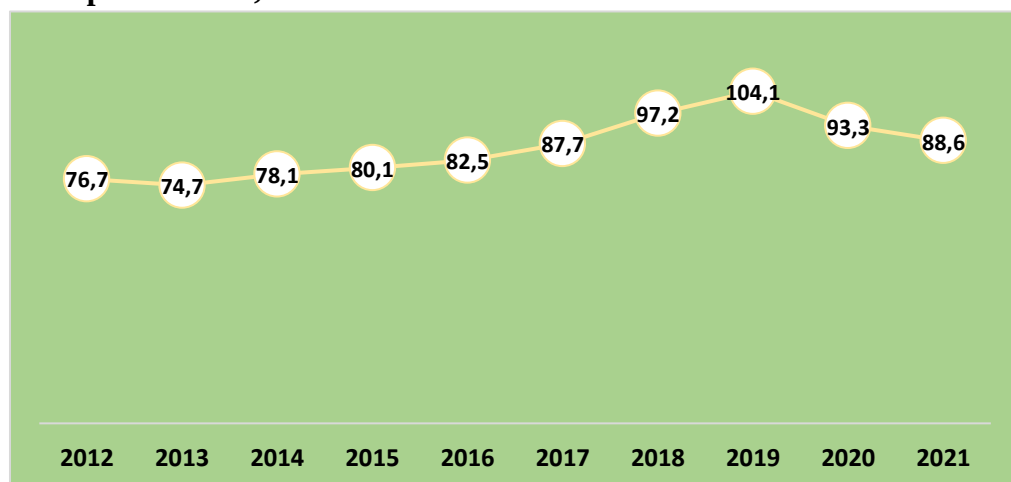
Selain itu, pemberdayaan kader posyandu juga harus menjadi perhatian yang serius, karena posyandu merupakan ujung tombak pelayanan ANC yang selama ini masih kurang mendapat perhatian. Meskipun di pahami bahwa posyandu adalah milik masyarakat dan penggeraknya juga masyarakat, akan tetapi pemerintah berkewajiban untuk memberikan dorongan dan support kepada kader posyandu secara maksimal. Misalnya memberikan program-program peningkatan kapasitas,

komunikasi dua arah antara kader dan tenaga bidan yang berkoordinir posyandu serta mengajak seluruh masyarakat untuk peduli ibu hamil yang ada di daerah masing-masing. Jika intervensi seperti ini sudah dilakukan, maka dengan sendirinya AKI dapat ditekan. Untuk itu, sangat diperlukan pengawasan secara berjenjang mulai dari pemerintah sampai kepada masyarakat.

Target lain yang ingin dicapai terkait dengan KIA adalah meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan ibu dan anak, khususnya kesehatan menjelang dan selama kehamilan sampai melahirkan, perawatan masa nifas, dan turut menyehatkan balitanya melalui Air Susu Ibu (ASI).

Angka kematian bayi dan angka kematian ibu dapat juga dipengaruhi oleh faktor penolong persalinan yang bukan tenaga medis. Akan tetapi jika dilihat dari gambar berikut, maka gambar di Buton sedikit bertolak belakang dengan argument di atas. Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2021 sudah cukup tinggi yaitu 2,135 atau 88,6 persen dari sasaran ibu bersalin. Artinya sudah banyak yang melakukan pemeriksaan kehamilan dan proses persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Data ini menunjukkan bahwa dinas kesehatan dan rumah sakit, seharusnya bersinergi dan mempunyai sistem pencatatan yang sama.

Gambar 5. 7. Persentasi Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Buton, 2012-2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Berdasarkan Gambar 5.7. diatas, persentase persalinan yang di bantu oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Buton dari tahun 2012 hingga 2019 selalu naik tiap tahun dan menurun pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020, persentase cakupan persalinan oleh tenaga medis di Kabupaten Buton menurun yaitu 93.3 persen dan menurun Kembali tahun 2021 menjadi 88.6 persen. Hal ini di sebabkan oleh dampak pandemic covid, sehingga beberapa ibu hamil tidak mau melahirkan di tolong oleh tenaga kesehatan karena takut akan di lakukan tes rapid. Tetapi jika berdasarkan dokumen Renstra Kementrian Kesehatan Indonesia yang menargetkan 90 persen persalinan di fasilitasi kesehatan, maka Kabupaten Buton belum mencapai target.

Selain pandemi covid, keterlibatan dukun beranak dan anggota keluarga pada persalinan sudah menjadi pemandangan umum karena beberapa alasan, antara lain; 1) letak geografi dan lingkungan yang jauh dari tempat pelayanan kesehatan. Kasus banyak di temukan di kabupaten-kabupaten yang masih termaksud daerah tertinggal dan jangkauan darat sulit, terutama daerah pulau-pulau terpencil yang jarak tempuhnya dengan transportasi laut. Kasus seperti ini, sudah pasti dukun beranak dan keluarga menjadi penolong pertama pada kehamilan.

Hasil penelitian lain menemukan bahwa konsep tiga terlambat (3T) dan empat terlalu (4T) masih mendominasi sebagai akibat kematian ibu, bayi dan balita. Tiga terlambat adalah; 1) terlambat mengenal tanda-tanda bahaya kehamilan; 2) terlambat di bawah ke pelayanan kesehatan; 3) terlambat dilayani di tempat pelayanan kesehatan. Sementara 4T meliputi; 1) terlalu muda untuk melahirkan; 2) terlalu tua untuk melahirkan; 3) terlalu sering melahirkan; 4) terlalu banyak anak. Faktor-faktor tersebut di dominasi oleh faktor budaya, tradisi atau kebiasaan yang sudah berakar di dalam masyarakat.

Meskipun pemerintah telah melakukan intervensi untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat 3T dan 4T, akan tetapi kenyataanya belum sepenuhnya mencapai target yang telah di tentukan, yaitu menurunkan AKI sampai 102 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk itu, masih perlu penelusuran lebih mendalam faktor-faktor penyebab lainnya sebagai pemicu tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita dan sekaligus membuat grand strategi untuk

menurunkan AKI di Buton. Misalnya program *life saving strategy* kemungkinan dapat menjadi solusi bagi daerah-daerah kepulauan untuk hal-hal yang emergency.

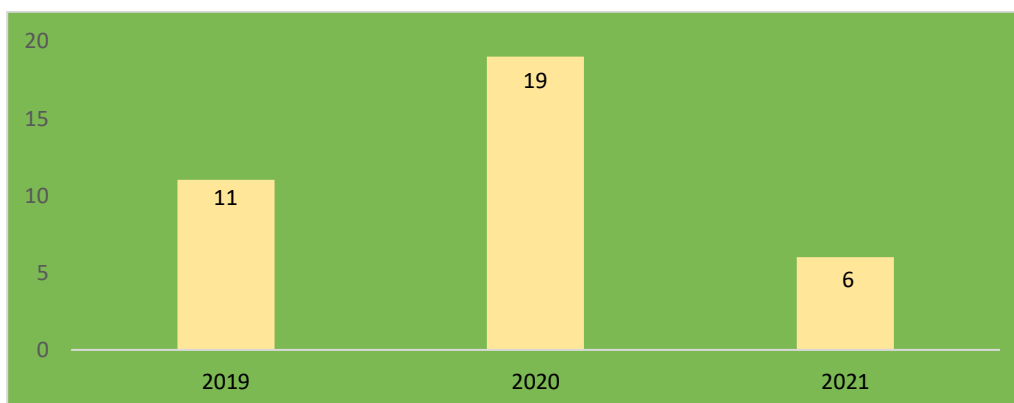
5.5. Kesehatan Anak

Upaya kesehatan anak antara lain di harapkan untuk mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak adalah Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Untuk mencapai target penurunan AKB pada MDGs 2018 yaitu sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup maka peningkatan akses dan kualitas pelayan bagi bayi baru lahir (neonatal) menjadi prioritas utama.

5.5.1 Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Pada umumnya di sebabkan oleh faktor-faktor yang di bawah anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat kontrasepsi atau di dapat selama kehamilan. Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat di manfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil.

Gambar 5. 8. Jumlah Kematian Neonatal Kabupaten Buton, 2019-2021

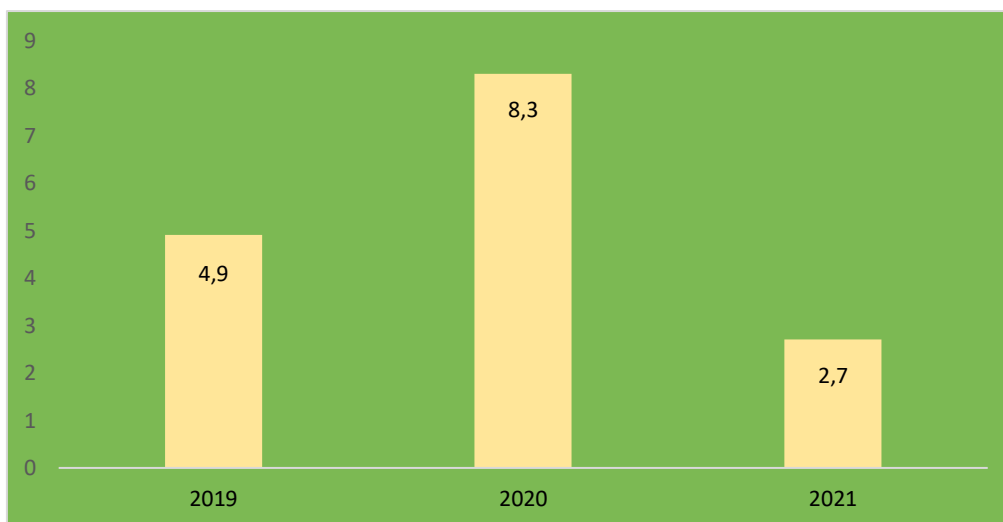


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Gambar 5.8 di atas menunjukkan bahwa kematian neonatal di kabupaten buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2019 terdapat 11 orang dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 19 orang kemudian tahun 2021 menurun menjadi 6 orang. Keberhasilan ini menjadi hasil kerja bersama serta perlunya tanggungjawab Bersama sehingga diharapkan upaya penurunan kematian neonatal harus lebih ditingkatkan karena kematian bayi terbesar cenderung terjadi dimasa neonatal sehingga kualitas kunjungan neonatal dan penanganan kegawatdaruratan harus ditingkatkan.

Untuk mengetahui besaran masalah dari kasus kematian neonatal di perlukan Angka Kematian Neonatal (AKN), yaitu jumlah kematian neonatal dalam setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal di Kabupaten Buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar 5.10.

Gambar 5. 9. Jumlah Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Buton, 2019-2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Gambar 5.9 menunjukkan bahwa jumlah kematian neonatal di kabupaten buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2019 terdapat 4.9 AKN/1.000 KH dan meningkat ditahun 2020 sebanyak 8.3 AKN/1.000 KH kemudian tahun 2021 menurun menjadi 2.7 AKN/1.000 KH. Bila dibandingkan dengan target RPJMN yaitu sebesar 10 AKN/1.000 KH, maka dapat di katakana bahwa kabupaten buton telah memenuhi target

tersebut. Namun demikian kita harus berupaya lebih untuk dapat mencapai menurunkan angka kematian.

5.5.2. Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap di gunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu Negara.

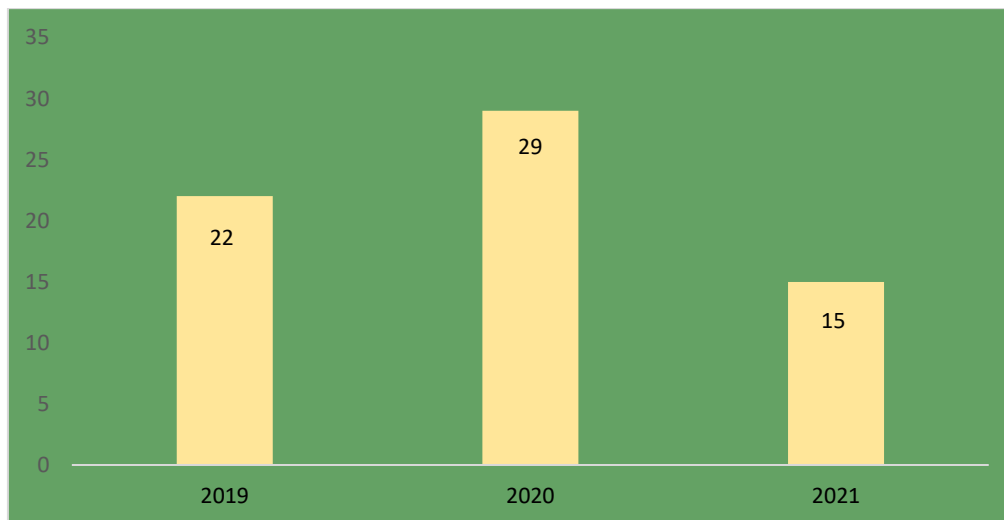
Berdasarkan data perserikatan bangsa-bangsa (PBB), angka kematian bayi di indonseia pada 2019 lalu adalah 21,12. Angka ini menurun dari catatan pada 2018 ketika angka kematian bayi di Indonesia masih mencapai 21,86 atau pada 2017 yang mencapai 22,62.

Menurunya angka kematian bayi di indonseia banyak di pengaruhi oleh meningkatnya penyediaan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Hal ini diikuti dengan menurunnya penyakit infeksi dan meluasnya cakupan imunisasi pada bayi. Meski terus mengalami peningkatan yang signifikan, angka kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi di banding Negara Asia Tenggara lainnya.

Angka kematian bayi (AKB) dikabupaten buton dihitung berdasarkan laporan rutin bidan desa setiap bulannya dan laporan evaluasi akhir tahun puskesmas sehingga masih terdapat kemungkinan ada kematian bayi yang tidak dilaporkan. Untuk mendapatkan angka kematian bayi yang sebenarnya terjadi dimasyarakat masih memerlukan survey khusus.

Gambar 5.10 di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi di kabupaten Buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2019 terdapat 22 orang kemudian meningkat tahun 2020 sebanyak 29 orang dan menurun pada tahun 2021 menjadi 15 orang. Secara umum jumlah kematian bayi pertahunnya masih relative tinggi. Sehingga dengan demikian upaya penurunan kematian bayi tetap harus ditingkatkan karena kematian bayi terbesar cenderung terjadi di masa neonatal sehingga kualitas kunjungan bayi dan penanganan kegawatdaruratan harus ditingkatkan.

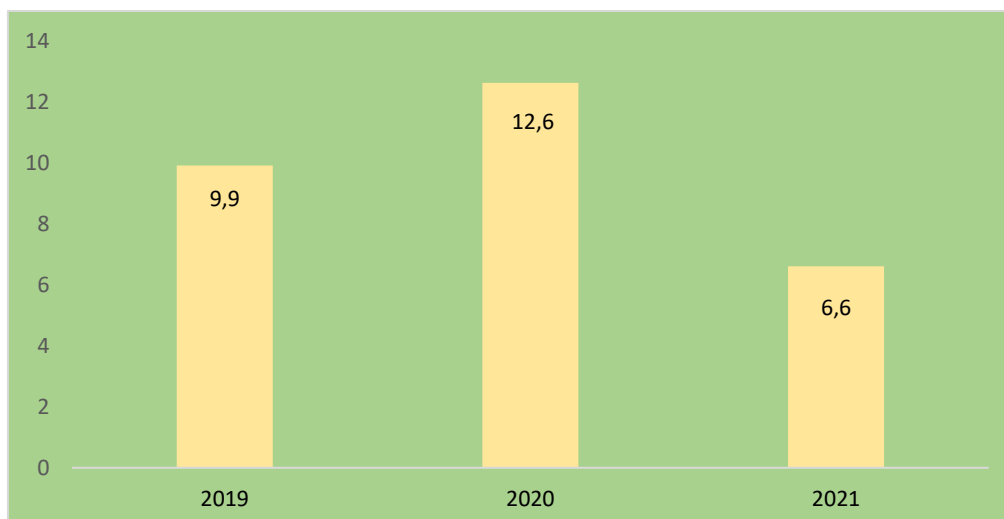
Gambar 5. 10. Jumlah kematian bayi kabupaten buton, 2019-2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Untuk mengetahui besaran masalah dari kasus kematian bayi di perlukan angka kematian bayi, yaitu jumlah bayi yang meninggal berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka kematian bayi di kabupaten buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar 5.11.

Gambar 5. 11. Angka kematian bayi (AKB) kabupaten buton, 2019-2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Gambar 5.11 di atas menunjukkan bahwa angka kematian bayi di kabupaten buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2019 terdapat 9.9 AKB/1.000 KH dan meningkat tahun 2020 sebanyak

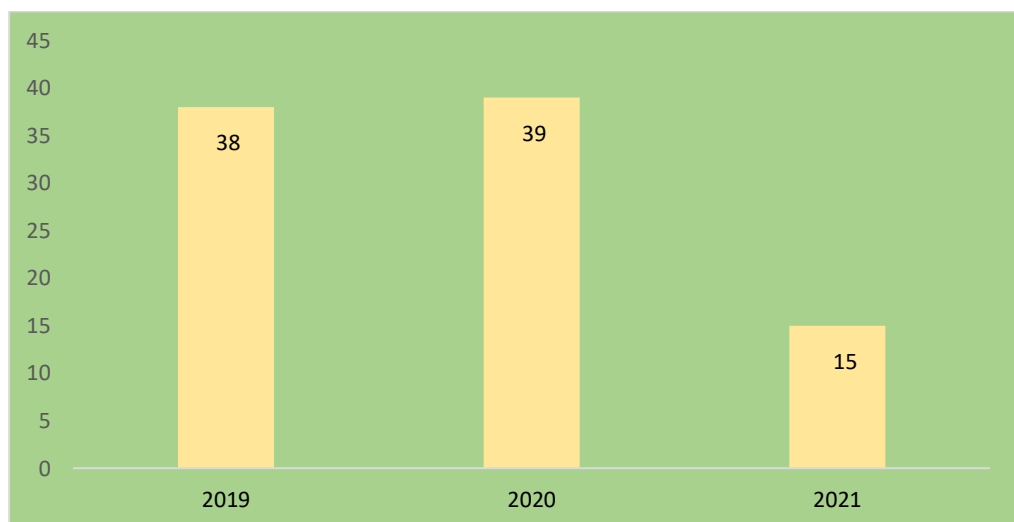
12.6 AKB/1.000 KH kemudian menurun tahun 2021 menjadi 6.6 AKB/ 1.000 KH. Namun demikian kita tetap berupaya lebih untuk dapat menurunkan angka kematian bayi.

5.5.3. Kematian Balita

Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan dalam angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menggambarkan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.

Sebagaimana angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang telah di laksanakan serta dapat mencerminkan tingkat dan besarnya masalah kemiskinan sebagai salah satu indikator yang cukup berpengaruh bagi perkembangan sosial ekonomi nasional. Millennium development goals (MDGs) menetapkan nilai AKABA dalam 4 tingkatan yaitu sangat tinggi (>140), tinggi (71-140), sedang (20-70), dan rendah (<20).

Gambar 5. 12. Jumlah Kematian Balita Kabupaten Buton, 2018-2020



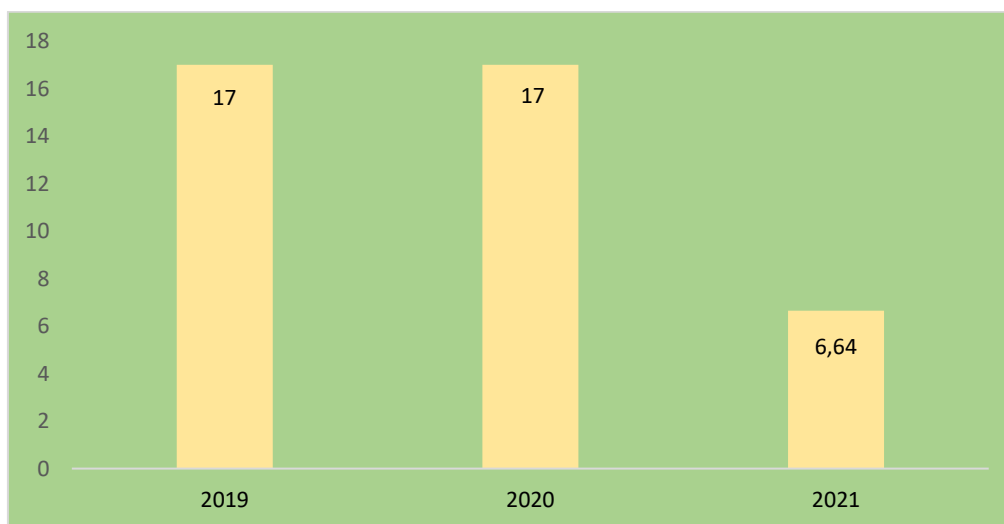
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Gambar 5.12. di atas menunjukkan bahwa jumlah kematian balita di kabupaten buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 terdapat 38 kematian balita, tahun 2020 meningkat menjadi 39 balita, kemudian tahun 2021 menurun menjadi 15 balita. Hal ini tidak

terlepas hasil kerja bersama dalam upaya penurunan angka kematian balita serta perlunya tanggungjawab bersama sehingga diharapkan upaya penurunan kematian balita harus lebih ditingkatkan.

Untuk mengetahui besaran masalah dari kasus kematian balita di perlukan angka kematian balita (AKABA), adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 3 tahun yang dinyatakan dalam angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita di kabupaten buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 5.13.

Gambar 5. 13. Angka Kematian Balita Kabupaten Buton, 2019-2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Gambar 5.13 di atas menunjukkan bahwa jumlah kematian balita di kabupaten buton dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 17 AKABA/ 1.000 KH kemudian tahun 2021 menurun menjadi 6.64 AKABA/ 1.000 KH.

Tabel 5. 2. Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton, Tahun 2021

KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Kematian			
		Neonatal	Balita		
			Bayi ^a	Anak Balita	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pasarwajo	Pasarwajo	2	5	0	5
	Banabungi	0	2	0	2
	Wakaokili	0	0	0	0
Kapontori	Kapontori	0	0	0	0
	Barangka	0	1	0	1
	Tuangila	1	1	0	1
Lasalimu	Lasalimu	0	0	0	0
	Laweale	0	0	0	0
Lasalimu Selatan	Lasalimu Selatan	1	2	0	2
	Wajah Jaya	0	0	0	0
Siontapina	Siontapina	0	1	0	1
	Kumbewaha	1	2	0	2
Wabula	Wabula	1	1	0	1
Wolowa	Wolowa	0	0	0	0
JUMLAH (KABUPATEN BUTON)		6	15	0	15

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Keterangan: - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut diatas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di Populasi

- ^a : Kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

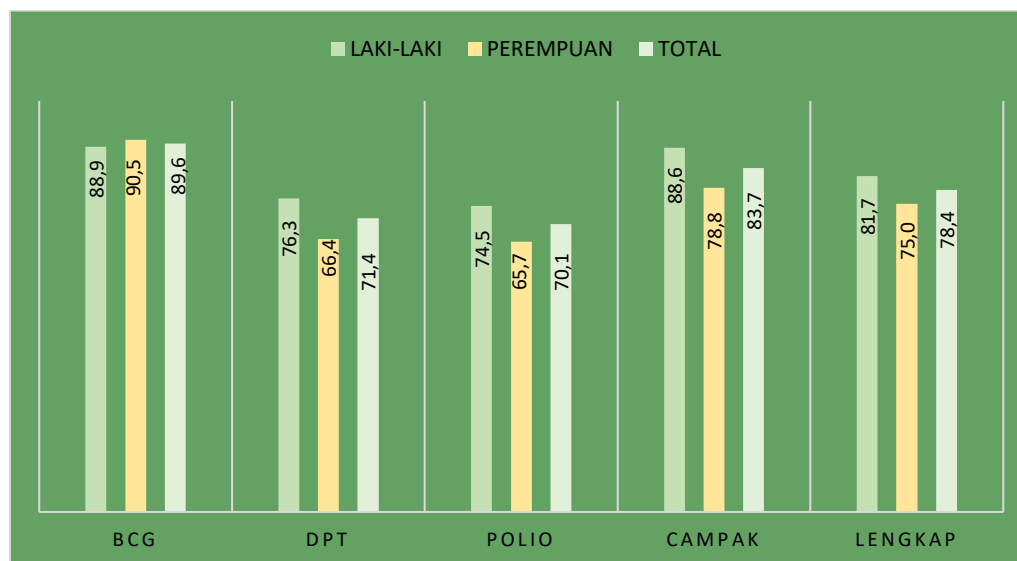
Berdasarkan table 5.2. dapat di ketahui bahwa kasus kematian neonatal yang di laporkan dengan jumlah terbanyak di kecamatan Pasarwajo yaitu sebanyak 2 kasus. Kasus kematian bayi yang di laporkan dengan jumlah terbanyak juga di kecamatan Pasarwajo yaitu sebanyak 7 kasus. Begitu pula dengan jumlah kasus kematian balita yang di laporkan terbanyak juga di kecamatan Pasarwajo yaitu sebanyak 7 kasus. Hal ini kemungkinan besar di karenakan system pelaporan kasus kematian anak di Kecamatan Pasarwajo semakin baik sehingga terdapat banyak kasus yang tercatat.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kulaitas kesehatan bayi dan balita adalah peningkatan cakupan imunisasi. Pada tahun 2021, terdapat 89.6 persen bayi mendapat imunisasi BCG, 71.4 persen mendapat imunisasi DPT+HB3, 70.1 persen mendapatkan imunisasi polio-4, 83.7 persen

mendapatkan imunisasi campak dan sudah tercatat 78.4 persen mendapatkan imunisasi lengkap.

Pada tahun 2021, persentase bayi yang mendapatkan imunisasi secara keseluruhan sudah di atas 70 persen untuk semua jenis imunisasi. Imunisasi yang paling banyak di berikan pada balita adalah BCG yaitu sebesar 89.6 persen. Sementara itu imunisasi yang paling sedikit di berikan pada bayi adalah polio yaitu hanya sebesar 70,11 persen. Data cakupan imunisasi kabupaten buton tahun 2021 dapat di lihat pada gambar 5.14.

Gambar 5. 14. Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi yang di berikan di Kabupaten Buton, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Jika di lihat berdasarkan jenis kelamin, maka persentase bayi laki-laki yang diimunisasi masih lebih tinggi dari pada persentase cakupan imunisasi untuk bayi perempuan untuk beberapa jenis imunisasi. Perbedaan terbesar yaitu 9.9 persen ada pada imunisasi jenis DPT yang mana persentase bayi laki-laki adalah sebesar 76.3 persen sementara bayi perempuan hanya sebesar 66.4 persen. Sementara perbedaan terkecil yaitu 1.6 persen ada pada imunisasi jenis BCG yang mana persentase bayi perempuan adalah sebesar 90.5 persen sementara bayi laki-laki sebesar 88.9 persen.

5.6. Keluarga Berencana

Indonesia merupakan Negara ke empat dengan penduduk terbanyak di dunia setelah cina, Amerika dan India. Ledakan penduduk terjadi di sebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Namun demikian, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk, agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu caranya adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana).

Program KB pertama kali di laksanakan pada masa pemerintah Soeharto yaitu saat orde baru. Melalui masyarakat di haruskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal dua anak. Tidak tanggung-tanggung, KB diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam masyarakat.

Visi program KB secara nasional yaitu mewujudkan keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, dan harmonis. Salah satu program pokok dalam keluarga berencana nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia (BKKBN 2015).

Cara yang di gunakan untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera yaitu mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa tujuan utama program KB adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Sebab, anggaran keuangan keluarga akhirnya bisa di gunakan untuk membeli makanan yang lebih berkualitas dan bergizi.
- Menjaga kesehatan ibu dengan cara pengaturan waktu kelahiran dan juga menghindari kehamilan dalam waktu yang singkat.
- Program KB untuk menghindari kehamilan dini, mengurangi tingkat aborsi tidak aman, dan *post abortion care*, serta program-program

perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran, khususnya pada perempuan usia subur.

- Mengonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal.

Keluarga berencana memberikan keuntungan ekonomi dan kesehatan pada pasangan suami istri, keluarga dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, program KB menjadi salah satu program pokok dalam meningkatkan status kesehatan ibu, bayi, dan anak. Program KB dapat menentukan kualitas keluarga agar dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*): mengatur jarak kelahiran dapat mengurangi risiko kematian bayi. Selain itu, KB juga membantu remaja mengambil keputusan untuk memilih kehidupan yang lebih baik dengan merencanakan proses reproduksinya.

Perkembangan KB di Indonesia masih belum menggembirakan. Secara nasional, presentase pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah menjadi satu pembahasan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan angka penggunaan kontrasepsi dan penurunan angka *unmet need* hasil SDKI dari tahun ke tahun yang belum mencapai target RPJMN. Seperti kita ketahui, bahwa penggunaan metode KB yang tepat, terutama pada pasca persalinan dapat mendukung penurunan AKI. Namun sayangnya target penurunan AKI tidak tercapai bahkan semakin meningkat berdasarkan SDKI 2012 sebagaimana telah diutarakan sebelumnya.

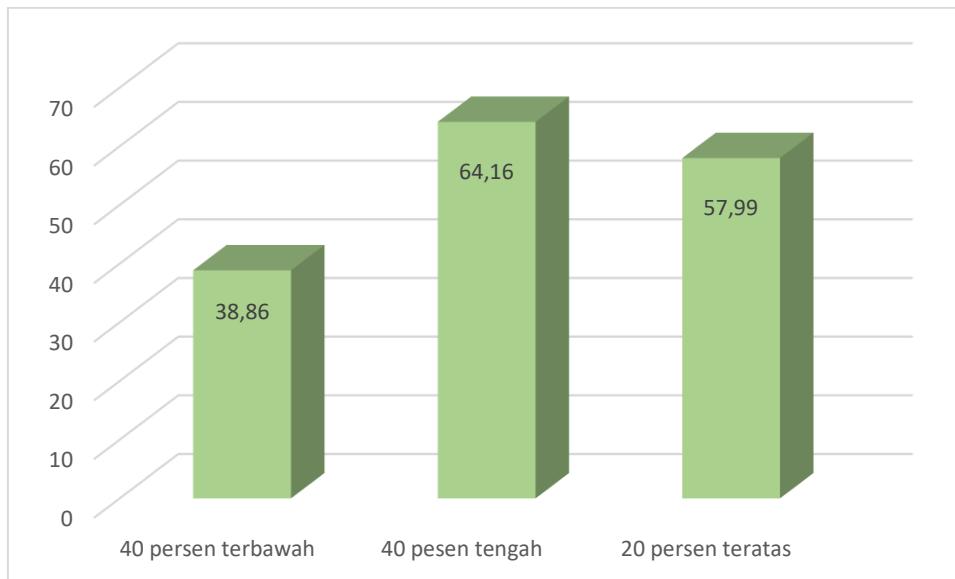
Berdasarkan dari BKKBN, secara nasional perempuan menikah usia 15-49 yang menggunakan alat kontrasepsi mencapai 52,38 persen. Macam-macam metode kontrasepsi adalah *intra uterine devices* (IUD), implant, suntik, kondom, metode operatif untuk wanita (tubektomi), metode operatif untuk pria (vasektomi), dan kontrasepsi pil. Cara yang baik dalam pemilihan alat kontrasepsi, yaitu ibu mencari informasi terlebih dahulu tentang cara-cara ber-

KB berdasarkan informasi yang lengkap, akurat dan benar. Untuk itu dalam memutuskan suatu cara kontrasepsi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien.

Pelaksanaan program KB selama ini, khususnya promosi alat kontrasepsi dapat di katakana bias gender, karena pada umumnya target alat kontrasepsi hanya pada perempuan. Hal ini menggambarkan adanya diskriminasi terhadap alat kontrasepsi yang diproduksi hanya di peruntukan kepada perempuan menikah saja tetapi bukan pasangannya atau suaminya. Alat kontrasepsi yang umumnya di ketahui masyarakat umumnya adalah alat kontrasepsi untuk perempuan, sementara alat kontrasepsi untuk laki-laki kurang di promosikan dan sangat jarang di publikasikan.

Untuk itu, di harapkan agar pemerintah menggagalkan berbagai strategi untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi baik yang di pakai perempuan menikah maupun yang di tujukan untuk laki-laki. Alat kontrasepsi juga di promosikan untuk mencegah ledakan penduduk, di mana Indonesia sekarang ini termaksud salah satu Negara terbesar jumlah penduduknya seperti yang sudah di sebutkan sebelumnya.

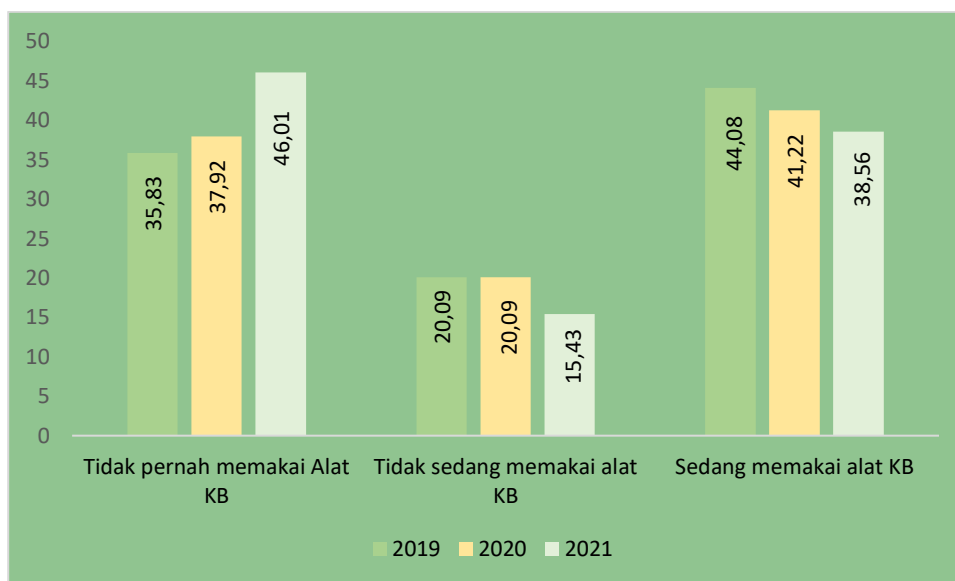
Gambar 5. 15. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS

Berdasarkan gambar 5.15 diketahui bahwa pada tahun 2021 persentase perempuan berumur 10 tahun keatas yang pernah kawin dan pernah melahirkan di fasilitas kesehatan menurut kelompok pengeluaran 40 persen terbawah ada sebanyak 38.86 persen. Kemudian untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah ada 64.16 persen dan 20 persen teratas adalah 57.99 persen pengeluaran mempengaruhi tingkat melahirkan di fasilitas kesehatan pada perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin.

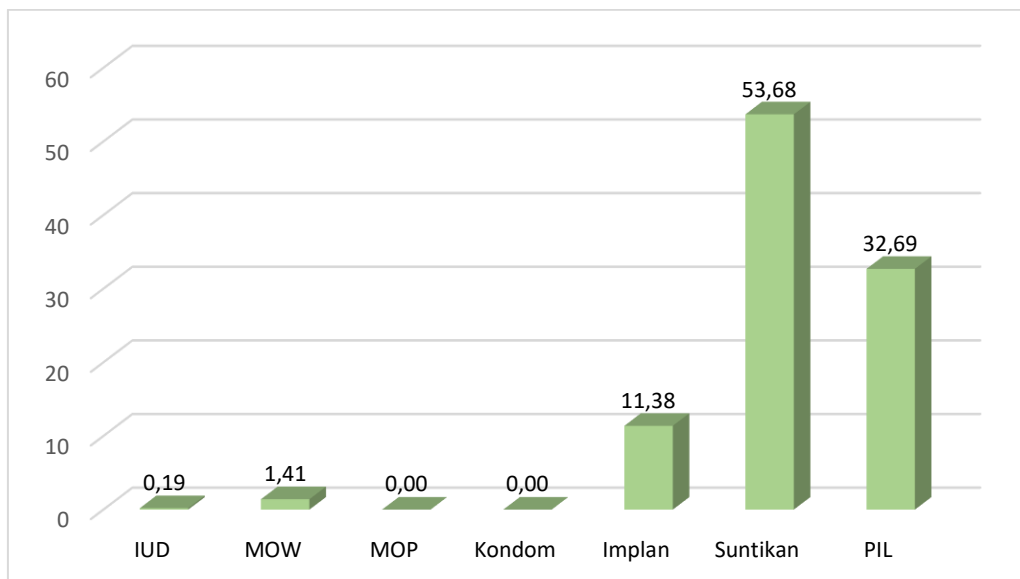
Gambar 5. 16. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut pernah/tidaknya memakai alat/cara KB di kabupaten buton, 2019-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2021, BPS

Berdasarkan gambar 5.17. dapat di ketahui bahwa pada tahun 2021 persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang tidak pernah memakai alat KB memiliki persentase yang lebih besar jika di bandingkan dengan perempuan yang pernah maupun sedang menggunakan alat KB. Meskipun demikian, persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat KB pada tahun 2021 mengalami penurunan jika di bandingkan dengan tahun 2020 yang mana sebesar 38.56 persen.

Gambar 5. 17. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Buton, 2021



Jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Buton tahun 2021 adalah 19.239 atau 76.50 persen dari jumlah pasangan subur menggunakan alat/cara KB. Ada tujuh alat/cara KB yang umum di gunakan di Indonesia. Pada tahun 2021 alat/cara KB yang paling banyak digunakan adalah suntikan yaitu 53,68 persen. Kemudian alat/cara KB yang tidak di gunakan adalah MOP (medis operasi pria) dan kondom.

5.7. Pemeriksaan Kehamilan

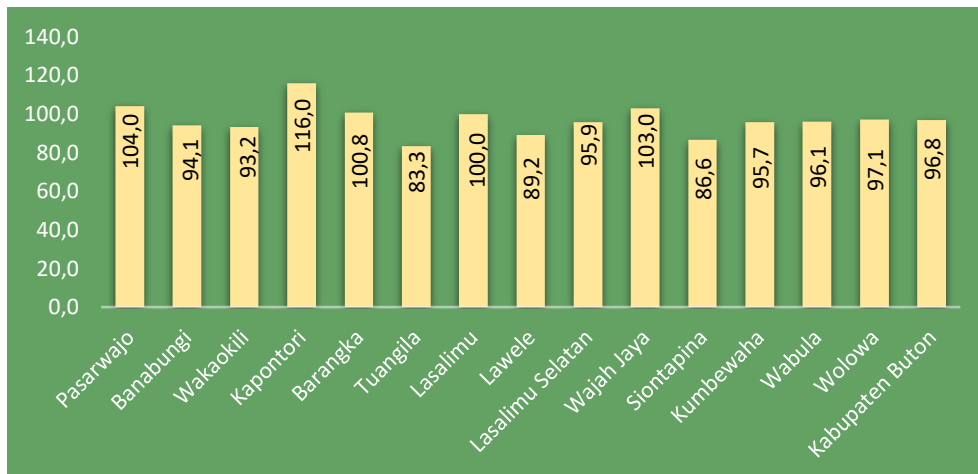
Pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu tahapan penting untuk mencapai kehamilan yang sehat. Perlu di yakini bahwa, pemeriksaan kehamilan dapat dianggap wajib dilakukan oleh para ibu hamil. Alasannya adalah karena dalam pemeriksaan tersebut di lakukan monitoring secara menyeluruh baik mengenai kondisi ibu maupun janin yang sedang di kandungnya. Dengan pemeriksaan kehamilan, ibu hamil dapat mengetahui perkembangan kehamilan, tingkat kesehatan, kandungan, kondisi janin, dan bahkan penyakit atau kelainan pada kandungan yang di harapkan dapat dilakukan penanganan secara dini.

Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan melalui dokter kandungan atau bidan dengan minimal pemeriksaan 4 kali selama kehamilan yaitu pada usia kehamilan trimester pertama, trimester kedua dan dua kali pada kehamilan trimester ke tiga, itupun jika kehamilan normal. Namun ada baiknya pemeriksaan kehamilan dilakukan sebulan sekali hingga usia 6 bulan, sebulan dua kali pada usia 7-8 bulan dan seminggu sekali ketika usia kandungan menginjak 9 bulan.

Selain itu, pemeriksaan kehamilan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil dalam merawat kehamilannya. Kunjungan secara rutin dalam pelayanan antenatal sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, bayi dan balita, karena berada dalam pengawasan tenaga kesehatan. Oleh karena itu pemerintah harus berkomitmen untuk mendekatkan layanan antenatal kepada ibu-ibu hamil baik melalui posyandu, polindes, puskesmas pembantu maupun puskesmas. Tentunya dengan biaya yang sangat ringan dan bahkan gratis untuk pemegang jamkesmas dan jampersal. Dukungan dana BOK dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan cakupan pelayanan kunjungan bumil (ANC) yang berkualitas.

Kematian ibu dapat di cegah sedini mungkin melalui pelayanan ANC berkualitas, begitu pula kematian bayi dan balita. Pelayanan ANC yang berkualitas juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya mencegah terjadinya kurang gizi pada ibu hamil dan balita.

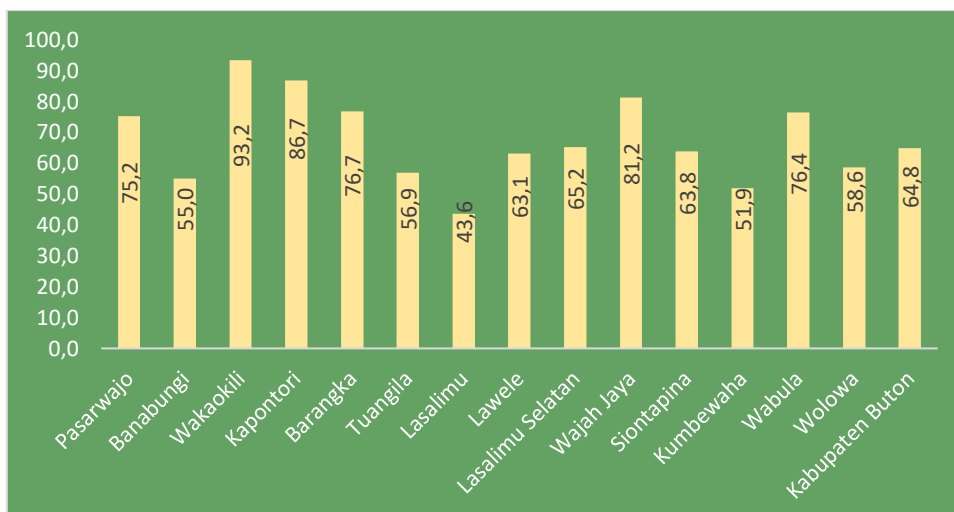
Gambar 5. 18. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 per Pukesmas di Kabupaten Buton 2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Berdasarkan gambar 5.18. di atas, menunjukkan kunjungan pertama (K1) ibu hamil ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Puskesmas dengan kunjungan ibu hamil K1 terbanyak terdapat di puskesmas Kapontori yaitu sebanyak 116.0 persen. Sedangkan kunjungan ibu hamil K1 paling sedikit terdapat di puskesmas Tuangila dengan total kunjungan 83.3 persen.

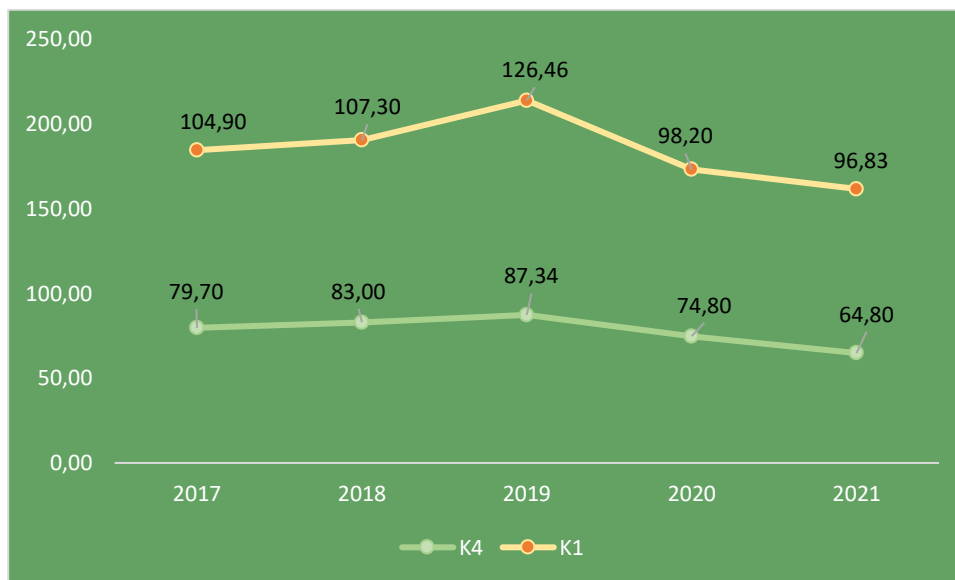
Gambar 5. 19. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 menurut Puskesmas di Kabupaten buton, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

Berdasarkan gambar 5.19. di atas, cakupan kunjungan ibu hamil K4 terbesar ada pada Puskesmas Wakaokili yaitu 93.2 persen namun menurun sebesar 22.8 persen dari K1. kemudian posisi kedua adalah puskesmas Kapontori dengan cakupan K4 sebesar 86.7. sedangkan posisi ketiga adalah puskesmas Wajah Jaya dengan cakupan K4 sebesar 81.2 persen.

Gambar 5. 20. Perkembangan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 per Puskesmas di Kabupaten Buton 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2021

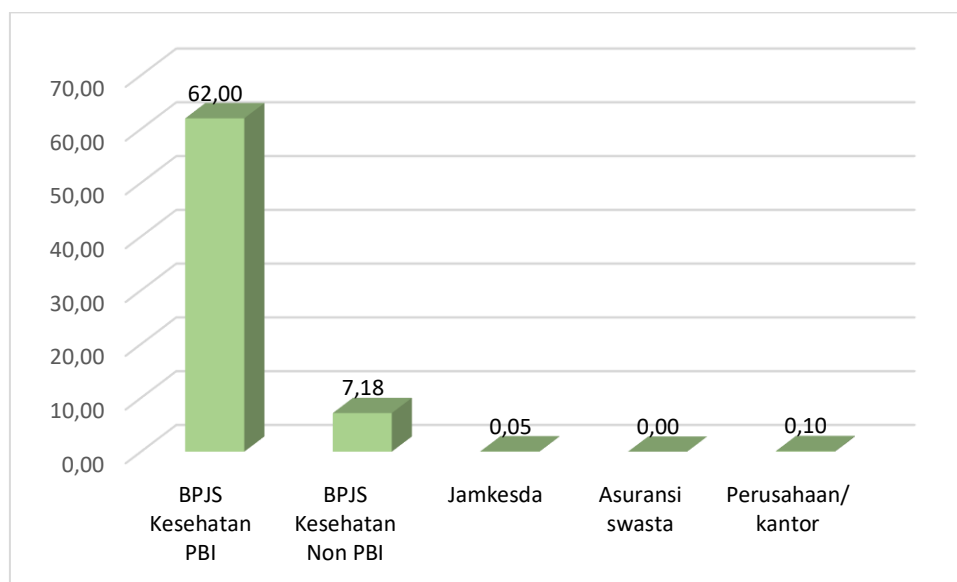
Gambar 5.20. memperlihatkan perkembangan cakupan K1 dan K4 kabupaten buton selama 5 tahun terakhir secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Gambar ini juga menunjukkan kesenjangan yang terjadi antara cakupan K1 dan K4. Tahun 2017 kesenjangan cakupan K1 dan K4 sebesar 25.2 persen, pada tahun 2018 menurun menjadi 24.3 persen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 39.2 persen, pada tahun 2020 menurun menjadi 23.4 persen, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 32 persen. Kesenjangan ini menunjukkan angka *drop out* K1-K4 semakin besar. Hal ini di sebabkan karena masih ada ibu hamil yang tidak meneruskan kunjungan antenatalnya sampai triwulan 3 dalam masa kehamilannya. Hal ini perlu di waspadai karena dapat menimbulkan resiko pada ibu hamil terutama pada saat melahirkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa ada kekeliruan yang terjadi di masyarakat dan kemungkinan kurang memahami pentingnya kunjungan persalinan minimal empat kali selama masa kehamilan. Kunjungan persalinan bertujuan agar perkembangan kehamilan dapat di pantau dari waktu ke waktu, termasuk perencanaan persalinan sudah seharusnya di bicarakan selama kunjungan persalinan.

5.8. Jaminan Kesehatan

Dalam Sasaran Strategis poin kedua rencana strategis kementerian kesehatan 2020-2024 di targetkan perluasan kepersertaan jaminan sosial kesehatan (JKN), mencakup PBI sebesar 40% jumlah penduduk (kuintil 1 dan 2), pekerja penerima upah, dan pekerja bukan penerima upah (PBPU). Pemenuhan target ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah untuk dapat memperoleh pengobatannya yang layak. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang menggunakan layanan jaminan kesehatan dalam melakukan pengobatan.

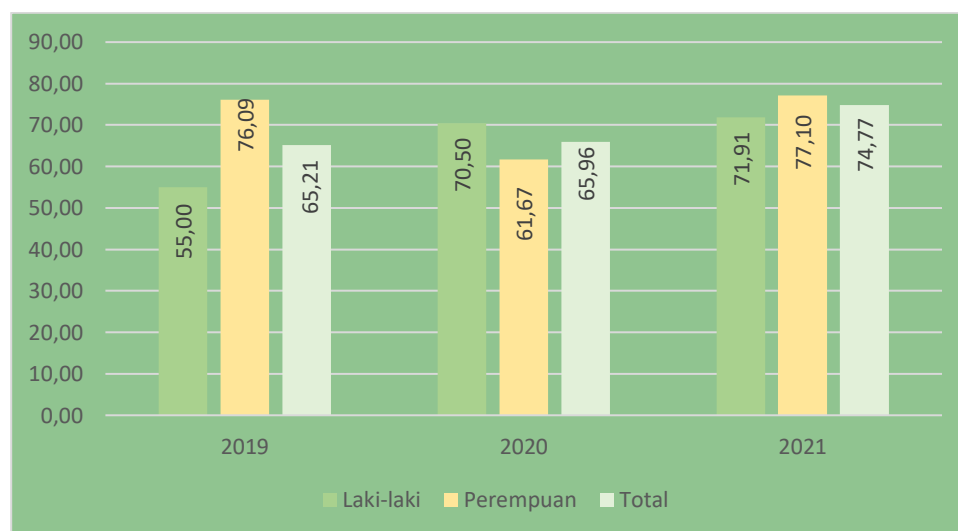
Gambar 5. 21. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kabupaten Buton 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS

Berdasarkan gambar 5.21. di atas, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat pada tahun 2021 adalah sebesar 62.00 persen. Sementara jika di lihat berdasarkan jenis jaminan kesehatan yang di gunakan maka penduduk yang menggunakan BPJS kesehatan PBI sudah melebihi 60 persen.

Gambar 5. 22. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton 2019-2021



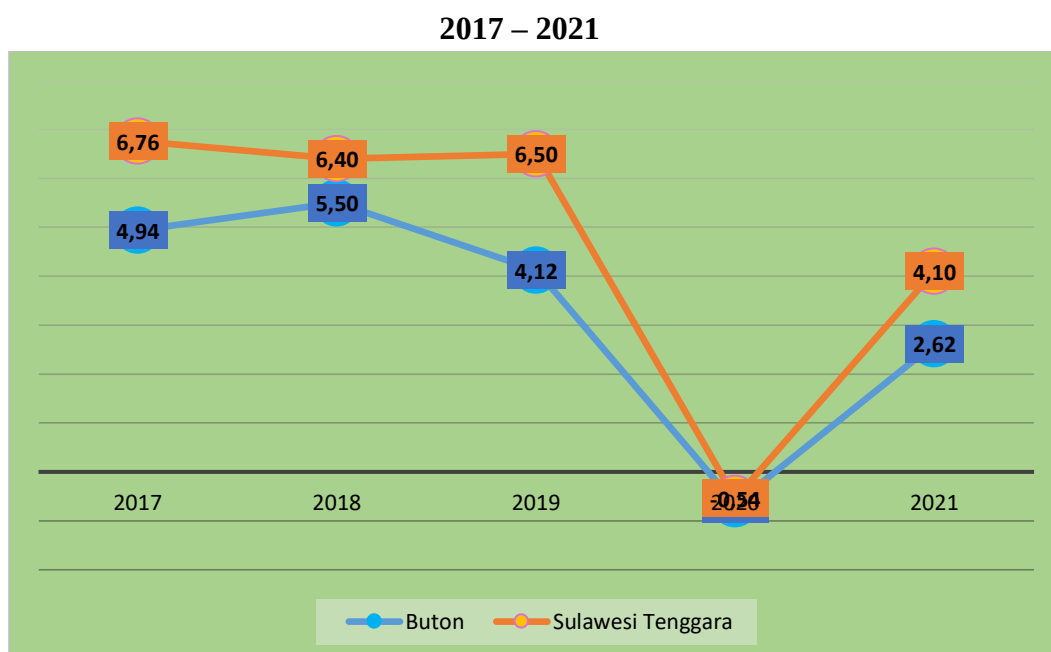
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, BPS

Pada tahun 2019, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan adalah sebesar 65.21 persen, dengan penduduk laki-laki sebanyak 55.00 persen kemudian penduduk perempuan sebanyak 76.09 persen. Kemudian secara keseluruhan angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,75 persen menjadi 65.96 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2020 persentase penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan menurun menjadi 61.67 persen sementara penduduk laki-laki meningkat menjadi 70.50 persen. Kemudian pada tahun 2021 secara keseluruhan naik sebesar 8,81 persen menjadi 74,77 persen. Untuk penduduk perempuan dan laki-laki jika di bandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 77.10 persen untuk penduduk perempuan, dan 71.91 persen untuk penduduk laki-laki.

6.1. Analisis Perekonomian Kabupaten Buton

Pertumbuhan ekonomi dijadikan salah satu ukuran atau indikator untuk mengetahui perkembangan perekonomian disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan semakin bergairah kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan penduduk tinggi, di harapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.

Gambar 6. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton dan Sulawesi Tenggara,



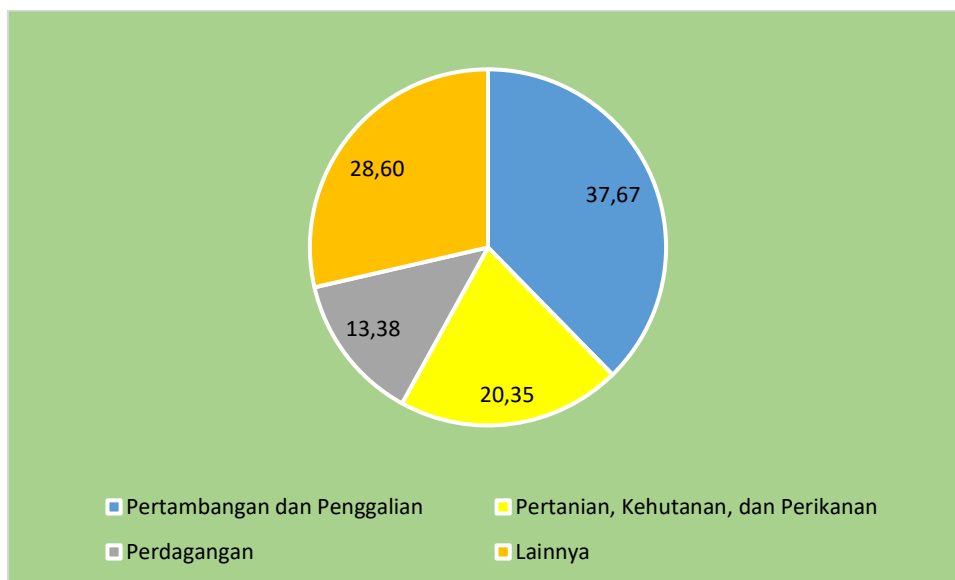
Sumber: BPS, PDRB menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton mengalami kontraksi yang cukup signifikan yang mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar

0,54 persen. Sedangkan pada 2021 pertumbuhan ekonomi menjadi 2,62 persen. Namun jika di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi tenggara yang sebesar 4,10 persen, maka angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton tersebut masih diatas nilai provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang kontraksi ini dialami oleh semua wilayah akibat dari dampak covid-19 yang mengharuskan dilakukanya pembatasan sosial. Pelaksanaan pembatasan sosial tersebut mengakibatkan berhentinya roda ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran lapangan usaha dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Terlihat dari struktur perekonomian Kabupaten Buton yang didominasi oleh pertambangan dan penggalian, di mana pada tahun 2021 kontribusi pada sektor ini mencapai 37,67 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 20,35 persen.

Gambar 6. 2. Pangsa Sektor Dominan Perekonomian Kabupaten Buton, 2021



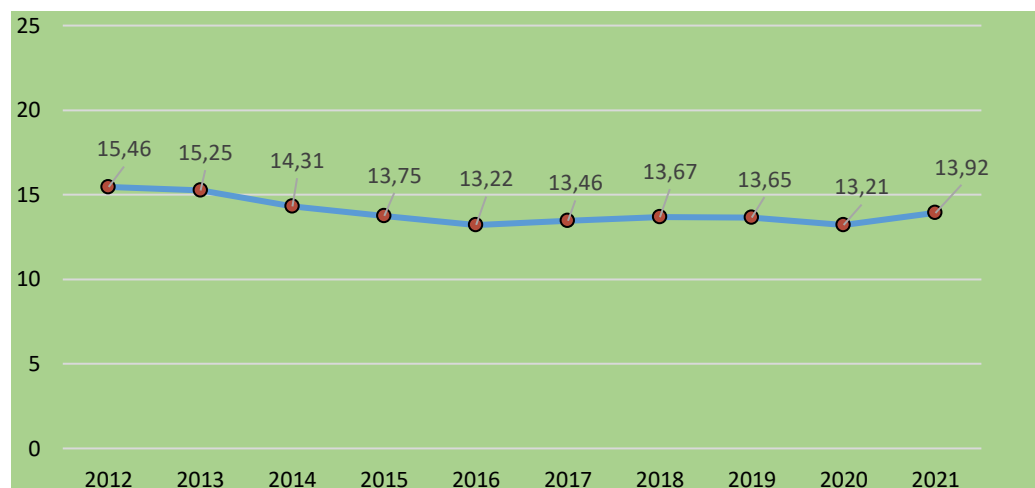
Sumber: BPS, PDRB menurut Lapangan Usaha 2021

Meskipun demikian, secara keseluruhan perekonomian **Buton** menunjukkan trend menaik, namun belum signifikan.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pada tahun 2021 ini mengindikasikan banyaknya lini perekonomian yang tidak memproduksi.

Dengan demikian, angka kemiskinan terus menunjukkan trend yang fluktuatif seperti yang terlihat pada gambar 6.3 dibawah, trend fluktuatif angka kemiskinan di kabupaten buton dalam periode 10 tahun terakhir sampai dengan tahun 2021.

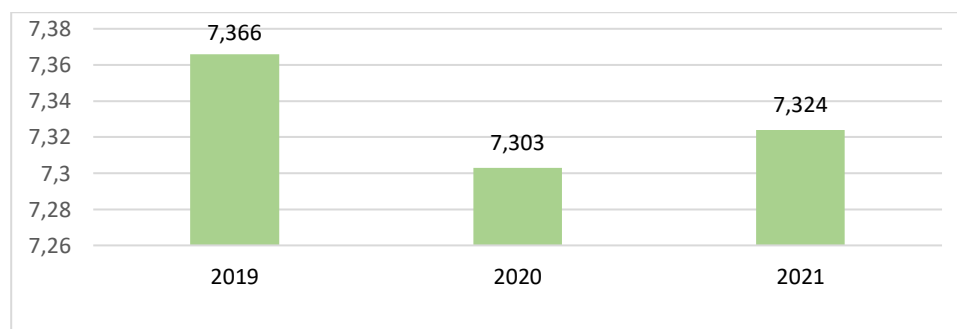
Gambar 6. 3. Trend Angka Kemiskinan Kabupaten Buton, 2012-2021



Sumber: BPS

Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 angka kemiskinan kabupaten buton menunjukkan arah yang berbeda, namun pada 2021 angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan. Peningkatan angka kemiskinan tersebut dapat mengindikasikan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan. Selain di sebabkan oleh pendapatan penghasilan, akan sangat di pengaruhi oleh kenaikan harga-harga.

Gambar 6. 4. Rata-rata Pengeluaran (000 Rp) per Kapita Penduduk Kabupaten Buton, 2019-2021



Sumber: BPS

Gambar 6.4. memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran perkapita pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2020.

Bila di bandingkan rata-rata pengeluaran perkapita tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif dimana tahun 2019 rata-rata pengeluaran per kapita mencapai 7,366 rupiah kemudian menurun ditahun 2020 yaitu mencapai 7,303 rupiah dan naik pada tahun 2021 mencapai 7,324 rupiah.

Menurunnya angka kemiskinan sejalan dengan penurunan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk mengalami peningkatan mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan ekonomi pada penduduk Kabupaten Buton. Hal ini perlu mendapatkan perhatian mengingat semestinya pemerataan ekonomi dapat lebih ditingkatkan lagi.

6.2. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa obyek kegiatan dari kegiatan pemberdayaan adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan (kaum marginal) baik laki-laki maupun perempuan.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas manusia di buton, pemerintah daerah telah melakukan berbagai program kegiatan yang di tunjukkan untuk meningkatkan kualitas manusia. Berbagai program dimaksud di antaranya adalah pembinaan dan pengembangan kapasitas perempuan yang di lakukan oleh BPPKB, UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Prov Sultra yang menyelenggarakan pelatihan yang meliputi Pelatihan Dasar Umum (PDU) dan Pelatihan Intensifikasi Lahan Pekarangan, Pelatihan Dasar Kompetensi, Pelatihan Kewirausahaan dan lain-lain.

Dari tabel di bawah, terlihat bahwa tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton menyelenggarakan pelatihan kerja yang cukup proposional, sebesar 31% peserta pelatihan berjenis kelamin perempuan dan 68,75 persen berjenis kelamin laki-laki, proporsi yang cukup besar yang di berikan kepada peserta berjenis kelamin laki-laki diharapkan dapat menopang peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah selalu komitmen untuk mengupayakan penyertaan antara laki-laki dan perempuan dalam

meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka dapat diberdayakan secara merata pula.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia di kabupaten buton adalah pendidikan dan pelatihan kewirausahaan produktif bagi wirausaha baru dan pelatihan peningkatan produktivitas bagi pekerja.

Tabel 6. 1. Jumlah Peserta Pelatihan yang Telah Dilaksanakan Disnakertrans Kabupaten Buton, 2021

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pelatihan Menjahit	5	11
2	Pelatihan Otomotif Sepeda Motor Injeksi	16	0
3	Pelatihan Computer Operator Assistant	7	9
4	Pelatihan Otomotif Sepeda Motor Injeksi tahap II	16	0
Jumlah		44	20
Persentase (%)		68,75	31,25

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Buton

PEREMPUAN DAN POLITIK



Peran perempuan dalam ranah politik di Indonesia dapat dikatakan masih minim, dan aspirasi kaum perempuan cenderung masih diabaikan. Kalau perempuan mendapatkan ruang, mereka hanya sebagai pelengkap dan sekedar menggugurkan kewajiban. Kebiasaan ini telah terjadi sejak dahulu sebab Indonesia adalah Negara yang masih cenderung kuat dari budaya patriarkal dimana suara perempuan sering kurang di dengarkan. Meski di akui ada perubahan di zaman modern ini, gerakan perempuan mulai dari organisasi sampai ke partai politik telah di laksanakan, namun dalam prakteknya suara perempuan diredam oleh kepentingan kaum laki-laki.

Hal ini dapat dikatakan bahwa sejarah, budaya dan ideology merupakan latar belakang keterpurukan peran perempuan dalam politik di Indonesia yang pada umumnya menempatkan posisi perempuan sebagai kelompok yang berperan untuk mengurus aktifitas non politis. Seperti mengurus rumah tangga, anak dan sebagai pendamping kaum laki-laki dan bentukan atau kontruksi sosial seperti inilah yang menyulitkan perempuan untuk bergerak lebih cepat untuk ikut dalam ranah politik.

Disisi lain, demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi –posisi pengambilan keputusan. Memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tugas Negara.

Hal ini telah di buktikan dengan komitmen pemerintah untuk kepentingan tersebut melalui beberapa kebijakan bahkan dalam konstitusi, yaitu pasal 28 I (12) UUD 1945 menyatakan bahwa *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”* Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum dan filosofis, Indonesia telah menjamin dan melindungi tiap warga Negeranya dari sikap atau tindakan diskriminatif dalam semua hal, termaksud jenis

kelamin. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan gender, diperlukan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri. Fakta ini tidak dapat di pungkiri, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkah laku diskriminasi sangat bervariasi diberbagai wilayah. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan terjadi di mana-mana. Perempuan baru pada tataran sebagai objek pembangunan dan dalam proses menyasar sebagai pelaku pembangunan. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan masih bias gender.

Fakta dilapangan membuktikan bahwa diskriminasi terhadap satu golongan masih terjadi, termasuk diskriminasi perempuan di hampir semua sektor pembangunan. Artinya perempuan masih mengalami perlakuan yang tidak adil yang berkolerasi dengan kualitas hidup perempuan. Upaya untuk mengurangi upaya kesenjangan gender yang terjadi maka perempuan harus mewakili aspirasinya dengan jalan berpartisipasi dan ikut duduk sebagai pengambil kebijakan, baik pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan duduknya perempuan pada ketiga lembaga tersebut, maka kepentingan perempuan akan mampu di perjuangkan.

Salah satu indikator kesetaraan gender dalam bidang politik yaitu keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijakan dan pemerintah telah memberikan ruang dan kesempatan untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen dan upaya ini telah ditetapkan melalui undang-undang No.8 Tahun 2012 mengenai batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen yaitu minimal 30% sebagai aksi afirmasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa untuk mencapai aksi afirmasi tersebut, masih perlu kerja keras bukan hanya perempuan sendiri yang berjuang tetapi komitmen dan keterlibatan laki-laki pun sangat dibutuhkan.

Kebijakan dari gerakan *Affirmative Action* sudah seharusnya terselenggara sebagai mana tujuannya. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, diperoleh data bahwa presentase perolehan suara caleg perempuan DPR RI dari sepuluh peserta parpol belum ada yang mecpai 30 persen. Perbandingan perolehan jumlah kursi caleg perempuan dengan DPR RI terpilih dengan jumlah kursi yang ada diparlemen untuk masing-masing parpol juga tidak mencapai 30 persen sehingga perbedaan perbandingan persentase perolehan caleg perempuan terpilih antara 2009 dengan 2014 mengalami penurunan. Atau dengan kata lain keanggotaan perempuan di parlemen di tingkat nasional mengalami fluktuasi.

Data KPU menunjukkan bahwa jumlah anggota parlemen perempuan di DPR tahun 2019 menurun menjadi 117 orang (25.55 persen). Dari periode sebelumnya yaitu pada tahun 2014 berjumlah 97 orang (17.32 persen). Sementara komposisi caleg DPD RI terpilih antara caleg laki-laki dengan caleg perempuan adalah 69.12 persen dan 30.88 persen, keterwakilan caleg perempuan belum mencapai 30 persen sebagai mana yang tertulis dalam UU No.12 tahun 2008. Sehingga, periode parlemen terakhir yaitu 2019 -2024, keterwakilan perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan namun belum mencapai 30 persen.

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam dunia politik, mengingat jumlah pemilih perempuan di banding dengan jumlah pemilih laki-laki. Di dukung dengan akses masyarakat dalam melakukan proses demokrasi secara langsung pada tahun 2019 lebih mudah di banding pelaksana pemilu pada periode sebelumnya, tahun 2014. Hal ini menjadi refleksi bagi caleg perempuan terhadap penurunan kepercayaan masyarakat, bahkan kepercayaan masyarakat perempuan itu sendiri terhadap caleg perempuan.

Anggota DPRD perempuan di Sulawesi tenggara masih sama antara periode 2014-2019 dan 2019-2024 yaitu ada 8 perempuan dari 37 anggota DPRD secara keseluruhan. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan di DPRD provinsi Sulawesi tenggara yaitu 21.62 persen belum mencapai target yaitu 30 minimal 30 persen.

Namun pada tingkat kabupaten/kota, hanya kabupaten wakatobi, yang mencapai angka afirmasi yaitu 33.33%, lebih tinggi persentasenya jika dibanding dengan capaian propinsi. Data tersebut dapat di lihat pada table 7.1. yang memberikan gambaran tentang keterlibatan perempuan di legislative, baik level provinsi maupun tingkat kabupaten/kota untuk periode 2014-2019.

Tabel 7. 1. Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin Periode 2019-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota			Persentase Anggota Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	21	4	25	16,00
Muna	26	4	30	13,33
Konawe	22	8	30	26,67
Kolaka	24	6	30	20,00
Konawe Selatan	27	8	35	22,86
Bombana	22	3	25	12,00
Wakatobi	17	8	25	32,00
Kolaka Utara	20	5	25	20,00
Buton Utara	15	5	20	25,00
Konawe Utara	17	3	20	15,00
Kolaka Timur	15	10	25	40,00
Konawe Kepulauan	18	2	20	10,00
Muna Barat	16	4	20	20,00
Buton Tengah	19	6	25	24,00
Buton Selatan	16	4	20	20,00
Kota Kendari	25	10	35	28,57
Kota Bau-Bau	18	7	25	28,00
DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	36	9	45	20,00
Sulawesi Tenggara	374	106	480	22,08

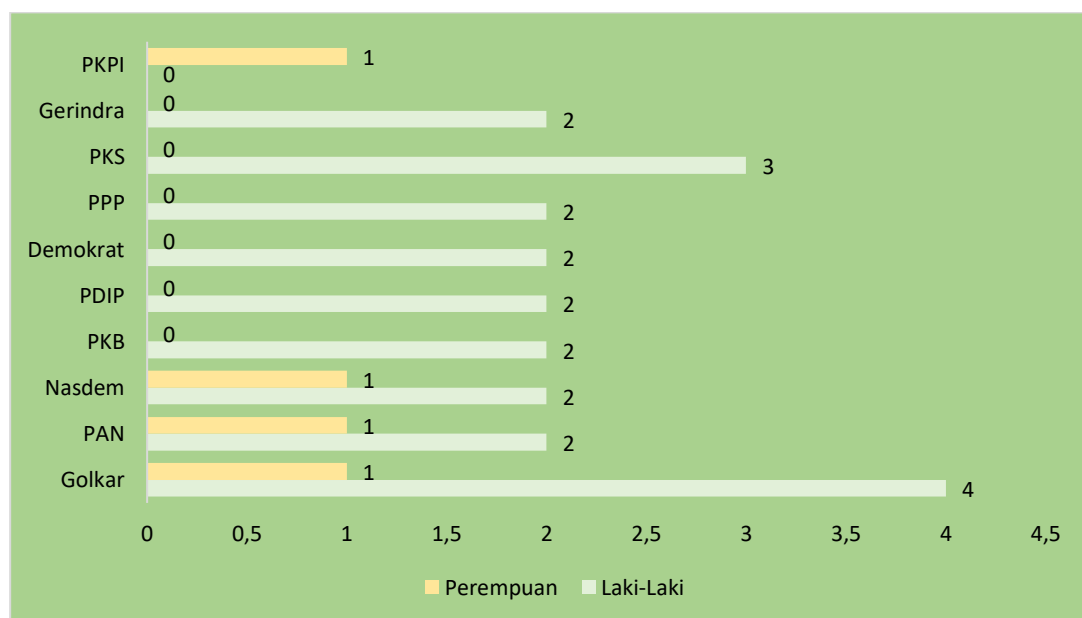
Sumber: Badan Kesbangpol Sulawesi Tenggara

Untuk Kabupaten Buton memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 4 orang. Dengan jumlah perempuan dalam DPRD sebanyak 4, maka persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah sebesar 16 persen. Angka ini meningkat jika di bandingkan dua tahun lalu yaitu sebesar 12 persen. Data tersebut menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik mengalami

peningkatan. Namun masih perlu dikaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi meningkat dan menurunnya keanggotaan perempuan. Data tersebut juga berkorelasi dengan kualitas hidup perempuan yang ada di Sulawesi tenggara yang terlihat melalui indikator IPM, IPG dan IPG. Terutama capaian IDG yang mengukur keberhasilan Negara dalam konsep pemberdayaan perempuan sebagai pengambilan kebijakan. Masih banyak kabupaten yang memperlihatkan kesenjangan gender di parlemen yang nota bene akan menentukan program-program yang akan dilaksanakan.

Tidak bisa di pungkiri bahwa sangat sedikit partai politik di kabupaten buton yang telah melibatkan perempuan sebagai unsur pimpinan, sebagai salah satu bentuk afirmasi partai politik, rekapitulasi keanggotaan DPRD menunjukkan bahwa PAN, PKPI, Nasdem, dan partai Golkar masing-masing menempatk 1 orang perempuan sementara dari fraksi lainya hanya di wakilkkan oleh laki-laki.

Gambar 7. 1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019-2024 menurut Fraksi dan Jenis kelamin



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buton

Sekarang ini, gerakan perempuan baik organisasi maupun politik menunjukkan kemajuan yang secara signifikan menentukan perkembangan dan keterlibatan perempuan dalam politik untuk pemilu yang akan datang. Pernyataan ini didukung dengan gencarnya organisasi politik perempuan seperti Kaukus

Perempuan Parlemen Indonesia (KPP Indonesia) adalah organisasi yang merangkul para perempuan yang senator untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pelaku pembangunan di legislatif. Sementara kausus perempuan politik Indonesia atau KPPI adalah wadah yang menghimpun semua perempuan yang aktif di partai politik. Kedua organisasi perempuan ini sebagai bukti komitmen pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan lebih banyak dipemilu mendatang bahkan sebagai calon kepala daerah.

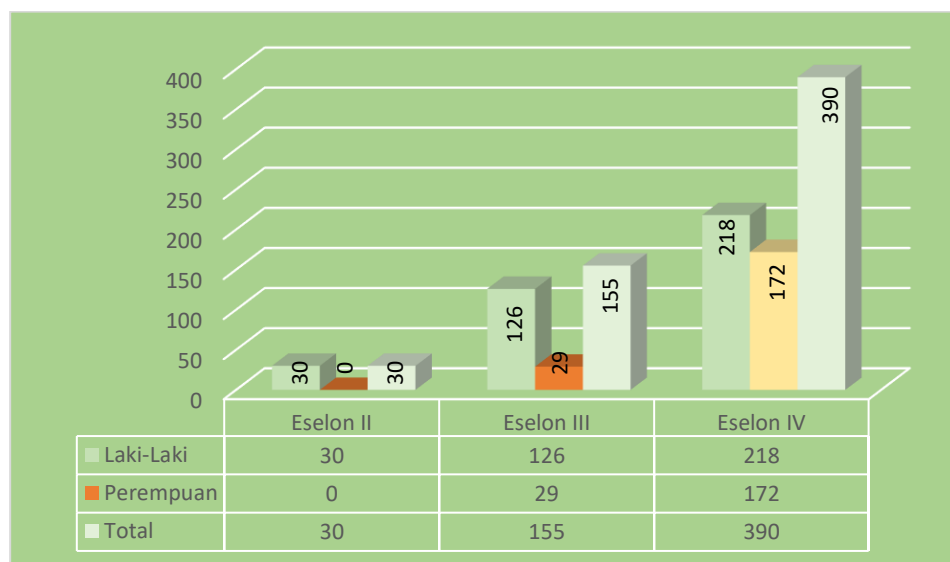
Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa fenomena pemilihan perempuan sebagai pengurus partai dan menjadi anggota legislatif masih perlu upaya maksimal agar dapat memenuhi target aksi afirmasi. Temuan menunjukkan bahwa tiga strategi politik yang di kenal sebagai acuan untuk proses pencapaian target partai politik yaitu *money politic* atau politik uang, politik dynasti dan politik praktis. Guyonan ini kemungkinan ada benarnya terutama praktek politik uang yang terjadi di mana, baik secara sembunyi-sembunyi bahkan secara terang-terangan dan terbuka untuk umum. Seorang caleg harus siap mengeluarkan uang milyaran rupiah jika ingin maju menjadi wakil rakyat. Politik dinasti merupakan strategi lain dan strategi ini juga terlihat melaju terus di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang di temukan terjadi politik dinasti di tanah air, termaksud di Sulawesi Tenggara, akan tetapi persepsi keliru dengan politik dinasti membuat masyarakat sedikit pesimis dengan cara seperti itu. Namun tidak sedikit pula yang mengatakan politik dinasti sebenarnya mempunyai dampak positif di mana mereka telah mempunyai pengalaman dari keluarga dekatnya, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman terdahulu.

Pola pikir dan pendekatan partai tentang keterlibatan perempuan dari tahun ke tahun mengalami perbaikan, termasuk keterlibatan mereka sebagai anggota parlemen. Diskusi tentang politik uang politik dinasti dan politik praktis merupakan topik tersendiri belajar dari pengalaman, disarankan bahwa setiap strategi di atas masing-masing ada nilai plus. Untuk itu, perlu pendekatan secara komprehensif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijakan, baik di level legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Dari unsur eksekutif, peningkatan jumlah PNS perempuan menjadi strategi untuk mencapai kesetaraan gender dan peluangnya terlihat semakin tinggi, khususnya pada sektor pemerintahan atau eksekutif. Keinginan untuk di samakan dan ikut memegang andil dalam pemerintahan tidak hanya menjadi harapan tapi juga sebagai bentuk capaian emansipasi saat ini. Kontribusi perempuan dalam pemerintahan di Sulawesi tenggara sebagai pegawai negeri sipil (PNS) semakin tinggi. Selama periode lima tahun terakhir, persentase PNS perempuan terus mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan partisipasi perempuan dilingkup pemerintah Kabupaten Buton cukup tinggi. Jumlah pegawai negeri sipil perempuan di semua unit kerja pada tahun 2021 di kabupaten buton tercatat sebesar 1.445 orang atau sekitar 51,70 persen. Hal ini sejalan dengan indeks pemberdayaan gender (IDG) kabupaten buton yang menggambarkan ekuivalensi proporsi laki-laki dan perempuan dalam sektor publik relatif tinggi di bandingkan di kabupaten/kota lain di Sulawesi tenggara.

Gambar 7. 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton, 2021



Sumber: BKD Kabupaten Buton

Table 7.2 menunjukkan bahwa dari total 619 ASN yang memiliki jabatan eselon, jumlah perempuan yang menduduki jabatan tersebut adalah sebanyak 201. Pada eselon ii, dari total 30 terdapat 0 perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

sementara untuk eselon iii, terdapat 29 perempuan dari total 155 ASN yang menduduki posisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka persentase perempuan yang menduduki jabatan masing-masing adalah eselon iv adalah 44,10 persen, eselon iii adalah 18,71 persen, dan eselon ii 0.

Meskipun jumlah PNS perempuan lebih kecil jumlahnya di bandingkan dengan jumlah PNS laki-laki. Namun persentase posisi pengambilan kebijakan mulai mendekati angka 30 persen. Bahkan pada jabatan eselon iv sudah melebihi 30 persen jika di pilah berdasarkan ruang dan golongan kepangkatan laki-laki cenderung mendominasi, baik pada eselon II, III, dan IV. Untuk lebih rinci, dapat di lihat gambaran dat di bawah ini.

Tabel 7. 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sampaidengan SD	2	-	2
2	SLTP/Sederajat	7	-	7
3	SMA/Sederajat	241	121	362
4	Diploma I,II	38	43	81
5	Diploma III	59	285	344
6	Tingkat Sarjana	1.003	996	1.999
JUMLAH		1.350	1.445	2.795

Sumber: BKD Kabupaten Buton

Dapat diprediksi bahwa program pemberdayaan perempuan, khususnya peningkatan kualitas hidup perempuan belum sepenuhnya belum menjadi program prioritas. Namun demikian, prediksi ini bisa meleset jika anggota parlemen laki-laki sudah mempunyai wawasan gender yang bagus. Sehingga mereka turut memikirkan dan memutuskan program-program yang menjadi prioritas untuk kebutuhan perempuan.

Tabel 7. 3. Jumlah Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, 2021

No	Kabupaten/Kota	Ketua		Wakil Ketua		Hakim	
		L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengadilan Negeri Pasarwajo	1	-	1	-	4	1
2	Pengadilan Agama Pasarwajo	-	1	1	-	1	-
Total		1	1	2	0	5	1

Sumber: PN Negeri Pasarwajo dan PN Agama Pasarwajo

Di level yudikatif, terdapat 1 orang perempuan yang berstatus hakim pada pengadilan negeri pasarwajo. Sementara pada pengadilan agama pasarwajo tidak ada hakim perempuan dari analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijakan masih sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan Kabupaten Buton melalui penyelarasan program pusat dengan daerah secara keseluruhan data menunjukkan proporsi laki-laki dan perempuan pada sektor publik terutama dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Buton relative masih rendah. Peranan perempuan di sektor publik di berbagai dimensi pekerjaan di bidang birokrasi, profesionalisme, teknik serta pimpinan/keterlaksanaan sangat signifikan dengan ketidakmerataan pada penghasilan yang diperoleh, serta rendahnya kualitas hidup perempuan di bandingkan dengan laki-laki.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK



8.1 Kekerasan terhadap Perempuan

Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) merekomendasikan semua pemerintah di dunia agar dapat memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan didalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan local dan Nasional.

Konvensi PBB ini mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan mencantumkan kekerasan berbasis gender sebagai definisi diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) sebagai kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena ia seorang perempuan atau kekerasan yang sangat berpengaruh terhadap perempuan. Secara khusus, Deklarasi PBB tahun 1993 tentang penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan sebagai kekerasan berbasis gender yang meliputi segala tingkah laku merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya termasuk penganiayaan istri, perkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, dan penganiayaan seksual pada anak perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah Tindakan yang menghambat tercapainya kesetaraan, kemajuan, dan perdamaian. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, yang mencakup ruang lingkup. yakni kekerasan di lingkup domestik, kekerasan dalam masyarakat serta kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari target yang ingin dicapai dalam SDGs. Isu kesetaraan gender masuk pada tujuan pembangunan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak. Salah satu targetnya: menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang public dan swasta, termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual dan berbagai bentuk eksploitasi. Dengan demikian penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan Amanah undang-undang dan juga menjadi target capaian SDGs. Selain itu secara sosiologis persoalan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah social yang prlu segera diintervensi. Selain menimbulkan korban dan kerugian yang dialami oleh perempuan, hal ini juga berdampak pada melemahnya ketahanan keluarga, dan rentannya modal sosial masyarakat.

Berbagai kekerasan berbasis gender tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai dan pandangan budaya serta ideologi patriarki yang selalu memposisikan perempuan sebagai obyek dan berada dipihak terpinggirkan yang berlaku dalam struktur kehidupan. Berdasarkan data yang ada, kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) menjadi kasus yang tertinggi setiap tahunnya.

Menuju Perempuan Indonesia (MPI) adalah organisasi perempuan yang di dalamnya berkumpul perempuan-perempuan yang berkomitmen menyelamatkan negara melalui penyelamatan perempuan dan anak. MPI telah banyak berbuat dalam rangka promosi akses dan partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan. Melalui Undang-undang PEMILU, MPI juga berkontribusi untuk tetap memberikan ruang kepada perempuan untuk mencapai aksi afirmasi 30% untuk duduk di parlemen. MPI bekerja sama dengan Anggota DPD perempuan juga memperjuangkan ruang untuk perempuan dalam rangka memberikan peluang perempuan sebagai keterwakilan di dalam jabatan politis dan posisi strategis, baik yang dieksekutif, legislative maupun eksekutif.

Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun terakhir pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, sebanyak 338.496. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemic di

tahun 2019. Ada beberapa KBG terhadap perempuan yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terhadap perempuan, KBGS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan POLRI, serta kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan.

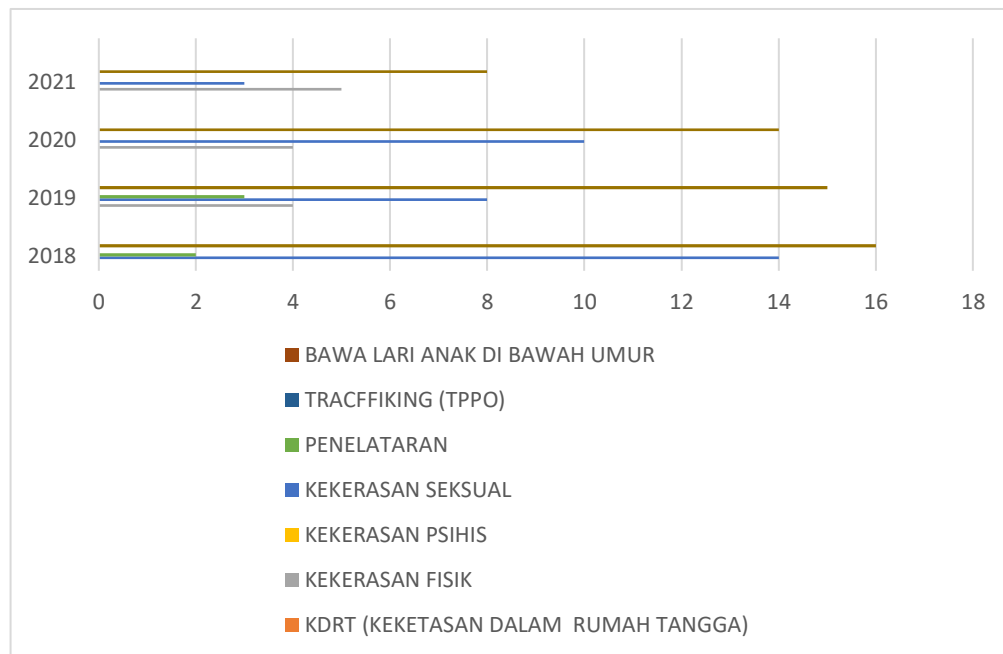
Data tahun 2021 menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual masih menjadi kelompok dengan jumlah tertinggi yang mengalami kekerasan, yakni sebanyak 22 kasus dan diikuti perempuan dengan disabilitas sebanyak 13 kasus, dan disisi lain Komnas Perempuan juga mencatat ada 57 aduan kekerasan berbasis Gender yang dilakukan oleh anggota TNI, dan ada sebanyak 72 aduan Kekerasan Berbasis Gender yang dilakukan oleh anggota POLRI.

Selama lima tahun terakhir data CATAHU tercatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 36% untuk kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%. Sementara itu, selama tahun 2015-2021 data pelaporan kekerasan di dunia Pendidikan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan (9 kasus) sementara pada tahun 2020 (17 kasus). Dari laporan tersebut, KBG di Perguruan Tinggi (PT) menempati urutan pertama yaitu 35% disusul di persentasi atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 16%, selanjutnya di sekolah SMA/SMK terdapat 15%.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi mengirimkan data kekerasan terhadap perempuan melalui mitra yang telah bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Pada tahun 2021 jumlah kekerasan anak yang dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) sebanyak 179 kasus. Laporan paling banyak adalah kekerasan pada anak perempuan sebanyak 116 kasus dan 63 kasus kekerasan tersebut terhadap anak laki-laki.

Data kekerasan di Kabupaten Buton pada tahun 2021 sejumlah 8 kasus dari seluruh kecamatan di Kabupaten Buton. Korban perempuan tercatat 6 kasus dan selebihnya yaitu 2 kasus adalah laki-laki yang menjadi korban. Dari 8 kasus kekerasan terdapat 3 kasus kekerasan terhadap anak dan 5 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Gambar 8. 1 Trend Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Buton



Gambar 8.1 menunjukkan trend kasus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bahwa data jumlah kasus menurun dari beberapa tahun belakang. Data tahun 2018 terdapat 16 kasus, data tahun 2019 terdapat 15 kasus, data tahun 2020 terdapat 14 kasus dan data tahun 2021 terdapat 8 kasus. Bentuk-bentuk kasus di tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan didominasi oleh kasus kekerasan seksual sebanyak 14 kasus dan penelantaran 2 kasus. Pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan masih didominasi kasus kekerasan seksual sebanyak 8 kasus, kekerasan fisik 4 kasus, dan penelantaran 3 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus yang dilaporkan didominasi oleh kasus kekerasan seksual sebanyak 10 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 4 kasus. Sedangkan ditahun 2021 jumlah kasus yang dilaporkan kasus kekerasan seksual sebanyak 3 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 5 kasus.

Masalah Kekerasan dari data jumlah yang terjadi di propinsi berkaitan dengan daerah kabupaten/kota termaksud Kabupaten Buton, dari data jumlah kasus yang terjadi adalah jauh dari ideal. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai kendala, misalnya mereka menganggap kekerasan terhadap perempuan merupakan aib keluarga yang akan tercemar, masalah keuangan, dan masih banyak yang berpikir bahwa jika ia melaporkan kasusnya ke pihak yang

berwajib, maka akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk memproses kasus, serta jarak untuk melakukan pelaporan sangat jauh. Inilah salah satu yang menjadi kendala bagi korban kekerasan.

Hal ini menunjukkan rumah dan lingkungan seperti tempat kerja, masih tidak aman bagi perempuan. Sisanya adalah kekerasan yang terjadi karena kebijakan yang tidak pro perlindungan perempuan, seperti kasus tes keperawanan polisi, larangan adopsi, dan kasus pekerja migran atau TKW. Kasus-kasus ini merupakan kasus penelantaran Negara yang sebenarnya kasus semacam itu bisa dicegah oleh Negara (Komnas Perempuan 2018).

Karena itu, Komnas Perempuan mengharapkan pemerintah dan masyarakat harus benar-benar memahami bentuk kekerasan terhadap perempuan, sehingga kasus serupa dapat diminimalisir. Selain itu, tidak pernah ada jerat hukum yang kuat bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan sebab Sebagian besar aparat hukum tidak pernah berpihak pada korban. Kalau ada kasus pemerkosaan, misalnya, selalu menyalahkan pakaian perempuan atau kenapa perempuan suka keluar malam dan lain-lain alasan. Dengan demikian, maka para pelaku tidak merasa bersalah dan alasan tersebut dapat menyelamatkan pelaku.

Lebih khusus lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi segala tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, atau perampasan secara verbal atau fisik, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa. Biasanya ditunjukan pada perempuan atau anak perempuan yang merugikan baik secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-sewenang sehingga mengekalkan subordinasi perempuan (Heise et al, Hakimi dkk, 2001).

Kekerasan terhadap perempuan adalah Tindakan yang menghambat tercapainya kesetaraan, kemajuan, dan perdamaian. Dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tertentu, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, yang mencakup tiga ruang lingkup, yakni kekerasan di lingkup domestic, kekerasan di dalam masyarakat serta kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.

8.2 Kekerasan Berbasis Gender

Berbagai kekerasan berbasis gender tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai dan pandangan kultural serta ideologi patriarki yang selalu memposisikan perempuan sebagai objek penderita dan berada di pihak terpinggirkan yang berlaku dalam struktur kehidupan. Posisi subordinat mengakibatkan perempuan selalu terpinggirkan juga karena stereotype negatif terhadap perempuan, sehingga berakibat kurang menguntungkan, baik secara fisik maupun psikis. Kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi kekerasan di ranah privat yang acap kali tabu untuk diungkap.

Secara umum, kasus kekerasan yang timbul ialah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang umumnya dilatarbelakangi oleh :

- Budaya patriarki,
Budaya patriarki menempatkan posisi laki-laki lebih dari segala-galanya dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah hal yang kodrati;
- Stereotip,
Pandangan dan pelabelan dapat memberikan kerugian dalam kehidupan, misalnya laki-laki merasa kuat sehingga harus menguasai perempuan yang dipandang lemah;
- Interpretasi agama yang bias gender,
Interpretasi agama yang bias gender cenderung tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya suami boleh memukul istri kalau istri menolak melayani kebutuhan seksual suami dengan alasan nusyuz;
- Tumpang tindih dengan legitimasi budaya
Kekerasan yang berlangsung tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Harapan Komnas Perempuan sejak tahun 2012 dan kita semua yang sejak lama untuk disahkannya RUU tentang penghapusan kekerasan

terhadap perempuan telah resmi disahkan dan berhasil masuk Program Legislasi Nasional atau yang biasa disebut (Prolegnas), sehingga harapan kita bersama untuk dapat mengurangi dan menekan peningkatan kekerasan pada perempuan dan anak.

Tabel 8. 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Tahun 2021

No	Unit/ Intansi	Kasus	S	0- 5	6- 12	13- 17	18- 24	25- 44	45- 59	60 ⁺
1	Pasarwajo	8	L	0	0	2	0	0	0	0
			P	0	1	0	1	4	0	0
			T	0	0	0	0	0	0	0
2	Wabula	0	L	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	0	0	0	0
			T	0	0	0	0	0	0	0
3	Wolowa	0	L	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	0	0	0	0
			T	0	0	0	0	0	0	0
4	Siotapina	0	L	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	0	0	0	0
			T	0	0	0	0	0	0	0
5	Lasalimu Selatan	0	L	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	0	0	0	0
			T	0	0	0	0	0	0	0
6	Lasalimu	0	L	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	0	0	0	0
			T	0	0	0	0	0	0	0
7	Kapontori	0	L	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	0	0	0	0
			T	0	0	0	0	0	0	0
Total			L	0	0	2	0	0	0	0
			P	0	1	0	1	4	0	0
			T	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton

Data pada table 8.1 diatas menunjukkan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2021. Gambaran jumlah kasus setiap kecamatan dan rentang usia korban dari 0-60 tahun keatas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menggunakan data langsung dari UPTD PPA Kabupaten Buton. Untuk itu data pada table 8.1 diatas dapat dianalisa lebih komprehensif. Namun masih ada beberapa kabupaten yang belum melakukan pendapataan yang terlihat masih kosong angkanya pada table diatas.

Total kasus kekerasan pada tahun 2021 sejumlah 8 kasus dari seluruh kecamatan di Kabupaten Buton. Korban perempuan tercatat 6 kasus dan selebihnya yaitu 2 kasus adalah laki-laki yang menjadi korban. Dari 8 kasus kekerasan terdapat 3 kasus kekerasan terhadap anak dan 5 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Table 8.1. menerangkan bahwa dari rentan umur 0-5 tidak terdapat kasus kekerasan, untuk rentan umur 6-12 terdapat 1 kasus korban adalah perempuan, untuk rentan umur 13-17 terdapat 2 kasus dengan korban adalah laki laki, untuk rentan umur 18-24 terdapat 1 kasus dengan korban adalah perempuan, untuk rentan kasus 25-44 terdapat 4 kasus dengan korban adalah perempuan.

Tabel 8. 2. Menerangkan Data Bentuk-bentuk Kekerasan di seluru Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2021

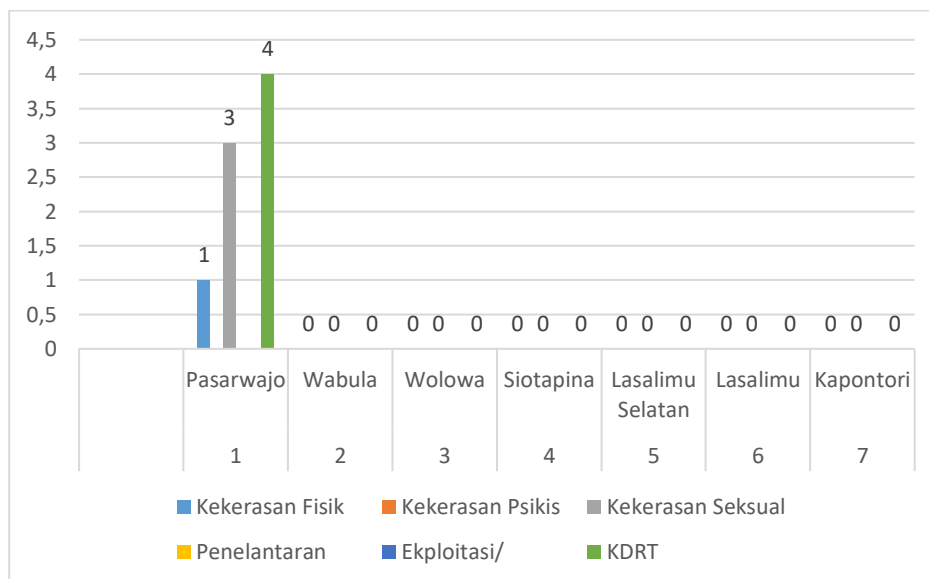
No	Kecamatan	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran	Eksploitasi/ (TTPO)	KDRT
1	Pasarwajo	1	0	3	0	0	4
2	Wabula	0	0	0	0	0	0
3	Wolowa	0	0	0	0	0	0
4	Siotapina	0	0	0	0	0	0
5	Lasalimu Selatan	0	0	0	0	0	0
6	Lasalimu	0	0	0	0	0	0
7	Kapontori	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tahun 2021

Tabel 8.2 menerangkan bahwa kasus kekerasan fisik berjumlah 1 kasus, kasus kekerasan seksual berjumlah 3 kasus, kekerasan psikis berjumlah tidak ada, eksploitasi berjumlah tidak ada, penelantaran berjumlah tidak ada, dan KDRT berjumlah 4 kasus.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi dan penelantaran. Kasus KDRT dan kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi untuk tahun 2021 dan menyusul kasus kekerasan fisik, dengan korban ada perempuan dan laki-laki.

Gambar 8. 2 . Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2021



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

KESIMPULAN



Dalam pelaksanaan Inpres No.9 tahun 2000, salah satu yang disyaratkan adalah tersedianya data terpilah yang berfungsi sebagai pembuka wawasan bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan agar kebijakan yang dihasilkan dapat responsive gender. Ketersediaan profil gender juga dapat digunakan untuk menganalisis data-data di berbagai bidang pembangunan, apakah bidang-bidang pembangunan tersebut masih bias gender atau responsive gender. Dari penyusunan Profil Gender Kabupaten Buton 2021, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- ❖ Data terakhir menunjukkan peringkat IDG Kabupaten Buton mengalami penurunan. Demikian pula dengan segi IPM dan IPG, Kabupaten Buton masih berada pada 5 peringkat terbawah dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Karenanya, indikator inti peningkatan IPM, IPG dan IDG masih perlu menjadi program proiritas pemerintah dan komitmen untuk pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, terutama perempuan sebagai actor dan pelaku pembangunan masih terus disosialisasikan.
- ❖ Dari aspek ketenagakerjaan, TPAK Kabupaten Buton mengalami trend yang menurun. Meskipun demikian, perlu pemerintah tetap harus memberikan perhatian khusus, termasuk penataan kesempatan kerja yang dapat mempekerjakan para pencari kerja yang angkanya cukup tinggi. Perihal penduduk perempuan yang menjadi kepala rumah tangga juga perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buton.
- ❖ Pendidikan menjadi aspek yang paling mendasar dalam pembangunan suatu bangsa. Perempuan usia sekolah di Kabupaten Buton telah mendapatkan kesempatan dan partisipasi yang sama dengan laki-laki. Namun demikian, masih ada beberapa kasus dimana perempuan masih terbelakang dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi kasus-kasus seperti itu terjadi di daerah-daerah terpencil. Semakin tinggi jenjang Pendidikan, maka kesenjangan antara laki-

laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase APS dan APK serta rasio APMnya. Indikator lainnya yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka dari kedua indikator menunjukkan angka laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.

- ❖ Angka Kematian Ibu sebagai salah satu indikator inti kesehatan masih menjadi permasalahan besar baik di Sulawesi Tenggara maupun di Kabupaten Buton. Promosi kesehatan Ibu dan anak masih perlu mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kualitas tenaga kesehatan juga merupakan kata kunci pelayanan yang efektif, masih perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, termasuk peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai garda terdepan kesehatan ibu dan anak di level masyarakat.
- ❖ Terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dari aspek ekonomi. Distribusi pendapatan dapat dilihat dari timpangnya rata-rata pengeluaran antara laki-laki dan perempuan. Karena itu optimalisasi pemberdayaan perempuan masih harus terus ditingkatkan dimasa datang yang dapat menjangkau tidak hanya di ibukota kabupaten melainkan juga di kecamatan-kecamatan bahkan bila perlu hingga ke desa-desa.
- ❖ Perkembangan keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijakan juga cukup menggembirakan. Posisi perempuan di legislatif masih jauh dari target afirmasi 30 persen. Begitupula keterwakilan perempuan di dalam yudikatif masih sangat minim. Untuk itu secara umum, kedudukan perempuan sebagai pengambil kebijakan masih perlu strategi kerja cerdas, tuntas dan komitmen semua pihak. Terutama keterlibatan laki-laki untuk memposisikan perempuan sebagai mitra kerja yang baik sebagai pengambil kebijakan.
- ❖ Data yang ada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum komprehensif. Hal ini juga terkait dengan masih minimnya laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa kekerasan perempuan dan anak harus dihentikan. Sebab kekerasan perempuan dan anak juga dapat mengakibatkan kemiskinan yang berkepanjangan. Untuk itu komitmen semua pihak untuk mengurangi angka kekerasan masih sangat dibutuhkan.

- ❖ Data kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Buton menunjukkan trend kasus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bahwa data jumlah kasus menurun. Meskipun demikian, perlu pemerintah tetap harus memberikan perhatian khusus dikarenakan merujuk ke data yang ada adalah data yang dilaporkan, namun belum terlihat dari data yang tidak dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Buton (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*. Pasarwajo: BPS Kabupaten Buton.

BPS. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Jakarta: BPS

BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: BPS

BPS. (2020). *Sistem Informasi Rujukan Statistik*. <http://sirusa.bps.go.id>

BPS Kabupaten Buton (2020). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton 2020*. Pasarwajo: BPS Kabupaten Buton

BPS Kabupaten Buton (2021). *Kabupaten Buton Dalam Angka 2021*. Pasarwajo: BPS Kabupaten Buton

BPS Sulawesi (2020). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara 2019*. Kendari: BPS Sulawesi Tenggara

BPS Sulawesi Tenggara (2021). *Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2021*. Kendari: BPS Sulawesi Tenggara

Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. (2020). *Profil Kesehatan Kabupaten Buton 2020*. Pasarwajo: Dinas Kesehatan Kabupaten Buton

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara. (2018). *Profil Gender Provinsi Sulawesi Tenggara 2017*. Kendari: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara

Komnas Perempuan, (2015). *Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan Catahu 2014 Kekerasan Terhadap Perempuan Negara Segera Putus Immunitas Pelaku*. Diakses pada 6 November 2015. <http://www.komnasperempuan.or.id/2015/03/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2014-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-immunitas-pelaku/>.

Satriatomo, Rachmad, (2014). *Keterwakilan perempuan di Parlemen Baru*. Diakses pada tanggal 6 November 2015. <http://www.selasar.com/politik/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-baru>.

Pusat Studi Gender Universitas Halu Oleo 2014. *Penilaian Perencanaan Program Kesehatan ibu dan anak Kabupaten Bombana*. Laporan hasil penelitian kerjasama

pemda Kabupaten Bombana dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari.

Dukcapil. (2019). *Seberapa Pentingkah NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik?* Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020. <http://dukcapil.bangka.go.id/berita/detail/seberapa-pentingkah-nik-data-kependudukan-dan-ktp-elektronik>.

